

EPITOME DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA



2014



Pusat Inovasi Pelayanan Publik
Kedeputian Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara

EPITOME

DIREKTORI

INOVASI

ADMINISTRASI NEGARA

2014



**PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEDEPUTIAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

Epitome **Direktori Inovasi Administrasi Negara**

Bibliografi

ISBN : 978-602-71620-0-6

Hak Cipta pada ©

Pusat Inovasi Pelayanan Publik - LAN

Diterbitkan Oleh:

Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Kedeputian Inovasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran No. 10,

Jakarta 10110

CETAKAN PERTAMA,

Penyunting :

Kania Damayanti, Marsono, Witra Apdhi Yohanitas

Desain sampul :

Witra Apdhi Yohanitas

— Cet.1.Jakarta,PIPP-LAN,2014

.... hal : ilus : 21x 29,7 cm

Sanksi pelanggaran Pasal 44, UU 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

TIM PENYUSUN

Tri Widodo Wahyu Utomo

Kania Damayanti

Menik Noviati

Marsono

Samiaji

Witra Apdhi Yohanitas

Teguh Henry Prayitno

Gunanto

Sundari

Suripto

Dedi Cahyadi

AA Sri Astiti

Ichwan Santosa

Selfy Andreany

Muhammad Syafiq

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang administrasi Negara, maka Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara memandang perlu untuk menyusun Direktori Inovasi Administrasi Negara. Salah satu tujuan dari penyusunan direktori inovasi administrasi negara tersebut adalah untuk mempermudah Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat dalam mencari/memperoleh informasi tentang ringkasan/intisari/epitome dari berbagai inovasi yang telah dikembangkan dan diterapkan. Disamping itu, juga untuk mempermudah bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengadopsi, mereplikasi bahkan memodifikasi inovasi disesuaikan dengan karakteristik instansi masing-masing.

Direktori inovasi administrasi negara yang telah disusun tersebut memiliki desain yang cukup sederhana, akan tetapi telah memuat informasi yang komprehensif terkait dengan proses penyusunan, implementasi, dampak, faktor pendorong dan penghambat, serta prasyarat replikasi dari masing-masing *best practice* inovasi yang telah divalidasi ke dalam direktori inovasi.

Untuk mempermudah pengguna direktori tersebut, tim penyusun telah melakukan pengelompokan inovasi berdasarkan jenisnya yang meliputi: inovasi proses, metode, produk, konseptual, teknologi, struktur organisasi, hubungan dan sumber daya manusia. Di samping itu, direktori inovasi ini juga telah dilengkapi dengan langkah-langkah penggunaan direktori, khususnya terkait dengan replikasi inovasi. Direktori inovasi ini telah tersedia dalam versi *online* yang dapat diakses melalui laman : inovasi.lan.go.id/index.php?r=inovasi/edirektori.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan hingga terbitnya direktori inovasi administrasi negara ini.

Jakarta, September 2014

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik



Kania Damayanti

SAMBUTAN

Keinginan awal menyusun buku Direktori Inovasi ini didasari oleh keyakinan bahwa praktek inovasi sektor publik begitu banyak dan tersebar di berbagai instansi pusat maupun daerah, namun belum terdokumentasikan dalam suatu wadah yang bisa diakses oleh siapapun untuk menumbuhkan inspirasi untuk berinovasi sekaligus menjadi sumber pembelajaran bagi instansi yang ingin melakukan terobosan dalam organisasinya.

Pada suatu saat nanti, kami berharap direktori ini akan menjadi bank data yang berisi praktek-praktek terbaik di bidang pelayanan publik, pengembangan kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur, maupun tata kelola pemerintahan secara luas. Kami juga akan menjaga komitmen untuk menjadikan direktori ini tidak sekedar bersifat data cetakan, namun juga dapat diakses secara *electronic* atau *online*. Bahkan kami juga akan membuka kesempatan bagi setiap instansi pemerintah untuk menambahkan secara mandiri inisiatif pembaharuan di lingkungannya masing-masing kedalam *e-directory* kami.

Ini semua kami lakukan sebagai wujud kesungguhan kami membangun sistem administrasi negara yang lebih baik, serta lebih lincah dan adaptif, sesuai dengan visi kami untuk membangun administrasi negara yang inovatif. Kami yakin bahwa direktori inovasi ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuknya. *Pertama*, sebagai sebuah sumber pengetahuan yang menceritakan bagaimana sebuah perubahan dapat dilakukan, dalam bidang apa saja perubahan itu terjadi, instansi atau daerah mana saja yang paling agresif melakukan inovasi, apa manfaat dari perubahan dan inovasi tersebut, dan seterusnya. *Kedua*, dengan beragam pengetahuan tadi maka direktori ini diharapkan dapat mendorong upaya mereplikasikan inovasi di berbagai tempat dan bidang yang berbeda. *Ketiga*, kami yakni bahwa praktek-praktek inovasi yang terekam dalam direktori ini akan memacu lahirnya inovasi-inovasi baru. Sebab, kampanye dan promosi inovasi yang paling jitu itu adalah dengan inovasi itu sendiri. Dengan kata lain, direktori ini adalah salah satu bentuk kampanye inovasi.

Selain manfaat-manfaat diatas, kami juga memiliki keyakinan bahwa informasi yang tersaji dalam direktori ini dapat menjadi dasar untuk melakukan banyak analisis yang relevan, misalnya tentang peran pemimpin dalam sebuah proses perubahan, model-model inovasi dalam bidang tertentu (pelayanan publik, pengelolaan informasi melalui *e-government*, penataan kota, dan sebagainya), keberlanjutan inovasi, serta isu-isu lain dalam lingkup administrasi publik.

Dalam upaya untuk melanjutkan proses *stock taking* inovasi di masa mendatang, kami akan terus melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik dalam metode pengumpulan data, teknik validasi dan observasi, maupun cara penulisan dan penyajiannya. Semoga kompilasi perdana yang masih sederhana ini dapat member manfaat bagi banyak instansi dan kader-kader inovator untuk tak henti melakukan pembaharuan di bidangnya masing-masing.

Jakarta, September 2014
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN

Tri Widodo W. Utomo



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan	v
Daftar Isi	vii
Prolog	ix
Kelompok Inovasi Proses	
Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) / Sistem One Stop Service (OSS) Kementerian Hukum dan HAM	2
Rawat Inap Tanpa Kelas Bagi Pasien GAKIN (Keluarga Miskin) Kabupaten Kulonprogo	4
Pelayanan KTP 1 Jam Kota Surakarta	5
Pelayanan Akhir Pekan 'Weekend Service' Kota Tangerang	6
One Stop Service Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen	7
Akte Kelahiran Jemput Bola Kota Surakarta	9
Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta	11
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta	13
Program Multiguna Jaminan Kesehatan Kota Tangerang	15
Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kota Surakarta	17
One Day Service Layanan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI	19
Pelayanan KTP di Desa/Kelurahan Kabupaten Kudus	21
Media Center Kota Surabaya	23
Kelompok Inovasi Metode	
Layanan Jemput Bola "LARASITA" Badan Pertanahan Nasional RI	26
National Traffic Management Center (NTMC) Polda Metro Jaya	28
Pelayanan Sertifikasi Tanah Di Desa-Desa Dengan Cara Jemput Bola Kabupaten Karanganyar	29
Program Kampo Waraka Kabupaten Buton Utara	31
Program Sangihe Mengajar Kabupaten Kepulauan Sangihe	32
Kampoeng KB Kota Banjar	34
Penganggaran Responsif Gender Bidang Pendidikan Kota Baubau	36
Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel Kota Bogor	37
Industri Kreatif Kota Cimahi	38
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo	40
Peningkatan Ketahanan Kota Terkait Dampak Perubahan Iklim Kota Semarang	41
Shifting Angkot Kota Sukabumi	43
Penanganan Pengemis dan Pengamen Dengan Pendekatan Kemanusiaan Kota Surakarta	44
Penanganan Gelandangan dan Orang Gila Dengan Pendekatan Kemanusiaan Kota Surakarta	45
Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa Kota Surakarta	46
Program Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Surakarta	47
Pengelolaan Sampah Terpadu Kota Probolinggo	49
Layanan Memikat Kabupaten Sehat Kabupaten Bantaeng	50
Pemberdayaan Pengrajin Tenun Tradisional Kota Denpasar	51
Pengembangan Potensi Lokal (Belimbing Dewa) Sebagai Ikon Kota Depok	53
Kawasan Tertib Rokok Kota Padang Panjang	55
Broadband Learning Center (BLC) Kota Surabaya	57
Puskemas Ramah Anak Kota Surakarta	59
Night Market Ngarsopuro Kota Surakarta	60
Perpustakaan Kampung dan Taman Cerdas Kota Surakarta	62
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Kota Surakarta	64
Pemberian Insentif Ibu Bersalin Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Buton Utara	65
Program Sumikolah Kabupaten Minahasa Utara	66
Program Basekolah Kota Bitung	68
Penataan Pasar Tradisional Dan Pemberdayaan Pedagang Garendong Kota Payakumbuh	70
Penjaminan Keamanan Produk Pangan Melalui e-Registration Badan POM RI	72
Sistem Informasi Pengelolaan Logistik Bencana Alam (SIMLOG) Kementerian Sosial RI	73
Intelligent Transport System Provinsi DKI Jakarta	75
Perbaikan Tata Kelola Pelayanan di Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Utara	77
Kelompok Inovasi Produk	
Mendekatkan Pelayanan Pembuatan SIM Pada Masyarakat Polda Metro Jaya	80
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Puskesmas Sumobito melalui "Arisan Berencana" Kabupaten Jombang	81
Pengolahan Air Limbah Kota Banjarmasin	83
Palembang Kota Clean, Green dan Blue	85
Revitalisasi Kawasan Kota Lama Kota Sawahlunto	86

Kartu Insentif Anak Kota Surakarta	88
Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta	89
Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik (Gelatik) Kabupaten Badung	91
Program Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas) Kabupaten Badung	93
Dari Ampas Tahu Terbitlah Energi Baru Kota Pekalongan	95
Kelompok Inovasi Konseptual	
Klinik Asuransi Premi Sampah Indonesia Medika Kota Malang	98
<i>Community Development</i> Solusi Kemiskinan Kabupaten Bantul	100
Kota Layak Anak Kota Denpasar	102
Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Kota Malang	103
Kota Layak Anak Kota Surakarta	105
Taman Pintar Yogyakarta Alternatif Layanan Publik Pendidikan Kota Yogyakarta	107
Kelompok Inovasi Teknologi	
SISPEDAP: Sistem Pengelolaan Data Pegawai Berbasis Web BPKP RI	109
Portal Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	110
Sistem Informasi layanan Permohonan Informasi Publik Online (SILAYAN) Kementerian Pertanian RI	112
Sistem Komputerisasi Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kota Tegal	114
Surabaya <i>Single Window</i> (SSW) Kota Surabaya	116
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Secara elektronik (<i>e-Payment</i>) Kota Surabaya	117
Sistem Penyusunan Anggaran Secara Elektronik (<i>e-Budgeting</i>) Kota Surabaya	119
Sistem Informasi Manajemen Kinerja Secara Elektronik (<i>e-Performance</i>) Kota Surabaya	121
E-Surat (Tata Persuratan Digital) Kota Surabaya	122
Klinik Kurikulum 2013 Kota Surabaya	124
Raport Online (Raport Berbasis Elektronik) Kota Surabaya	125
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) <i>Online</i> Kota Surabaya	126
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (e-Musrenbang) Kota Surabaya	128
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (<i>e-budgeting</i>) Kota Surabaya	129
<i>Tryout</i> Ujian Nasional <i>Online</i> Dinas Pendidikan Kota Surabaya	130
Jurnal Pendidikan <i>Online</i> Kota Surabaya	131
Sistem Pengendalian Kegiatan Secara Elektronik (<i>e-Controlling</i>) Kota Surabaya	132
<i>E-Delivery</i> (Elektronik Dukungan Administrasi Kegiatan) Kota Surabaya	133
Digital Arsip Kependudukan Kota Surakarta	134
Kelompok Inovasi Struktur Organisasi	
Pembentukan "Unit Layanan Paspor " Untuk Mempercepat Prosedur Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM RI	137
Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen	139
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Kredit Mikro Kota Kendari	141
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang	143
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kota Surabaya	145
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta	147
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur	149
Kelompok Inovasi Hubungan	
Kemitraan Bidan dan Dukun Kabupaten Takalar	152
Sekretariat Bersama KARTAMANTUL Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul	154
Kelompok Inovasi SDM	
Desa Mandara Mandidoha (Desa Siaga Aktif) Kabupaten Konawe Selatan	157
Program Perempuan Pahlawan Ekonomi Kota Surabaya	158
Epilog	160

Prolog

Pengertian Inovasi dalam konteks direktori inovasi adalah ide, gagasan, pemikiran, terobosan dalam rangka melakukan pembaharuan dalam praktik dan proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi negara. Suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan dapat dikatakan sebagai inovasi jika memiliki unsur kebaruan, manfaat, dapat diadopsi/ replikasi, berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jenis inovasi administrasi negara yang disusun untuk keperluan direktori inovasi terdiri dari : (1) inovasi proses; (2) inovasi metode; (3) inovasi produk; (4) inovasi konseptual; (5) inovasi teknologi; (6) inovasi struktur organisasi; (7) inovasi hubungan; (8) inovasi sumber daya manusia.

Direktori inovasi administrasi negara adalah kumpulan rujukan, kebijakan, model praktik-praktik inovasi yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam bidang tata pemerintahan, pelayanan publik dan kelembagaan serta sumber daya aparatur. Direktori inovasi ini dimanfaatkan/*digunakan* sebagai referensi bagi Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN/ BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat untuk mempermudah dalam pencarian/ perolehan informasi inovasi apa saja yang telah dilakukan di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Disamping itu juga untuk memicu Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN/ BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat untuk melakukan replikasi inovasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan Direktori Inovasi ini, maka perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

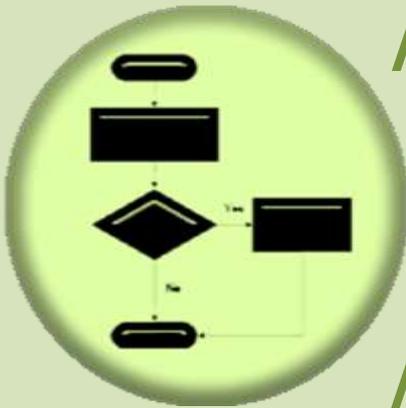
Langkah 1 : menjadikan direktori inovasi sebagai referensi untuk melakukan replikasi;

Langkah 2 : memformulasikan kembali inovasi yang terdapat dalam direktori inovasi menjadi sebuah ide baru ke dalam tindakan nyata dengan: a) diawali langkah pengidentifikasian masalah yang dihadapi untuk merumuskan alternatif solusi b) mempertimbangkan ketersediaan sumber daya c) mempertimbangkan dukungan teknis;

Langkah 3 : mendapatkan dukungan dan sumber daya yang tepat sesuai dengan jenis dan karakteristik inovasi yang akan direplikasi seperti komitmen pimpinan, peraturan perundang-undangan, kolaborasi dengan stakeholders, sarana dan prasarana, anggaran, kompetensi pegawai, dan teknologi informasi;

Langkah 4 : menyesuaikan kembali dengan kondisi instansi seperti mendesain ulang inovasi, memodifikasi inovasi, uji terapan inovasi, melatih pegawai dan memeriksa kembali prasyarat replikasi;

Langkah 5 : mengimplementasikan inovasi yang telah didesain ulang, mengevaluasi dan mengukur kemanfaatan inovasi, mendokumentasikan dan mempublikasi inovasi kepada masyarakat melalui berbagai media.



KELOMPOK INOVASI PROSES

Inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal agar lebih sederhana dan lebih efisien. Ruang lingkup dari inovasi proses meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur.

**SISTEM PELAYANAN PENERBITAN PASPOR TERPADU (SPPT)/
SISTEM *ONE STOP SERVICE* (OSS)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Produk inovasi	: Perubahan Pelayanan Penerbitan Paspor Republik Indonesia		
Jenis Inovasi	: Proses		
Unit Pelaksana	: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan		
Penggagas	: Direktorat Jenderal Imigrasi		
Tahun inisiasi	: 2012	Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan		

Deskripsi :



Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) / Sistem *One Stop Service* (OSS) merupakan terobosan Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berupa penyederhanaan atas prosedur birokrasi yang panjang yang sebelumnya harus mengantri 4 kali menjadi mengantri 1 kali dalam mendapatkan pelayanan paspor. Terobosan ini dinilai sangat sesuai dengan moto Dirjen Imigrasi yakni " menuju pelayanan yang lebih aman, mudah, transparan, serta memberikan kepastian dengan pemanfaatan teknologi informasi". Harapannya adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat ketika mengajukan permohonan penerbitan paspor di setiap kantor Imigrasi. Terobosan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh Dirjen Imigrasi seperti rendahnya kepastian layanan, adanya praktik percaloan,

permasalahan antrian di kantor layanan, permasalahan perlakuan pelayanan kepada masyarakat, profesionalisme petugas pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat/Humas keimigrasian. Sebelumnya untuk mengajukan permohonan paspor, masyarakat harus mengantri 4 kali, saat menyerahkan berkas, pembayaran foto dan wawancara. Melalui metode dari sistem baru ini, 4 proses tersebut disatukan dalam satu meja. Jadi, masyarakat hanya perlu mengantri 1 kali saja untuk mendapatkan pelayanan paspor. Tujuan dilakukannya terobosan ini adalah untuk meningkatkan kepastian layanan pembuatan dan perpanjangan paspor kepada masyarakat yang dinilai semakin peka terhadap perlakuan pelayanan dari petugas dan infrastruktur pelayanan baik yang positif maupun negatif, selain itu juga dapat meminimalisir praktek percaloan. Strategi yang dilakukan untuk melakukan terobosan ini adalah dengan merubah paradigma pelayanan paspor berupa perubahan bisnis proses dalam pelayanannya. Selain itu dilakukan pula perubahan terhadap sistem antrian karena tempat layanan yang menjadi satu serta pembayaran paspor melalui bank persepsi.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya keinginan dan komitmen untuk merubah paradigma tentang pelayanan penerbitan paspor;
- ❖ Dukungan regulasi dimana didirikan "Unit Layanan Paspor" yang bertugas untuk melaksanakan Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) / sistem *one stop service* (OSS);
- ❖ Adanya fasilitasi anggaran dan sarana prasarana untuk operasional unit tugas;
- ❖ Adanya sebuah sistem online yang digunakan untuk percepatan berkas pemohon.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Banyaknya jumlah pemohon penerbitan paspor baik baru maupun perpanjangan (jumlah rata-rata 500 orang /hari)
- ❖ Pemohon yang tidak ingin menunggu lama untuk dilayani (akibat dari antrian yang banyak);
- ❖ Profesionalisme petugas pelayanan yang masih kurang dalam melayani pemohon;
- ❖ Masih adanya praktek percaloan dimana mereka membawa banyak berkas pemohon dalam satu kali layanan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Merubah Paradigma Pelayanan Paspor (menanamkan prinsip layanan Cepat & Terukur, Bersih & Transparan, Mudah, Aman, serta Nyaman sebagai dasar perubahan paradigma);
- ❖ Perbaikan Sistem Antrian (prinsip antrian (*first come first served*), metode *multichannel* (walk in/go show, jadwal online), penggunaan aplikasi (Sistem Aplikasi SPRI, Sistem Antrian);
- ❖ Terintegrasi dengan Sistem SPRI; Interface Sistem SPRI dan Pembayaran via BNN;
- ❖ Melakukan Pembayaran Paspor Melalui Bank Persepsi;
- ❖ Penerapan Sistem *One Stop Service* (OSS);
- ❖ Pembukaan Unit Layanan Paspor (ULP) sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Pembentukan Unit;
- ❖ Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

Manfaat :

- ❖ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan paspor dimana berdasarkan indeks kepuasan tahun 2013 sebesar 74,96% menjadi 76,99%
- ❖ Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Public Service Accountability)

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya inisiasi dan komitmen untuk merubah paradigma pelayanan lama yang birokratis menjadi paradigma yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
- ❖ Menyusun peraturan yang tepat untuk legalitas program yang akan dilakukan;
- ❖ Mempersiapkan anggaran yang sesuai untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan;
- ❖ Melakukan perubahan manajemen pelayanan dengan kemikiran kenyamanan masyarakat sebagai penerima layanan;
- ❖ Memberikan alternatif pembayaran layanan yang mudah diakses dan efektif;
- ❖ Melakukan kerjasama dengan unit serta stakeholder terkait.

Teknik Validasi : Publikasi/Presentasi
Sumber : Bahan Presentasi Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

RAWAT INAP TANPA KELAS BAGI PASIEN GAKIN (KELUARGA MISKIN) **KABUPATEN KULON PROGO**

Produk inovasi	: Kebijakan Pelayanan Rawat Inap Tanpa Kelas Bagi Pasien GAKIN
Jenis Inovasi	: Proses
Penggagas	: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Unit Pelaksana	: RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo
Tahun inisiasi	: 2011 Tahun implementasi : 2012
Kontak Person	: RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo- (0274)773092

Deskripsi:



Pelayanan rawat inap tanpa kelas merupakan kebijakan pelayanan kesehatan *universal coverage* bagi seluruh penduduk Kulon Progo sejak tahun 2012 dengan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan terutama untuk keluarga miskin (GAKIN). Kebijakan ini merupakan akibat dari *over capacity* (BOR kelas III tahun 2011 sebesar 80% menjadi 114,5% pada tahun 2013). Tujuan kebijakan ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan akses layanan kesehatan terutama untuk keluarga miskin (GAKIN) dengan memanfaatkan berbagai jaminan diantaranya Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda. Strategi yang ditempuh RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo dalam menerapkan kebijakan ini adalah dengan menambah 24 kamar kelas 3 sehingga menambah ruang bagi pasien Gakin untuk mendapatkan fasilitas rawat

inap. Meski rawat inap Gakin harusnya di kelas 3, namun pasien bisa menempati kelas 2 atau 1, tanpa diminta tambah iuran.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen kepala daerah dan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pasien tanpa pandang status;
- ❖ Keinginan untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan terutama untuk keluarga miskin (GAKIN);
- ❖ Tingginya ratio kunjungan GAKIN ke Rumah Sakit;
- ❖ Pelayanan rawat inap kelas III *over capacity* (BOR kelas III mencapai 114,5%);
- ❖ Adanya dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Adanya kebingungan dari pasien rawat inap Gakin terhadap kebijakan rawat inap tanpa kelas;
- ❖ Kekhawatiran pasien Gakin terkena biaya tambahan;
- ❖ Bangsal rawat inap yang selalu penuh akibat antusiasme masyarakat;
- ❖ Jumlah bangsal yang kurang sehingga harus merubah pemanfaatan bangsal lainnya.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan rawat inap tanpa kelas;
- ❖ Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pasien tanpa pandang status;
- ❖ Mempersiapkan anggaran yang diperlukan untuk perubahan yang akan terjadi;
- ❖ Melakukan perubahan tata ruang terhadap beberapa bangsal yang ada;
- ❖ Memberi pelatihan yang memadai bagi staf rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan;
- ❖ Melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Manfaat :

- ❖ Daya tampung RS semakin meningkat;
- ❖ Pemanfaatan layanan GAKIN semakin meningkat secara signifikan yang hal tersebut dapat dilihat dari BOR tahun 2011 sebesar 80% menjadi 114,5% pada tahun 2013;
- ❖ Menurunnya tingkat complain terhadap pelayanan rumah sakit bahkan sampai zero complain (tidak ada komplek);
- ❖ Berkurangnya pasien rawat inap Gakin yang ditolak.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen Rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pasien tanpa pandang status;
- ❖ Anggaran yang diperlukan untuk perubahan yang akan terjadi harus tersedia;
- ❖ Melakukan perubahan terhadap tata ruang bangsal rumah sakit;
- ❖ Pelatihan yang memadai bagi staf rumah sakit;
- ❖ Persiapkan langkah evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia

PELAYANAN KTP 1 JAM KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Prosedur pelayanan pembuatan KTP
Jenis Inovasi	: Proses
Penggagas	: Walikota Joko Widodo (2005)
Unit Pelaksana	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun inisiasi	: 2005
Tahun implementasi	: 2005
Kontak Person	: Bidang Dokumentasi dan Bidang Data Statistik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Deskripsi :



Pelayanan KTP satu jam merupakan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan banyaknya keluhan masyarakat tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus KTP. Pada tahun 2005 lewat program Sistem Kependudukan (SIMDUK), Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, dan Kelurahan dituntut untuk mempercepat pelayanan KTP. Saat itu untuk pembuatan KTP memerlukan waktu 14 hari. Untuk melakukan pemangsaan waktu pelayanan, maka dilakukan simulasi pelayanan pembuatan KTP yang dilakukan langsung oleh Walikota Joko Widodo. Tidak sampai satu bulan, setelah melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan maka Pelayanan KTP 1 jam siap dilaksanakan di kota Surakarta. Pada pelayanan ini disosialisasikan melalui surat edaran walikota tentang pelayanan KTP 1 jam.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Surakarta untuk memberikan pelayanan pengurusan KTP yang mudah cepat dan nyaman bagi warganya;
- ❖ Tersedianya infrastruktur yang memadai karena mengadopsi sistem perbankan;
- ❖ Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan petugas lapangan dalam melaksanakan pelayanan;
- ❖ Kesadaran masyarakat dalam melengkapi berkas pengajuan sehingga dapat dilayani dengan cepat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Petugas merasa kurang support dari segi reward atas kinerja yang dilakukan;
- ❖ Kurangnya sosialisasi mengenai kelengkapan dalam pengajuan KTP, sehingga banyak warga harus melengkapi berkas yang kurang;
- ❖ Adanya keterbatasan jaringan sistem kependudukan (provider) yang terkadang tidak berjalan dengan baik karena sistem kependudukannya berjalan secara online;
- ❖ Voltase listrik kantor penyelenggara yang kurang sehingga perlu ditambah.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya perintah walikota untuk mempersingkat waktu pelayanan pembuatan KTP;
- ❖ Simulasi/ Ujicoba pelayanan pembuatan KTP. Saat simulasi, pengurusan pembuatan KTP dapat berlangsung selama 1 jam;
- ❖ Mempersiapkan sarana dan prasarana ditempat pelayanan (Memperbaiki fasilitas ruang tunggu, penyediaan pendingin ruangan, dan kartu antrian);
- ❖ Memberikan pelatihan untuk petugas pelayanan yang terdiri dari petugas layanan, operator sistem kependudukan dan Kasi Pemerintahan;
- ❖ Menginformasikan kepada masyarakat tentang pelayanan KTP 1 Jam yang telah dicanangkan;
- ❖ Pelaksanaan pelayanan 1 jam.

Manfaat :

- ❖ Kemudahan dalam pengajuan pengurusan KTP;
- ❖ Adanya prosedur yang jelas dalam pelayanan pengurusan KTP;
- ❖ Adanya kenyamanan dalam pengurusan KTP;
- ❖ Waktu yang singkat untuk mengurus KTP.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah setempat dalam percepatan pengurusan KTP;
- ❖ Adanya pendelegasian wewenang dalam pelayanan KTP;
- ❖ Mempersiapkan surat edaran kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan;
- ❖ Menyusun perubahan SOP untuk petugas pelayanan;
- ❖ Melakukan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan termasuk ruang tunggu.

Teknik Validasi	: Observasi
Sumber	: Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

PELAYANAN AKHIR PEKAN 'WEEKEND SERVICE' KOTA TANGERANG

Produk inovasi	: Pelayanan Pertanahan Pada Akhir Pekan
Jenis Inovasi	: Proses
Penggagas	: Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Unit Pelaksana	: Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Tahun inisiasi	: 2013
Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Kantor Pertanahan Kota Tangerang - (021)70055003

Deskripsi :



Pelayanan akhir pekan "weekend service" merupakan pengembangan program dari kantor pertanahan kota Tangerang untuk melakukan pelayanan produk pertanahan bagi masyarakat yang dilaksanakan pada akhir pekan. Layanan weekend service dilatarbelakangi minimnya informasi dan sulitnya masyarakat Kota tangerang mendapatkan akses layanan. Layanan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 27 April 2013.

Masyarakat Kota Tangerang yang sebagian besar karyawan tidak bisa mengakses layanan di hari kerja karena faktor kesibukan. Jenis – jenis layanan weekend service terdiri dari (1) pemberian hak milik untuk hak atas tanah untuk rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah sederhana (2) Pengecekan sertifikat (3) Pemblokiran Sertifikat (4) SKPT (5) Roya. Dengan

adanya pelayanan ini Pemerintah Kota Tangerang menilai akses masyarakat / pemohon langsung untuk mendapatkan layanan pertanahan yang transparan, cepat dan lebih berkualitas menjadi lebih besar. Data pemerintah untuk kepemilikan rumah dan tanah juga lebih cepat terkumpul.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen Kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk dapat mengakomodir masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan di hari kerja;
- ❖ Adanya keinginan dari kantor pertanahan Kota Tangerang agar masyarakat bisa mengurus langsung administrasi pertanahan tanpa antrian panjang di hari kerja;
- ❖ Masih banyaknya pendataan tanah yang belum selesai tepat waktu;
- ❖ Banyaknya masyarakat yang akan mengurus hak kepemilikan tanah.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Sulitnya masyarakat mendapatkan akses pelayanan administrasi pertanahan;
- ❖ Sosialisasi kepada masyarakat yang kurang sehingga tidak banyak yang mengetahui program ini;
- ❖ Insentif yang diberikan kepada petugas dirasa masih kurang memadai;
- ❖ Pelaksanaan pemberian pelayanan akhir pekan dapat mengganggu tingkat kebugaran dari SDM kantor pertanahan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Tahapan persiapan berupa rapat internal dan koordinasi dengan instansi terkait. Seluruh petugas juga dipersiapkan untuk mau menjalankan tugasnya pada akhir pekan;
- ❖ Pemberian insentif untuk para petugas;
- ❖ Tahapan sosialisasi melalui media spanduk, media cetak;
- ❖ Tahapan pelaksanaan pelayanan akhir pekan sesuai dengan jenis pelayanan yang disepakati pada saat persiapan;
- ❖ Tahapan evaluasi untuk melihat seberapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program ini.

Manfaat :

- ❖ Memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat / pemohon langsung untuk mendapatkan layanan pertanahan yang transparan, cepat dan lebih berkualitas;
- ❖ Masyarakat mendapatkan layanan pertanahan yang transparan, cepat dan lebih berkualitas;
- ❖ Mendorong meningkatnya penerimaan Negara bukan pajak.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari kantor pertanahan untuk memberikan pelayanan pada akhir pekan;
- ❖ Adanya dukungan sarana prasarana dan anggaran yang memadai;
- ❖ Adanya pendekatan kepada masyarakat untuk mau mengurus administrasi pertanahan pada akhir pekan.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia

ONE STOP SERVICE PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN

Produk inovasi	: Sistem Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
Jenis Inovasi	: Proses
Unit Pelaksana	: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK)
Penggagas	: Bupati Sragen - Agus Fatchurrahman, SH, MH
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Bappeda Kabupaten Sragen

Deskripsi :



Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen adalah unit pelayanan publik yang berfungsi memberikan pelayanan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sragen melalui sistem one stop service. Sebelum berdirinya UPTPK tersebut, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tersebarunya tempat dan jenis pelayanan yang ada di masing-masing SKPD tersebut, pada implementasinya cenderung akan memperpanjang birokrasi dan membutuhkan waktu, tenaga, biaya transportasi yang lebih besar. Selain itu keterbatasan masyarakat miskin mengenai tahapan-tahapan dan prosedur masing-masing program pelayanan kemiskinan menimbulkan kesulitan masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan secara cepat dan berkualitas. Disamping itu, program penanganan kemiskinan selama ini juga terkendala dengan adanya perbedaan data base kemiskinan antar SKPD dan BPS. Berdasarkan kondisi tersebut, penanganan pelayanan bagi warga miskin di Kabupaten Sragen menjadi tidak efektif dan efisien, baik dari sisi waktu maupun kualitas pelayanannya.

Adapun tujuan pembentukan UPTPK ini pada hakekatnya adalah sebagai wujud komitmen untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Disamping itu, tujuan pembentukan UPTPK juga dalam rangka memangkas jalur birokrasi warga miskin Sragen untuk mendapatkan berbagai pelayanan sesuai kebutuhannya dengan waktu pelayanan yang ditentukan. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPTPK, beberapa strategi yang dilaksanakan yaitu dengan melengkapi Sistem Informasi Management (SIM) UPTPK, aplikasi Kantaya, aplikasi Surya. Selain itu UPTPK telah dilengkapi Website dengan alamat <http://uptpk.sragenkab.go.id>. Melalui website ini masyarakat bisa mendapatkan informasi jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTPK termasuk syarat dan prosedur, men-download form persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan, serta memuat pengumuman dan berita-berita kegiatan UPTPK seputar penanggulangan kemiskinan. Untuk menjamin keberlangsungan program UPTPK tersebut, telah mendapat dukungan anggaran operasional baik dari APBD Kabupaten Sragen, APBD Provinsi maupun APBN. Selain itu, untuk kegiatan-kegiatan tertentu, UPTPK juga mendapat dukungan swasta antara lain dari *Corporate Forum For Community Development* dan Mitra Kesejahteraan Rakyat.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan daerah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat;
- ❖ Keinginan memperpendek birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, mengurangi biaya transportasi bagi warga miskin;
- ❖ Keinginan untuk mengkonsolidasikan perbedaan data warga miskin yang ada di masing-masing SKPD, sehingga tidak data yang simpang siur;
- ❖ Keinginan untuk mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan di masing-masing SKPD ke dalam sistem one stop service.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Pembentukan UPTPK pada dasarnya merupakan implementasi jargon "Mbelo Wong Cilik" yang merupakan komitmen Bupati terpilih, oleh karena itu keberlangsungannya mungkin sangat bergantung pada sukses tidaknya Bupati dalam memimpin daerah;
- ❖ Masih rendahnya tingkat validitas database KK miskin;
- ❖ Rendahnya budaya malu masyarakat, lebih suka dimiskinkan agar mendapat pelayanan gratis;
- ❖ Biaya operasionalisasi UPTPK masih bergantung kepada banyak pihak, belum ada upaya mempersiapkan fresh money atau sumber-sumber anggaran non-APBD yang sah dan tidak mengikat yang luwes dalam penggunaannya.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membangun komitmen di jajaran pimpinan daerah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- ❖ Membentuk payung hukum berupa kebijakan daerah yang secara legal formal dapat dijadikan dasar hukum dalam penyatuan fungsi pelayanan yang dimiliki oleh masing-masing SKPD;
- ❖ Menyusun dan mendesain organisasi serta tugas dan fungsi secara jelas;
- ❖ Menyiapkan SDM pelayanan yang profesional;

- ❖ Mencari sumber-sumber pendanaan yang cukup;
- ❖ Melakukan evaluasi kinerja organisasi sebagai bahan dalam peningkatan kualitas pelayanan secara terus-menerus.

Manfaat :

- ❖ Semua data dan jenis pelayanan dapat terintegrasi;
- ❖ UPTPK dapat melayani Jamkesmas, Jamkesda, beasiswa anak sekolah dan perguruan tinggi, penanganan anak putus sekolah, bantuan alat dan modal untuk KK miskin, santunan kematian, perawatan gelandangan dan orang telantar, perbaikan rumah tidak layak huni, Raskin, serta jaminan sosial lanjut usia dan cacat berat;
- ❖ Data penduduk miskin menjadi konsisten dengan data yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya kimitmen pimpinan daerah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada warga miskin;
- ❖ Adanya kesadaran dan kerelaan masing-masing Kepala SKPD untuk menyerahkan fungsi pelayanan kepada UPTKP;
- ❖ Tersedianya sumber pendanaan yang cukup.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Sinovik Top 99

AKTE KELAHIRAN JEMPUT BOLA KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Mekanisme/ jaringan pencatatan akte kelahiran
Jenis Inovasi	: Proses
Penggagas	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama Instansi	: Kota Surakarta
Unit Pelaksana	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun inisiasi	: 2000
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Bidang dokumentasi dan Bidang data statistik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Deskripsi :



Akte kelahiran jemput bola merupakan kegiatan percepatan pencatatan kelahiran di kota Surakarta. Tujuan metode ini dilakukan adalah untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akte kelahiran anak. Pengurusan akte kelahiran sebelumnya adalah selama 14 hari, melalui kegiatan ini telah disederhanakan prosedurnya menjadi 7 hari. Kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2000 melalui kegiatan tahunan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi Rumah Sakit, Puskesmas dan Bidan agar segera dapat mendata kelahiran anak dan membuat akte kelahirannya. Kedepannya diharapkan dapat memotong jumlah hari menjadi 3 hari. Kegiatannya menjadi lebih formal dengan adanya penandatanganan kesepakatan dengan stakeholder yakni Rumah sakit, puskesmas dan bidan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen pemerintah daerah dan para stakeholder (Rumah sakit, puskesmas, bidan mandiri) untuk melaporkan kelahiran;
- ❖ Adanya keinginan masyarakat untuk memiliki akte kelahiran dengan cepat dan mudah;
- ❖ Adanya pembebasan biaya administrasi pelayanan adminduk yang berlaku sejak 21 Januari 2014;
- ❖ Adanya pemberian dana bagi petugas yang melaksanakan program akte kelahiran jemput bola.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Jumlah petugas yang melakukan program akte kelahiran jemput bola terbatas;
- ❖ Masih kurangnya kompensasi yang diberikan kepada petugas untuk menjemput/ menghantarkan dokumen catatan kelahiran.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Inisiasi pencatatan akte kelahiran jemput bola oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil;
- ❖ Melaksanakan pencatatan akte kelahiran melalui sebuah program kerja jemput bola pada tahun 2000;
- ❖ Menyusun kebijakan daerah terkait dengan pencatatan kelahiran jemput bola;
- ❖ Melakukan kerjasama dengan NGO terkait tentang pencatatan kependudukan (lahir, mati, kawin, cerai) pada tahun 2004 – 2005-
- ❖ Membangun jejaring kerja dengan rumah sakit, puskesmas dan bidan mandiri untuk mau berperan aktif;
- ❖ Melakukan pelatihan terhadap petugas pelaksana pada tahun 2004 dan khusus petugas kelahiran pada tahun 2012 termasuk petugas rumah sakit 23 RS dan 51 petugas register di kelurahan;
- ❖ Mempersiapkan fasilitas untuk aplikasi sistem untuk mengisi formulir pencatatan kelahiran berbasis web pada tahun 2013.

Manfaat :

- ❖ Adanya percepatan pelayanan pencatatan kelahiran di Kota Surakarta;
- ❖ Meningkatkan jumlah kepemilikan akte kelahiran penduduk kota Surakarta;
- ❖ Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (Indeks kepuasan atas adminduk tahun 2013 adalah 75,69).

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dan para stakeholder (Rumah sakit, puskesmas, bidan mandiri);
- ❖ Jumlah petugas jemput bola dan dana yang memadai;
- ❖ Memformalkan kerjasama dengan membuat kesepakatan dalam ini dengan rumahsakit, puskesmas, bidan mandiri;
- ❖ Melakukan sosialisasi ke masyarakat;
- ❖ Menyusun kebijakan yang dapat mengatur proses kerja dari kegiatan tersebut.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta.

UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN (UPIK) KOTA YOGYAKARTA

Produk inovasi	: Pelayanan Informasi dan Keluhan
Jenis Inovasi	: Proses
Penggagas	: Walikota Herry Zudianto, 2001
Unit Pelaksana	: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun inisiasi	: 2001 Tahun implementasi : 2001
Kontak Person	: Kantor Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Deskripsi :



Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) merupakan wadah yang disediakan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk menampung informasi dan keluhan masyarakat kotanya. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan informasi dan keluhan yang ingin disampaikan masyarakat tanpa perlu prosedur yang berbelit belit. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari otonomi daerah yakni memangkas birokrasi dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk wadah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat agar interaksi kedua

belah pihak terjalin dengan baik. Masyarakat bisa dengan mudah dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan atau keluhan, sebaliknya pemerintah bisa menerima masukan dan kritik yang membangun untuk meningkatkan pelayanan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen Pimpinan untuk menjalankan program yang telah dicanangkan;
- ❖ Ketersediaan infrastruktur baik sistem aplikasi (SW), peralatan (HW) maupun sistem jaringan (Network)

Faktor Penghambat Inovasi :

Peralatan pendukung yang harus diupgrade sehingga dapat melancarkan sistem secara keseluruhan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Untuk membangun layanan penanganan informasi dan keluhan Pemko melakukan kerjasama dengan Swiss *contact*, perkumpulan untuk kajian perkembangan ekonomi kerakyatan (PKPEK) dan Gatra Tribhata Gerakan Kemitraan Bisnis Beretika Berkelanjutan untuk merencanakan dan melaksanakan sistem, cakupan dan metode layanan UPIK;
- ❖ Membentuk Tim Koordinasi Hotline UPIK serta berbagai Peraturan Walikota yang memayungi UPIK;
- ❖ Menetapkan PT. Exindo sebagai pemenang tender pengadaan sistem dan pelatihan SDM pengoperasian UPIK.

Manfaat :

- ❖ Peningkatan kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat;
- ❖ Kemudahan dalam menyusun agenda dan skala prioritas;
- ❖ Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi, keluhan dan saran kepada pemerintah;
- ❖ Meningkatnya tanggungjawab aparat atas layanan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari semua pihak yang dapat dituangkan dalam peraturan mengikat;
- ❖ Mempersiapkan sistem kerja pengaduan karena pengelolaan pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan fungsi umum;

- ❖ Mempersiapkan sistem aplikasi yang dapat mendukung program ini;
- ❖ Mempersiapkan infrastruktur (HW);
- ❖ Mempersiapkan sistem jaringan (*network*) yang memadai.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Kumpulan Praktik Baik Inovasi Daerah Kemenpan RB tahun 2013

PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Metode pemeliharaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan kartu pengenalan gold dan silver
Jenis Inovasi	: Proses
Penggagas	: Wali Kota Surakarta: Ir. H. Joko Widodo
Unit Pelaksana	: UPTD PKMS, Dinas Kesehatan Kota Surakarta
Tahun inisiasi	: 2007
Tahun implementasi	: 2008
Kontak Person	: UPT PKMS dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta

Deskripsi :



Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) merupakan pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan yang belum tercakup dalam program jamkesmas. PKMS diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kota Surakarta dalam bentuk pengobatan rawat jalan di Puskesmas dan RSUD dan rawat inap di Puskesmas dan RSUD serta Rumah Sakit yang ditunjuk. PKMS mempunyai tujuan melindungi kesehatan masyarakat, mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan, menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Peserta PKMS adalah semua penduduk yang

berdomisili di Kota Surakarta yg memenuhi persyaratan : bukan peserta Jamkesmas, bukan peserta Askes PNS, bukan peserta askes sosial lainnya, mempunyai KK Surakarta, mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Surakarta, bertempat tinggal dan berdomisili di daerah selama 3 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Jenis kartu keanggotaan PKMS ada dua yaitu PKMS Gold dan Silver, perbedaan ini tentang besaran nilai proteksi.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya masyarakat miskin yang masuk SK Walikota tetapi tidak mendapatkan Jamkesmas berjumlah 6.989 jiwa;
- ❖ Keinginan Pemerintah Kota untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota Surakarta secara menyeluruh;
- ❖ Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah/Pemkot, DPRD dan seluruh jajarannya.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Tidak semua warga kota Surakarta memahami mekanisme PKMS;
- ❖ Masih adanya warga yang berusaha memanipulasi/merubah tahun berlakunya kartu;
- ❖ Adanya indikasi peningkatan jumlah kepindahan warga luar kota Surakarta ke dalam wilayah kota hanya untuk mendapatkan fasilitas PKMS;
- ❖ Banyak peserta PMKS tidak memperpanjang periode keikutsertaan, sehingga saat berobat ke rumah sakit mengalami hambatan;
- ❖ Pelayanan rujukan PKMS hanya terbatas pada wilayah kota Surakarta

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiasi dari Walikota Joko Widodo karena melihat adanya warga kota Surakarta yang belum tercakup program Jamkesmas;
- ❖ Membuat konsep dan perencanaan pelaksanaan PKMS;
- ❖ Memberikan informasi dan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat PKMS serta membuat SOP serta melakukan koordinasi dengan SKPD dan satuan kerja terkait;
- ❖ Dinas Kesehatan membentuk satuan petugas (satgas) untuk mengelola PKMS;
- ❖ Mempersiapkan sarana dan prasarana (pencetakan kartu dan database);
- ❖ Membentuk UPT PKMS ;
- ❖ Mendata ulang semua masyakat kota Surakarta yang belum tercakup program Jamkesmas;
- ❖ Diterbitkan kartu Gold dan Silver bagi penduduk yang mengikuti program PKMS;
- ❖ Sosialisasi penggunaan kartu Gold dan Silver;
- ❖ Implementasi dilakukan mengenai pemberian pelayanan kepada masyarakat

Manfaat :

- ❖ Masyarakat miskin yang belum tercakup program Jamkesmas menerima pelayanan kesehatan yang layak;
- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;
- ❖ Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat;
- ❖ Adanya partisipasi masyarakat dalam pendanaan layanan kesehatan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya landasan kebijakan yang jelas terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak tercakup program jaminan kesehatan dari pusat;
- ❖ Adanya data pendukung yang akurat berupa jumlah masyarakat yang tidak tercakup program jaminan kesehatan dari pusat;
- ❖ Adanya anggaran yang cukup;
- ❖ Komitmen antara kepala daerah, DPRD dan seluruh jajarannya;
- ❖ Adanya infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung program.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

PROGRAM MULTIGUNA JAMINAN KESEHATAN KOTA TANGERANG

Produk inovasi	: Jaminan Kesehatan
Jenis Inovasi	: Proses
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Penggagas	: Wahidin Halim (Walikota Tangerang)
Tahun inisiasi	: 2008
Tahun implementasi	: 2008
Kontak Person	: Drg. Televisianingsih - Kabid Pengembangan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Deskripsi :



Program Multiguna Jaminan Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan masyarakat yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas dan jaminan kesehatan lain, baik bagi PNS, Pegawai Swasta maupun warga masyarakat lainnya yang belum memiliki asuransi kesehatan. Program kesehatan ini diharapkan dapat menjaga agar masyarakat tetap sehat dan produktif serta melindungi pesertanya dari resiko pengeluaran kesehatan yang berdampak pada bencana keuangan dan mata rantai kemiskinan. Atas pertimbangan bahwa kepesertaan Jamkesmas memiliki masa berlaku, yaitu sejak ditetapkannya penggunaan kartu Jamkesmas oleh Kementerian Kesehatan hingga ditetapkannya penggunaan kartu baru yang berarti bahwa tidak semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan, karena

adanya kuota dari pemerintah pusat. Hal ini tentunya menimbulkan kesulitan bagi masyarakat karena harus mengurus surat keterangan tidak mampu dengan tahapan mulai dari RT, RW, Camat dan Puskesmas. Dengan program Jamkesmas yang hanya mencakup sebagian masyarakat dengan sejumlah persyaratan dan ketentuan inilah yang mendorong Walikota Tangerang untuk menginisiasi program Multiguna Jaminan Kesehatan. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas dan jaminan kesehatan lain, baik bagi PNS, Pegawai Swasta maupun warga masyarakat lainnya yang belum memiliki asuransi kesehatan. Program Multiguna ini mencakup pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Tujuan dari program Multiguna jaminan kesehatan ini adalah sebagai berikut: 1) mengurangi jumlah penduduk miskin; 2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi; 3) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan kesehatan; 4) Meningkatkan kualitas masyarakat miskin; 5) Meningkatkan pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin. Strategi yang dilakukan untuk berjalannya program kesehatan ini adalah dengan melakukan pendataan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dengan berkoordinasi dengan RT, RW dan Camat. Selain itu Puskesmas ikut digandeng agar dapat menerima pasien pemegang kartu multiguna jaminan kesehatan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya inisiasi dan Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah;
- ❖ Adanya Amanah Pasal 28 H dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- ❖ Tidak mencukupinya kuota bagi peserta Jamkesmas;
- ❖ Komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Adanya perbedaan kategori/indikator masyarakat miskin (versi, BPS, Bappenas dan lembaga lain) yang akan menimbulkan konflik terhadap sasaran miskin;
- ❖ Sering terjadinya salah sasaran penerima Kartu Multiguna;
- ❖ Mobilitas penduduk yang tidak tercatat dengan baik.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiasi dan Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah terkait jaminan kesehatan bagi warganya;
- ❖ Menyusun dan membuat kebijakan bagi terlaksananya program ini;
- ❖ Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- ❖ Dialog dengan stakeholder terkait untuk menjalin kerjasama;
- ❖ Evaluasi dan monitoring.

Manfaat :

- ❖ Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan meningkat karena terintegrasinya program kesehatan dengan program pembangunan lainnya.
- ❖ Program ini mampu memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya inisiasi dan Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawainya terkait jaminan kesehatan bagi warganya;
- ❖ Adanya kesamaan persepsi tentang hak terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan;
- ❖ Mempersiapkan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai untuk kelengkapan pendaftaran warga;
- ❖ Mempesiapkan anggaran untuk dialokasikan ke penjaminan kesehatan bagi masyarakat;
- ❖ Melakukan pendataan secara teliti tentang kependudukan terkait jaminan kesehatan;
- ❖ Melakukan kerjasama dengan RT, RW, Camat untuk pendataan warga;
- ❖ Melakukan kerjasama dengan penyedia fasilitas kesehatan.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Buku APEKSI Jilid 9)

PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Percepatan Penyelesaian Perijinan
Jenis Inovasi	: Proses
Penggagas	: Imam Sutopo (Walikota Surakarta tahun 1998) dan direvisi kembali oleh Joko Widodo (walikota Surakarta 2005)
Unit Pelaksana	: Badan Penanam Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
Tahun inisiasi	: 1998 Tahun implementasi : 2005
Kontak Person	: Badan Penanam Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Telp. (0271) 653693, 642020 Psw. 324, 325 Fax. (0271) 644308

Deskripsi :



Pelayanan perijinan satu pintu merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk memperbaiki sistem pelayanan perizinan di Surakarta dengan mengubah sistem pelayanan perizinan yang awalnya berbentuk satu atap menjadi satu pintu (One Stop Service-OSS) dan memberikan pelimpahan wewenang secara bertahap kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) (sekarang menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2005 mengenai pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada Koordinator UPT, kemudian Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota no. 13 tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Koordinator UPT untuk menambah jumlah perizinan yang bisa diterbitkan oleh UPT. Selanjutnya

meningkatkan bentuk lembaga dan wewenang UPT menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang didasari oleh Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta menggabungkan KPPT dengan Kantor Penanaman Modal (KPM) menjadi BPMPT yang didasari oleh Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tujuannya adalah untuk memberikan proses perijinan yang cepat, praktis dan efisien demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan perekonomian kota Surakarta yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa yang membutuhkan banyak investasi dari para pelaku usaha. Kondisi pelayanan publik saat itu terutama sistem pelayanan perizinan masih dianggap tidak efisien, berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, serta tidak adanya transparansi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon izin. Upaya perubahan ini menghasilkan sistem proses pelayanan perijinan yang lebih mudah, praktis dan dengan kepastian waktu dan biaya yang lebih transparan yang diiringi dengan peningkatan jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengurus ijin. Perubahan ini juga berdampak positif terhadap pendapatan daerah Surakarta.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya tuntutan pelayanan proses perijinan yang cepat, mudah, efisien, dan transparan;
- ❖ Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan penanaman modal;
- ❖ Adanya komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pelayanan perijinan dan penanaman modal.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Paradigma lama masyarakat untuk melakukan pembayaran kepada petugas biar cepat;
- ❖ Mental pegawai yang masih mempunyai pemikiran mencari uang tambahan dari pelayanan yang diberikan;
- ❖ SKPD teknis merasa tidak rela ijin diserahkan ke BPMPT.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Penguatan kelembagaan :
 - Tahun 1998 dengan nama UPT sesuai dengan SK Walikota tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu
 - Tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2005 tentang pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota kepada UPT
 - Tahun 2007 dikeluarkan Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2005 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada UPT untuk menambah jumlah perizinan yang bisa diterbitkan
 - Tahun 2008 (Perda No.6 Th 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta), meningkatkan bentuk lembaga dan wewenang UPT menjadi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT),
 - Tahun 2011 (Perda No 14 Th 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Th 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota), menggabungkan KPPT dengan Kantor Penanaman Modal (PKM) menjadi BPMPT
- ❖ Implementasi yang efektif dari kantor BPMPT :

- 1 Januari 2009 urusan perijinan ditingkatkan dari 9 urusan menjadi 20 urusan kemudian ditingkatkan lagi menjadi 48 urusan perijinan.
- 1 Januari 2012 BPMPT mulai berjalan, urusan perijinan yang ditangani menjadi 56 perijinan dan 2 non perijinan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Sehari ada lebih dari 200 pemohon kartu PKMS dan BPKAS, sehingga akhirnya dikelola oleh sekolah kemudian diserahkan ke Dinas dan akhirnya disetor ke BPMPT

Manfaat :

- ❖ Pengurusan perizinan dari waktu berbulan-bulan menjadi 4-6 hari;
- ❖ Praktis dalam proses pelayanan pemberian ijin;
- ❖ Gratis tanpa dipungut biaya, kecuali ada 5 hal perijinan yang masih membayar;
- ❖ Mengubah mindset masyarakat yang semula masih berpikiran paradigma lama (mengurus perijinan itu sulit dan membutuhkan biaya tambahan);
- ❖ Meningkatnya jumlah perijinan pada tahun 2005 sampai 2011 dari 7.000 surat yang diterbitkan menjadi 11.000 (naik 40%);
- ❖ Menarik investor untuk ke Kota Surakarta sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dalam hal investasi

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya Komitmin Pimpinan Daerah serta Pimpinan yang tegas dan jujur
- ❖ Mindset para penyelenggara yang sudah berubah (tidak lagi mempunyai pemikiran paradigma lama)
- ❖ Adanya dukungan Anggaran
- ❖ Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang kondusif
- ❖ Dukungan sistem informasi dan teknologi dalam proses perijinan dan penanaman modal
- ❖ Adanya pemberian insentif bagi petugas pelayanan

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

ONE DAY SERVICE LAYANAN PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Produk inovasi	: Sistem Pelayanan One Day Service terkait Pertanahan
Jenis Inovasi	: Proses
Unit Pelaksana	: Kantor Pertanahan
Penggagas	: Badan Pertanahan Nasional
Tahun inisiasi	: 2012
Kontak Person	: Badan Pertanahan Nasional
	Tahun implementasi : 2012

Deskripsi :



Pelayanan *One Day Service* merupakan layanan satu hari selesai dibidang pertanahan yang dilaksanakan pada Loket Pelayanan Kantor Pertanahan maupun mobil LARASITA. Layanan ini dilaksanakan untuk jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari (1-8 jam) yang dilaksanakan pada hari kerja. Program ini dilatar belakangi adanya penilaian masyarakat bahwa layanan pertanahan yang diberikan selama ini masih terlalu birokratis, tidak transparan, terlalu panjang dan dirasakan seringkali berbelit-belit. Dalam beberapa proses pengambilan keputusan layanan terkadang juga sangat birokratis terutama karena mekanisme yang terlalu hirarkis dengan peran sentral pada pimpinan tertinggi di kantor tertentu.

Tujuan dilaksanakannya *One Day Service* adalah untuk mempermudah pelayanan di bidang pertanahan, mempersingkat alur

birokrasi pelayanan di bidang pertanahan, mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan dibidang pertanahan serta mewujudkan komitmen BPN RI memberikan pelayanan yang cepat dan cermat. Dengan upaya ini diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan "biaya tinggi" dalam pengurusan layanan pertanahan. Beberapa layanan pertanahan dalam *One Day Service* antara lain : (1) Pengecekan Sertipikat; (2) Penghapusan Hak Tanggungan (Roya); (3) Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan; (4) Peningkatan Hak / Perubahan Hak; (5) Peralihan Hak; (6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); (7) Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko; (8) Pencatatan Sita; dan (9) Pencatatan Blokir.

Agar pelayanan *One Day Service* dapat berjalan dengan baik, maka telah dilakukan beberapa strategi antara lain dengan memanfaatkan ketersediaan data pertanahan, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen jajaran pimpinan di lingkungan BPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan;
- ❖ Keinginan untuk memperpendek birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan serta mengurangi biaya transportasi bagi warga masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan;
- ❖ Keinginan untuk mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan dibidang pertanahan;
- ❖ Adanya keinginan untuk mewujudkan komitmen BPN RI memberikan pelayanan yang cepat dan cermat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Luasnya wilayah, jarak dan geografis yang menjadi jangkauan pelayanan pertanahan;
- ❖ Perlunya upaya ekstra dalam sinkronisasi dan koordinasi dengan Kantor BPN diseluruh wilayah Indonesia;
- ❖ Rumitnya penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota;
- ❖ Banyaknya sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya;
- ❖ Terbatasnya SDM yang menguasai bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- ❖ Baru sebagian kecil Kantor BPN diseluruh Indonesia yang telah membangun database pertanahan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membangun komitmen jajaran pimpinan BPN Pusat dengan seluruh Kantor BPN di daerah;
- ❖ Membangun kerjasama dan pinjaman pembiayaan dari Pemerintah Spanyol terkait dengan program Land Office Computerization (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP);
- ❖ Pada tahun 2010, dimulai perombakan atas sistem, aplikasi dan basisdata;
- ❖ Mengadopsi Land Administration Domain Model (LADM, ISO-19152) sebagai struktur inti basisdata;
- ❖ Membangun komitmen di jajaran pimpinan daerah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan;
- ❖ Menyiapkan SDM pelayanan yang menguasai bidang IT.

Manfaat :

- ❖ Terpangkasnya peran para calo yang menyebabkan "biaya tinggi" dalam pengurusan layanan pertanahan;
- ❖ Terjadinya percepatan waktu pelayanan pengurusan administrasi pertanahan maksimal hanya 8 jam atau satu hari kerja;
- ❖ Berkurangnya beban transportasi yang harus ditanggung masyarakat;

- ❖ Terbangunnya database administrasi pertanahan;
- ❖ Terkoordinasinya database administrasi pertanahan dengan RT/RW daerah.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen jajaran pimpinan BPN Pusat dan Kantor BPN diseluruh daerah untuk memberikan pelayanan administrasi pertanahan yang berkualitas;
- ❖ Membangun sistem IT pelayanan administrasi pertanahan di setiap Kantor BPN seluruh Indonesia;
- ❖ Menyediakan SDM yang menguasai TI dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan;
- ❖ Menyediakan anggaran yang cukup;

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Pencarian data berdasarkan sumber dari internet

PELAYANAN KTP DI DESA/KELURAHAN KABUPATEN KUDUS

Produk inovasi	: Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)
Jenis Inovasi	: Proses
Penggagas	: Bupati kudus (H. Mustofa)
Unit Pelaksana	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Kudus
Tahun inisiasi	: 2008 Tahun implementasi : 2009
Kontak Person	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Kudus

Deskripsi :



Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem pemutakhiran data kependudukan sesuai dengan amanah UU No 23 Th 2006. SIAK bertujuan untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih mudah dan gratis. Ini disebabkan beberapa permasalahan antara lain keluhan masyarakat dalam proses pembuatan KTP yang harus menempuh jarak cukup jauh, terlalu lama (minimal 2 minggu), biaya yang tidak jelas, banyak masyarakat tidak memiliki KTP, dan database kependudukan tidak akurat. Pelaksanaan SIAK secara teknis diatur dalam Perda No 12/2008, Perda No 2/2009 dan Peraturan Bupati Kudus No 17/2009.

Upaya realisasi pelayanan SIAK dilakukan oleh Disdukcapil bersama Dinas Perhubungan dan Kominfo serta Kecamatan yang selama ini melaksanakan fungsi pelayanan KTP dan melakukan integrasi

pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan lancar. Pelayanan SIAK juga didukung oleh DPRD Kabupaten Kudus untuk segera memperbaiki sistem administrasi kependudukan yang terdapat di Kabupaten Kudus.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pimpinan dan jajaran (prasyarat mutlak);
- ❖ Penentuan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat ;
- ❖ Keberanian pimpinan untuk melakukan perubahan ;
- ❖ Pelibatan masyarakat Kesediaan staf untuk menerima perubahan;
- ❖ Adanya jaringan kerja dengan lembaga atau instansi lain.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Sulit mengubah pola pikir (mindset) dan kultur pelayanan;
- ❖ Persoalan teknis yang tidak bisa ditangani oleh operator di desa/ kelurahan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Perancangan :
 - Menuangkan gagasan kedalam RPJMD
 - Mengubah dan memodifikasi sistem kependudukan yang lama menjadi SIAK
 - Persiapan dari aspek sistem peralatan (hardware dan software)
 - Proses sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi aparat di desa/kelurahan
- ❖ Penerapan
 - Melakukan uji coba pada 25 february 2009
 - Persiapan sistem IT di desa/kelurahan (pembangunan tower, penambahan bandwidth)
 - Penyiapan manajemen dan kelembagaan desa/kelurahan
 - Sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat
- ❖ Pengembangan :
 - Pembuatan KTP akan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis identitas penduduk.
 - Proses pencetakan KTP hanya membutuhkan waktu 4-5 menit dan bisa langsung digunakan oleh masyarakat
 - Setiap bulan petugas di kelurahan akan mengirimkan data pemutakhiran kepada petugas di kecamatan dan Disdukcapil.

Manfaat :

- ❖ Pelayanan KTP di desa/kelurahan lebih mendekatkan jarak dengan warga;
- ❖ Proses pelayanan KTP hanya membutuhkan waktu 4-5 menit dengan jumlah rata-rata warga yang mengurus KTP sebanyak 5-10 orang di seluruh desa/kelurahan;
- ❖ Biaya gratis;

- ❖ Adanya pemutakhiran data kependudukan setiap bulan;
- ❖ Jumlah penduduk yang memiliki KTP mencapai 99%.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Tersedianya Provider Telekomunikasi;
- ❖ Tersedianya SDM yang menguasai teknis penggunaan IT .

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi

MEDIA CENTER KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Informasi dan Pengaduan Terintegrasi
Jenis Inovasi	: Proses
Penggagas	: Bambang DH (Walikota)
Unit Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Dinas Komunikasi dan Informasi

Deskripsi :



Media Center merupakan sistem pelayanan informasi terintegrasi bagi masyarakat Surabaya yang ingin berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan kota Surabaya. Bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam keluhan, pengaduan, kritik, saran, dan pertanyaan yang terkait proses pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. Dalam menyampaikankeluhan atau permohonan informasi, masyarakat bisa memilih akses yang dibuka Media Center melalui berbagai macam media, yaitu telepon, SMS, website, email, faksimile, facebook, twitter, dan portal. Kondisi sebelum adanya MEDIA CENTER : (1) Masyarakat datang langsung ke Dinas Kominfo; (2) Peningkatan Polusi; (2) Waktu tidak efisien; (3) Biaya tinggi; (4) Sistem manual.

Transparansi informasi sendiri merupakan salah satu indikator dari good governance. Selain itu, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) juga menjadi salah satu faktor yang membuat kepercayaan masyarakat yang melapor meningkat. Ada dua SOP yang diterapkan, yakni respons maksimal 1x60 menit untuk berintegrasi dengan tim Pelayanan Keluhan/ Pengaduan Masyarakat(TPKPM) di masing-masing SKPD dan juga respons maksimal 1x24 jam dalam memberikan jawaban kepada masyarakat yang melapor.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pimpinan daerah untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat kota Surabaya secara cepat;
- ❖ Komitmen pimpinan daerah untuk menerima dan menyelesaikan keluhan warga masyarakat Kota Surabaya secara cepat;
- ❖ Adanya kesadaran yang tinggi dari seluruh jajaran pimpinan Kota Surabaya untuk memberikan informasi dan menyelesaikan keluhan warga secara cepat dan tepat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Perlu waktu untuk mengubah mindset para pegawai untuk membangun dan menjalankan Media Center;
- ❖ Adanya resistensi penolakan pada beberapa SKPD;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ Adanya keterbatasan SDM untuk mengoperasikan aplikasi Media Center;
- ❖ Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Media Center.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Mengubah mindset bagi para pelaku birokrat dan masyarakat mengenai sistem pelayanan informasi terintegrasi;
- ❖ Membuat mapping dan database sistem pelayanan informasi terintegrasi disesuaikan dengan alur kerja manajemen informasi dan keluhan;
- ❖ Membuat alur kerja sistem pelayanan informasi terintegrasi beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem pelayanan informasi terintegrasi (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja manajemen kinerja;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem media center;
- ❖ Internalisasi media center kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem media center.

Manfaat :

- ❖ Kemudahan akses penyampaian keluhan/infomasi;
- ❖ Efisiensi waktu penyampaian keluhan informasi;
- ❖ Biaya penyampaian keluhan informasi bisa efisien;
- ❖ Penyampaian keluhan informasi melalui sistem digital sehingga lebih cepat;
- ❖ Terbangunnya Cyber Society di ruang lingkup kota Surabaya.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem pelayanan informasi terintegrasi;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem pelayanan informasi terintegrasi secara online;
- ❖ Membangun sistem pelayanan informasi terintegrasi sesuai dengan alur kerja (SOP);
- ❖ Menyusun SOP penyusunan sistem pelayanan informasi terintegrasi secara online;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya



KELOMPOK INOVASI METODE

Inovasi yang ditujukan dalam sebuah penerapan strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ruang lingkup dari inovasi metode adalah strategi, cara, dan teknik baru.

LAYANAN JEMPUT BOLA “LARASITA” BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Produk inovasi	: Pelayanan Pertanahan Jemput Bola
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Kantor Pertanahan
Penggagas	: Badan Pertanahan Nasional RI
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Badan Pertanahan Nasional RI

Deskripsi :



Layanan Jemput Bola “LARASITA” merupakan layanan pertanahan bergerak (*mobile land service*) yang bersifat pro aktif dengan "hadirnya" petugas BPN RI ke tengah-tengah masyarakat. Secara praktis, kegiatan yang dilaksanakan oleh LARASITA sudah menegaskan perbedaannya dengan loket Kantor Pertanahan. Kemampuannya menyentuh dimensi sosial dari pengelolaan pertanahan pada prosesnya akan memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan pertanahan, dimana seringkali tugas-tugas tersebut tidak mampu dijangkau oleh interface Loket Kantor Pertanahan karena formalitasnya. Dengan kemampuannya itu pula, LARASITA diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat pemangku kepentingan pertanahan, yaitu masyarakat yang mempergunakan tanah sebagai basis sumberdaya untuk penghidupannya. Kelahiran LARASITA sebagai

layanan jemput bola didasarkan adanya keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan.

Tujuan layanan jemput Bola LARASITA ini adalah agar BPN RI dapat menyentuh langsung masyarakat tidak hanya dengan regulasi, tetapi benar-benar bersentuhan secara fisik untuk kemudian secara psikis bisa mengerti tentang apa yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat. Agar program Layanan Jemput bola “ LARASITA” dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka strategi yang diterapkan adalah bahwa kedatangan LARASITA ke desa-desa biasanya di area dimana warga desa sering berkumpul. Sehingga kunjungan-kunjungan LARASITA, akan mudah didapati perbincangan akrab antara petugas dan masyarakat. Fakta bahwa masyarakat sedang berada di lingkungan desanya sendiri, berpengaruh besar terhadap sehatnya komunikasi, dimana ketika pertemuan dilakukan di Kantor Pertanahan, terlihat bahwa komunikasi yang terbangun seolah-olah vertikal, dengan menempatkan petugas di sisi atas. Dalam komunikasi yang sehat tersebut, informasi-informasi pertanahan baik dari petugas maupun dari masyarakat akan mengalir lancar. Dengan kondisi komunikasi yang kondusif, akan mudah bagi petugas untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang reformasi agraria untuk proses penyiapan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen jajaran pimpinan BPN RI untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan cara mendatangi langsung masyarakat di desa-desa;
- ❖ Keinginan untuk memperpendek birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan serta mengurangi biaya transportasi bagi warga miskin;
- ❖ Adanya keinginan untuk mempermudah bagi petugas untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang reformasi agraria untuk proses penyiapan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Luasnya wilayah, jarak dan geografis yang menjadi jangkauan pelayanan pertanahan;
- ❖ Perlunya upaya ekstra dalam sinkronisasi dan koordinasi dengan Kantor BPN diseluruh wilayah Indonesia;
- ❖ Rumitnya penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota;
- ❖ Banyaknya sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya;
- ❖ Terbatasnya SDM yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- ❖ Baru sebagian kecil Kantor BPN diseluruh Indonesia yang telah membangun database pertanahan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membangun komitmen jajaran pimpinan BPN Pusat dengan seluruh Kantor BPN di daerah;
- ❖ Membangun kerjasama dan pinjaman pembiayaan dari Pemerintah Spanyol terkait dengan program Land Office Computerization (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP);

- ❖ Pada tahun 2010, dimulai perombakan atas sistem, aplikasi dan basisdata;
- ❖ Mengadopsi Land Administration Domain Model (LADM, ISO-19152) sebagai struktur inti basis data;
- ❖ Membangun komitmen di jajaran pimpinan daerah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan;
- ❖ Menyiapkan SDM pelayanan yang menguasai bidang IT.

Manfaat :

- ❖ Bagi masyarakat, pelaksanaan Larasita yang telah berjalan mewujudkan kemudahan akses untuk memperoleh informasi;
- ❖ Mempermudah pengurusan sertifikat, penyelesaian masalah/sengketa pertanahan karena Kantor Pertanahan Bergerak berada di dekat mereka;
- ❖ Biaya akses ke Kantor Pertanahan semakin kecil bahkan tidak diperlukan; pengurusan sertifikasi tanah menjadi lebih murah karena tidak perlu membayar jasa calo/perantara;
- ❖ Pengurusan sertifikasi tanah menjadi lebih mudah karena tidak perlu beberapa kali datang ke Kantor Pertanahan.
- ❖ Terjadinya transformasi budaya pelayanan dan budaya kerja dari manual ke komputerisasi;
- ❖ Terjadinya peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- ❖ Adanya peningkatan transparansi pelayanan dan terbangunnya database pertanahan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya kimitmen jajaran pimpinan BPN Pusat dan Kantor BPN diseluruh daerah untuk memberikan pelayanan administrasi pertanahan yang berkualitas yang langsung turun kemasyarakat di desa-desa;
- ❖ Membangun sistem IT pelayanan administrasi pertanahan di setiap Kantor BPN seluruh Indonesia;
- ❖ Menyediakan SDM yang menguasai TI dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan;
- ❖ Menyediakan anggaran yang cukup;

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Browsing dari berbagai sumber di internet

NATIONAL TRAFFIC MANAGEMENT CENTER (NTMC) **POLDA METRO JAYA**

Produk inovasi	: Layanan Informasi Lalu Lintas Jalan
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Ditlantas Polda Metro Jaya
Penggagas	: Polda Metro Jaya
Tahun inisiasi	: 2010
Tahun implementasi	: 2010
Kontak Person	: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Deskripsi :



National Traffic Management Center (NTMC) merupakan pengembangan program dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya terkait penyediaan jaringan informasi lalu lintas kepada masyarakat. Lahirnya NTMS dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kecelakaan di jalan raya dan masih minimnya informasi kepada masyarakat terkait lalu lintas di jalan raya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Polri. Angka kecelakaan jalan raya di Indonesia pada tahun 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan, dengan korban meninggal 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi Rp. 203 trilyun-Rp.217 Trilyun per tahun. Tujuan utama pembentukan NTMC tersebut adalah untuk melakukan Pengendalian, koordinasi, komunikasi dan informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga terjadi

interaksi antara Polri dan masyarakat terkait jalan raya (informasi lalu lintas jalan tak berjarak). Dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bab XVI Pasal 245 tentang pembentukan Pusat Pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pusdalsisinfokom LLAJ) yang mengamanatkan bahwa Polri menjadi leader dalam pengendalian lalu lintas jalan raya. Kemudian strategi Polri dalam melaksanakan NTMC tersebut dengan memanfaatkan jaringan informasi (televisi, radio, website, facebook, twitter, call center 500-669, sms center 9119, cctv, GPS, Bisnis intelegen, aplikasi komputer tentang kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas), memasang CCTV disejumlah ruas jalan (sekarang sudah terpasang 233 CCTV), kerjasama dengan media masa (termasuk petugas yang menjadi presenter di televisi), serta melibatkan 5 pilar angkutan jalan (Kementerian perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian RI (Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek))

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya pembiayaan dari PNBPN untuk menyediakan fasilitas program NTMC;
- ❖ Dukungan dari SDM;
- ❖ Kerjasama dengan instansi terkait yang disebut dengan 5 pilar angkutan jalan.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ IRSMS (*Integrated Road Safety Management System*) belum terkoneksi dengan empat pilar lalu lintas lainnya yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Kementerian Perindustrian sehingga belum memungkinkan terjadinya pertukaran data informasi terkait lalu lintas;
- ❖ Belum jelasnya struktur organisasi NTMC.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan Polri sehingga dikeluarkannya Kebijakan pelaksanaan NTMC;
- ❖ Mempersiapkan sarana dan prasarana antara lain aplikasi pengendalian lalu lintas, CCTV;
- ❖ Mempersiapkan SDM yang profesional;
- ❖ Melakukan kerjasama dengan 4 pilar lainnya;
- ❖ Implementasi sistem NTMC;
- ❖ Monitoring dan Evaluasi.

Manfaat :

Masyarakat mendapatkan informasi tentang lalu lintas

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pimpinan terhadap program pengendalian lalulintas;
- ❖ Menyiapkan anggaran yang memadai untuk sarana dan prasarana;
- ❖ Menyiapkan SDM terkait pengoperasian sistem aplikasi dan penyampaian informasi ke masyarakat
- ❖ Adanya kejelasan unit kerja khusus yang menangani program tersebut.

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: Kumpulan Inovasi Pelayanan Publik Jilid 2

PELAYANAN SERTIFIKASI TANAH DI DESA-DESA DENGAN CARA JEMPUT BOLA KABUPATEN KARANGANYAR

Produk inovasi	: LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah)
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Bupati Karanganyar ;Dr. H. Rina Iriani, M.Hum; dan Kepala kantor BPN Kab. Karanganyar ; H.M. Rukyot.
Unit Pelaksana	: Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun inisiasi	: 2006 Tahun implementasi : 2006
Kontak Person	: Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Karanganyar

Deskripsi



LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) dengan fasilitas kantor mini yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat. Kantor mini tersebut memberikan layanan di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggungjawabkan. LARASITA bertujuan untuk pemenuhan keinginan rasa keadilan pelayanan administrasi pertanahan, juga untuk melakukan penyiapan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria, mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam konteks pertanahan, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah, memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan,

menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.

Program LARASITA ini dilatarbelakangi adanya pengaduan masyarakat atas buruknya pelayanan sertifikasi tanah seperti biaya mahal, waktu yang tidak pasti dan prosedur yang berbelit-belit. Selain itu dengan kondisi geografis, desa-desa umumnya jauh dari pusat kota Karanganyar yang menyebabkan masyarakat desa sulit mengakses layanan. Untuk mendukung Program LARASITA dilakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi pertanahan dan program-program pertanahan lainnya, menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, melaksanakan kegiatan legalisasi aset dan melaksanakan tugas-tugas pertanahan lain.

Faktor Pendorong inovasi

- ❖ Adanya komitmen pimpinan BPN untuk pemenuhan rasa keadilan dalam mengurus layanan sertifikasi pertanahan;
- ❖ Adanya keinginan masyarakat akan layanan sertifikasi pertanahan yang cepat, mudah dan praktis;
- ❖ Tingginya pengaduan terkait dengan layanan sertifikasi pertanahan;
- ❖ Adanya dukungan pemda dalam pelaksanaan program LARASITA oleh BPN.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Terbatasnya dana dari Kantor BPN untuk pengadaan mobil kantor mini beserta perlengkapannya;
- ❖ Kendala teknologi dimana jaringan internet yang memungkinkan adalah internet berbasis gelombang radio sehingga membatasi daya jangkau mobil/kantor ini;
- ❖ Kondisi geografis desa-desa yang jauh dari pusat perkotaan;
- ❖ Minimnya sarana transportasi umum yang cukup nyaman bagi seseorang untuk bepergian dengan membawa dokumen-dokumen penting tentang kepemilikan tanahnya.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Inisiasi dari pimpinan BPN Karanganyar untuk menggagas program layanan jemput bola sebagai pengembangan pelayanan komputerisasi pertanahan di loket;
- ❖ Penetapan kebijakan dan penyiapan sistem kerja LARASITA melalui SK Bupati
- ❖ Kantor BPN menyiapkan SOP LARASITA;
- ❖ Penyiapan SDM dan fasilitas pelaksanaan LARASITA melalui pelatihan sistem kerja, sistem aplikasi LARASITA dan jaringan bergerak yang dipergunakan di mobil mini;
- ❖ Pendanaan sarana dan prasarana;
- ❖ Uji coba pada tanggal 10 Juni 2006
- ❖ Sosialisasi program LARASITA;
- ❖ Implementasi pada tanggal 19 Desember 2006

Manfaat :

- ❖ Masyarakat lebih mudah mengakses layanan pertanahan yang selama ini hanya bisa dilakukan di kantor BPN;
- ❖ Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen pertanahan. Masyarakat dapat mendatangi mobil pelayanan;
- ❖ Melakukan pendataan tanah-tanah terlantar;
- ❖ Menghilangkan praktik percaloan dalam pelayanan pertanahan;
- ❖ Memberikan kepastian pelayanan yang bertanggung jawab;

- ❖ Meningkatkan jumlah tanah bersertifikat;
- ❖ Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- ❖ Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Memiliki SDM yang berkomitmen;
- ❖ Pangkalan data (database) yang kuat;
- ❖ Jaringan interkoneksi yang memadai.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah, KemenPAN-RB, 2013

PROGRAM KAMPO WARAKA KABUPATEN BUTON UTARA

Produk inovasi	: Metode Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
Penggagas	: Bupati Buton Utara
Tahun inisiasi	: 2011
Tahun implementasi	: 2011
Kontak Person	: Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara

Deskripsi :



Kampo Waraka merupakan upaya yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan bidang kesehatan sekaligus mendukung pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah berbasis web mutakhir.

Upaya ini diterapkan akibat adanya banyak temuan data tentang gizi buruk, kekurangan gizi, lumpuh layu, kaki gajah dan kematian ibu bersalin. Selain itu, kurangnya fasilitas kesehatan yang terdapat di daerah tersebut karena pembangunan fasilitas kesehatan tersebut belum selesai. Pelaksanaan Kampo Waraka dilaksanakan melalui penerapan upaya antara lain 1) mengembangkan kemitraan bidan, dukun dan kader posyandu 2) mengembangkan insentif bagi ibu hamil resiko tinggi dari

keluarga miskin 3) mendorong akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya dukungan dari Bupati dan para stakeholder dalam pelaksanaan gerakan Kampo Waraka;
- ❖ Adanya budaya kekeluargaan dan gotong royong.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Adanya data yang terbatas, tidak lengkap dan kurang valid terkait kesehatan ibu dan anak;
- ❖ Kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan;
- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya ide dari Bupati Buton Utara;
- ❖ Melakukan kajian perencanaan kesehatan ibu dan anak;
- ❖ Mendorong keterlibatan para pihak di tingkat kabupaten dalam mengelola Kampo Waraka;
- ❖ Melaksanakan survei kesehatan partisipatif;
- ❖ Meningkatkan kapasitas perencanaan dalam penyusunan anggaran daerah;
- ❖ Meningkatkan Kapasitas kader kesehatan;
- ❖ Pemberian insentif finansial bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu;
- ❖ Menyusun kebijakan daerah untuk pelaksanaan Kampo Waraka;
- ❖ Mengimplementasikan gerakan Kampo Waraka.

Manfaat :

- ❖ Tersedianya data yang diperoleh langsung dari masyarakat;
- ❖ Mempercepat pemrosesan laporan dan informasi yang cepat kepada puskesmas dan dinas kesehatan sehingga dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan;
- ❖ Peningkatan capaian SPM dan MDGs kabupaten Buton Utara di bidang kesehatan;
- ❖ Terbentuknya kemitraan bidan, dukun, dan kader dalam membantu gerakan Kampo Waraka;
- ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen bersama antara pemimpin daerah dengan para stakeholder;
- ❖ Tersedianya dana yang memadai untuk pelaksanaan program.

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: BASICS Praktik Cerdas

PROGRAM SANGIHE MENGAJAR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Produk inovasi	: Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepulauan Sangihe dan <i>Better Approach Services Increasing Through Capacity (BASICS)</i> in Sulawesi
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe (BASICS) dari Kanada
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Sangihe Telp/ Fax.: (0432) 21701; (0432) 21701, Email: dinas@dikpora-sangihe.com; http://www.dikpora-sangihe.com

Deskripsi :



Program Sangihe Mengajar (PSM) merupakan salah satu kebijakan yang digagas Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengatasi kekurangan guru, khususnya di daerah terpencil dan pulau-pulau dengan mengoptimalkan sumber daya guru yang ada disuatu tempat untuk ditempatkan pada daerah yang kurang dan membutuhkan. Program ini mengoptimalkan ketersediaan guru di provinsi Sulawesi utara melalui dukungan stimulan BASICS dan APBD. Program ini dilatarbelakangi adanya kekurangan 34 orang guru SD dan 11 orang guru SMP khususnya di pulau-pulau dan desa terpencil. SD dan SMP di daerah ini rata-rata hanya memiliki 2 sampai 3 orang guru dan belum memenuhi SPM.

Tujuan utama program ini adalah untuk pemenuhan tenaga guru dan menyediakan lapangan kerja bagi lulusan-lulusan Perguruan Tinggi yang memiliki akta mengajar. Program ini dilaksanakan dengan menggandeng sponsor dari BASICS-CIDA, akan tetapi jika hasilnya memberi dampak positif dalam pengembangan kualitas pendidikan maka di tahun-tahun berikutnya akan di danai oleh APBD Kabupaten Sangihe. Guru-guru yang direkrut adalah orang-orang lokal, putra-putri Sangihe yang mempunyai gelar sarjana pendidikan dan mereka nantinya akan dipromosikan untuk menjadi guru tetap di tempat mereka ditugaskan.

Program Sangihe Mengajar yang diluncurkan pada 5 September 2012 telah menempatkan 16 orang guru di 16 SD dan SLTP di desa terpencil dan pulau-pulau dengan jumlah guru yang terbatas. Program yang awalnya didukung sepenuhnya oleh Project BASICS ini kemudian mendapatkan respon positif dari Pemerintah Daerah dan DPRD yang menyediakan dana sebesar 270 juta rupiah untuk tahun 2013 dan mendapatkan tambahan 10 orang guru baru.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen pemerintah daerah kabupaten kepulauan Sangihe dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- ❖ Adanya kesadaran masyarakat dan SDM sarjana yang bersedia untuk menjadi pengajar di daerah terpencil;
- ❖ Tekad Dinas pendidikan kabupaten kepulauan Sangihe dalam mencapai SPM pendidikan;
- ❖ Tingginya antusiasme orang tua dan anak untuk ke sekolah;
- ❖ Dukungan dari stakeholder (BASICS).

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Terbatasnya ketersediaan guru yang bersedia ditempatkan di desa-desa terpencil dan pulau-pulau seperti dapat terlihat bahwa dari 34 SD dan 11 SLTP yang kekurangan guru. Sekolah-sekolah tersebut rata-rata hanya memiliki 2-3 orang guru;
- ❖ Belum banyaknya guru yang bersedia menjadi relawan untuk mengajar di daerah terpencil;
- ❖ Semangat belajar anak-anak tinggi tidak sejalan dengan jumlah guru yang ada;
- ❖ SPM pendidikan dasar yang mensyaratkan kesediaan guru untuk setiap rumpun mata pelajaran di daerah tersebut.

Tahapan Proses Inovasi :

- | | |
|---|--|
| ❖ Pendataan pendidikan; | ❖ Penetapan wilayah tugas dan penempatan; |
| ❖ Pertemuan multi pihak; | ❖ Penyusunan kesepakatan bersama para pihak; |
| ❖ Pembentukan tim pengelola program Sangihe mengajar; | ❖ Peluncuran program Sangihe mengajar; |
| ❖ Proses sosialisasi dan seleksi; | ❖ Monitoring dan pembinaan; |
| ❖ Orientasi dan pelatihan bagi calon guru; | ❖ Penyusunan kebijakan daerah. |

Manfaat :

- ❖ Adanya mekanisme alternatif untuk mengatasi kekurangan guru di pulau-pulau dan desa terpencil;
- ❖ Alokasi anggaran pendidikan di APBD untuk mengatasi keterbatasan guru di pulau-pulau dan desa-desa terpencil;
- ❖ Kontribusi bagi beberapa indikator SPM pendidikan dasar dalam hal jumlah guru mengajar;
- ❖ Kontribusi bagi target MDGs, khususnya terkait dengan partisipasi anak untuk sekolah;
- ❖ Peningkatan semangat belajar anak usia sekolah di pulau-pulau dan desa terpencil.

- ❖ Mendorong peningkatan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi 86% di akhir tahun 2012 yang tahun sebelumnya 26%
- ❖ Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari 82,74% tahun 2011 menjadi 91,98% tahun 2012.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ Memberikan alokasi anggaran untuk ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk belajar mengajar;
- ❖ Melibatkan orang-orang lokal, putra-putri daerah yang mempunyai gelar sarjana pendidikan dan mereka nantinya akan dipromosikan untuk menjadi guru tetap di tempat mereka ditugaskan;
- ❖ Menjalin kerjasama dengan lembaga donor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mendukung program ini sekaligus memberikan masukan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan keberlanjutan program yang sangat bermanfaat ini.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku BASICS Responsive Initiative (BRI)

KAMPOENG KB KOTA BANJAR KOTA BANJAR

Produk inovasi	: Promosi keluarga berencana dan sosialisasi pentingnya KB dengan prioritas sterilisasi pada lelaki dan perempuan dalam satu keluarga
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Walikota Banjar 2010
Unit Pelaksana	: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)
Tahun inisiasi	: 2010 Tahun implementasi : 2010
Kontak Person	: BPPKB Kota Banjar, 0817183725/ 082110362400

Deskripsi :



Program Kampong KB pada dasarnya adalah memberikan kemudahan atau akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan KB, KS dan PP menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dan sejahtera yang secara operasional dikelola, diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Tingginya angka kematian bayi pada saat persalinan, dan kurangnya kesadaran ibu hamil akan pentingnya persalinan dengan dibantu tenaga medis/bidan, membuat perlu dilakukan upaya percepatan pembangunan keluarga melalui kampanye KB.

Tujuannya adalah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan KB masyarakat khususnya di pedesaan dengan sasaran masyarakat menengah ke bawah. Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka Pemerintah Kota Banjar membentuk pelayanan KB berbasis kampung di tiap desa dan kelurahan serta memberikan informasi dan merubah pola pikir masyarakat tentang arti pentingnya Program KB.

Kampong KB menjadi salah satu promosi keluarga berencana dimana masyarakat aktif mensosialisasikan pentingnya KB dengan prioritas sterilisasi pada lelaki dan perempuan dalam satu keluarga. Dalam Kampong KB juga dilakukan beragam pelatihan dan pendampingan bagi remaja dan masyarakat lanjut usia.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Inisiatif dari pemerintah kota Banjar untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah paradigma tentang KB;
- ❖ Adanya kerjasama dari pihak lain (Pemerintah Desa/Kelurahan, PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Masyarakat) untuk mengelola program KB ;
- ❖ Tersedianya dana yang memadai;
- ❖ Kejelasan proses dan mekanisme Kampong KB;
- ❖ Adanya dukungan jumlah dan kualitas SDM (petugas lapangan) yang memadai;
- ❖ Kejelasan dan ketersediaan dana.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam mengelola program KB;
- ❖ Kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya program KB;
- ❖ Perbedaan kultur masyarakat mengenai program KB.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Inisiasi dari BPPKB untuk membentuk program KB berbasis kampung;
- ❖ Penentuan kriteria Kampong KB;
- ❖ Penentuan jenis kegiatan yang dilaksanakan pada pelayanan KB berbasis kampung;
- ❖ Menentukan mekanisme pembentukan Kampong KB;
- ❖ Penyelenggaraan Kampong KB yang diselarsakan dengan tujuan, sarana, waktu dan dana;
- ❖ Penyediaan SDM (petugas lapangan) dengan metode institusi;
- ❖ Sosialisasi menggunakan media yang dilakukan melalui pendekatan personal dan lokal;
- ❖ Kemitraan dan koordinasi dengan lintas sektoral (dinas pertanian dan dinas kesehatan);
- ❖ Pembentukan Bale Sawala di setiap kampung yang berfungsi sebagai klinik dan markas kegiatan pendataan dan pelaporan Kampong KB bahkan dapat dimanfaatkan untuk Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam pembinaan, pelatihan dan pengajian, dan lain-lain;

Manfaat :

- ❖ Naiknya jumlah peserta KB aktif dari tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 sebanyak 7,33 persen;
- ❖ Naiknya angka IPM Kota Banjar Tahun 2009 sebesar 74,25 dan meningkat 0,42 poin pada Tahun 2010 sebesar 74,67;
- ❖ Terintegrasinya Kampong KB dengan BKB PAUD, BKR, BKL, KB/KS, UPPKS dan Posyandu memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa dengan memiliki merencanakan jumlah anak dengan baik berbanding lurus dengan perencanaan
- ❖ Masa depan yang sejahtera;

- ❖ Terciptanya usaha yang dijalankan oleh remaja dan ibu-ibu sesuai dengan karakteristik daerahnya.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk mensukseskan program KB;
- ❖ Adanya dukungan kebijakan berupa SK Bupati/Walikota;
- ❖ Adanya koordinasi dan kolaborasi para stakeholder dalam mengelola dan mengimplementasikan program Kampoeng KB;
- ❖ Adanya dukungan fasilitas program Kampoeng KB di setiap kampung;
- ❖ Perlunya sosialisasi melalui pendekatan personal dan lokal;
- ❖ Adanya kejelasan dukungan dana dan SDM.

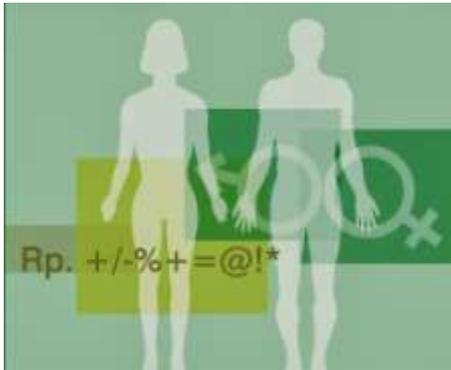
Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi Jilid 8

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG PENDIDIKAN KOTA BAUBAU

Produk inovasi	: Analisis Perencanaan dan Penganggaran
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Badan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Baubau
Penggagas	: Walikota Baubau
Tahun inisiasi	: 2010
Tahun implementasi	: 2010
Kontak Person	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Baubau – Jl. Sultan Hasanudin 58

Deskripsi :



Penganggaran responsif gender merupakan serangkaian aktivitas untuk analisis gender dan mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Latar belakang penganggaran ini adalah akibat adanya ketimpangan gender yang bersekolah. Anak laki-laki di kota Baubau memilih tidak bersekolah karena membantu perekonomian keluarga sehingga banyak anak yang bersekolah terdiri dari anak perempuan.

Analisis penganggaran ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan gender yang akan dijadikan bahan perencanaan dan penganggaran pemerintah setempat. Analisis gender terbagi dalam dua hal yaitu masalah putus sekolah akibat metode pengajaran yang kurang menarik dan daya pikat anak laki-laki untuk bersekolah karena membantu perekonomian keluarga. Pemerintah Kota Baubau membentuk pokja

gender yang dikoordinasi oleh Bappeda kota Baubau. Proses analisis gender ini akan berkontribusi dalam perencanaan dan penganggaran kota Baubau.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya inisiatif dari pimpinan daerah untuk mendorong proses perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- ❖ Adanya dukungan dana dari APBD kota Baubau mencapai 606 juta rupiah.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masih banyaknya jumlah anak putus sekolah;
- ❖ Masalah metode pengajaran tenaga pendidik yang kurang menarik;
- ❖ Banyak anak laki-laki yang kurang tertarik bersekolah karena memilih membantu perekonomian keluarga.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya ide dari Walikota Baubau untuk mengatasi masalah ketimpangan gender dalam pendidikan;
- ❖ Melakukan analisis gender ke dalam dua tahap;
- ❖ Membentuk pokja gender yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Baubau;
- ❖ Melakukan perbaikan data terpilah terkait pendidikan dan identifikasi ketimpangan gender;
- ❖ Memuat identifikasi ketimpangan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran Kota Baubau;
- ❖ Mengalokasikan dana 606 juta rupiah untuk peningkatan kapasitas guru.

Manfaat :

- ❖ Termuatnya analisis gender di bidang pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Baubau;
- ❖ Tersedianya dana untuk mendukung analisis responsif gender.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari kepala daerah untuk melakukan identifikasi ketimpangan gender;
- ❖ Adanya alokasi dana untuk mengatasi ketimpangan gender.

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: Basics Praktik Cerdas

PEMANFAATAN LIMBAH MINYAK JELANTAH MENJADI BIODIESEL KOTA BOGOR

Produk inovasi	: Metode Penghimbauan untuk Memanfaatkan Minyak Jelantah
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor
Penggagas	: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor
Tahun inisiasi	: 2007
Tahun implementasi	: 2007
Kontak Person	: Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor, Jl. Senam No.1 Tanah Sereal, Kota Bogor. Telp. 0251-8340057 Fax. 0251-8340057

Deskripsi :



Limbah minyak jelantah adalah sisa dari minyak goreng (CPO) yang telah dipakai lebih dari 3 kali. Pemanfaatan minyak jelantah ini dilatar belakangi adanya krisis minyak bumi dunia, sehingga salah satu alternatif yang masih mungkin dikembangkan adalah biodiesel. Selain itu adanya kampanye kesehatan pengurangan penggunaan minyak jelantah, dilakukannya program yang berkontribusi pada perbaikan lingkungan.

Tujuan inovasi pemanfaatan limbah minyak jelantah adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya mengkonsumsi minyak jelantah, sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat; dan menurunkan tingkat pencemaran air dan tanah akibat pembuangan minyak jelantah serta mengurangi polusi udara dengan menggunakan bahan bakar biodiesel yang berasal dari limbah minyak jelantah. Strategi

utama yang dilaksanakan adalah melakukan inventarisasi potensi minyak jelantah di kota Bogor; melakukan sosialisasi kepada aparat, masyarakat secara umum, dan pengusaha kuliner di kota Bogor tentang bahaya minyak jelantah dan polusi udara di kota Bogor; membuat *pilot project* pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel dan memanfaatkan biodiesel yang dihasilkan sebagai campuran bahan bakar Bus Trans Pakuan.

Faktor Pendorong inovasi :

Adanya krisis minyak bumi sehingga salah satu alternatif yang masih dimungkinkan untuk dikembangkan adalah Biodiesel yang berdampak mengurangi efek pemanasan global karena memiliki emisi CO₂ yang rendah.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Kurangnya koordinasi pada tahap pengumpulan jelantah;
- ❖ Masih menggantungkan anggaran dari pemerintah kota;
- ❖ Belum terpenuhi syarat angkut dari kendaraan operasional.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Menyusun program dan capaian program;
- ❖ Menyediakan anggaran;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan kerjasama dengan stakeholders untuk mendukung program pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel.

Manfaat :

- ❖ Menjadi bahan bakar alternatif ;
- ❖ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya minyak jelantah bagi kesehatan;
- ❖ Meningkatnya kesadaran masyarakat atas nilai ekonomis minyak jelantah untuk didaur ulang;
- ❖ Minyak jelantah bisa memfasilitasi Bus Trans Pakuan;
- ❖ Penggunaan biodiesel B20 mampu menurunkan kadar CO gas buang;
- ❖ Pencemaran air dan tanah dapat dikendalikan;
- ❖ Pengurangan polusi udara ;
- ❖ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi konsumsi minyak jelantah.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen serius untuk meningkatkan kualitas lingkungan atau udara secara khusus dengan pengurangan emisi;
- ❖ Perlunya kajian tentang kebutuhan pasokan minyak jelantah yang ada di wilayahnya serta potensi lainnya untuk dimanfaatkan;
- ❖ Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengumpulan minyak jelantah;
- ❖ Dilakukan kemitraan dengan pihak swasta dalam proses pengolahan minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel.

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: Kumpulan Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Buku APEKSI Jilid 9)

INDUSTRI KREATIF KOTA CIMAH KOTA CIMAH

Produk inovasi	: Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis kluster industri
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Walikota Cimahi Dr. Ir. H.M. Itoch Tohija, M.M
Unit Pelaksana	: Kantor Penanaman Modal Kota Cimahi
Tahun inisiasi	: 2001
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Kepala Kantor Penanaman Modal Kota Cimahi 08139455559

Deskripsi :



Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) kota Cimahi merupakan usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada kota Cimahi, mengingat kota Cimahi menghadapi kondisi kurang memadainya sumber daya alam dan air, perlambatan kontribusi sektor industri manufaktur, serta peningkatan kontribusi sektor jasa dan perdagangan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Cimahi untuk mengembangkan model ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan bersifat lebih ramah lingkungan (non polutan), yaitu ekonomi atau industri kreatif.

Tujuan dari PEL berbasis kluster industri ini adalah: 1) terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif; 2) terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis; 3) terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal; terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan; 4) terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB; 5) terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan; 6) terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah; 7) terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Untuk mendukung program ini maka pemerintah Kota Cimahi dengan melibatkan Bappeda, Kantor Penanaman Modal, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian (Diskopindagtan), Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Pengolahan Data Elektronik (KAPPDE), Bagian Humas dan Protokol Setda, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan universitas lainnya, serta Cimahi Creative Association (CCA), bersama-sama mengembangkan 3 kluster industri (makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, kerajinan) sebagai kebijakan bottom-up dan kluster industri telematika sebagai kebijakan top-down untuk mendukung 3 kluster industri.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen dari Walikota Cimahi saat itu yakni Dr. Ir. H.M. Itoch Tohija, M.M;
- ❖ Adanya SMK berbasis teknologi dan industri kreatif;
- ❖ Aksesibilitas kota Cimahi yang strategis;
- ❖ Adanya perguruan tinggi dalam kota dan sekitar Kota Cimahi dengan akses yang dekat;
- ❖ Kerjasama yang baik antar instansi terkait serta masyarakat;
- ❖ Pangsa pasar yang cukup besar di dalam maupun di luar negeri.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Lemahnya monitoring dan evaluasi Cimahi Creative Association (CCA);
- ❖ Besarnya modal yang harus dimiliki oleh para pelaku industri kreatif;
- ❖ Lamanya waktu yang dibutuhkan agar bisa bersaing di bisnis IT dan animasi;
- ❖ Rendahnya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari pihak lain, terutama lembaga-lembaga perbankan;
- ❖ Belum terbangunnya komunitas pelaku industri kreatif yang kuat.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya gagasan dari Walikota untuk membangun konsep tentang pengembangan perekonomian Kota Cimahi;
- ❖ Penjabaran ide ke dalam sebuah rumusan kebijakan yaitu Pengembangan ekonomi kreatif dengan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis kluster industri
- ❖ Pemerintah Kota Cimahi dengan melibatkan instansi terkait secara bersama-sama mengembangkan 3 kluster industri
- ❖ Munculnya Keputusan Walikota No. 530.05.Kep.131-KPM/2009 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Industri Kreatif Kota Cimahi Tahun Anggaran 2009.
- ❖ Pembangunan Gedung BITC (*Baros Information Technology Creative*) dengan FO (*Fiber Optic*) serta sarana dan prasarana di dalamnya sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif Kota Cimahi khususnya Jawa Barat dan nasional umumnya;
- ❖ Menstimulasi lahirnya komunitas/asosiasi pelaku usaha ekonomi kreatif;

- ❖ Memasukkan rencana kegiatan-kegiatan pengembangan industri kreatif ke dalam dokumen-dokumen perencanaan kota, provinsi dan nasional;
- ❖ Menyusun program dan kegiatan SKPD yang mendukung pengembangan industri kreatif Kota Cimahi, antara lain penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), pelatihan SDM industri kreatif, kompetisi kreatif (festival, gelar produk/pameran), inkubasi bisnis, serta penyediaan sarana dan prasarana lainnya.

Manfaat :

- ❖ Berkembangnya perekonomian kota Cimahi melalui produk ekonomi kreatif yang lebih efektif, kreatif, berbagi antar sesama, dan berkesinambungan.
- ❖ Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
- ❖ Meningkatnya peluang investasi dan promosi investasi daerah;
- ❖ Meningkatnya kerjasama investasi;
- ❖ Meningkatnya kemampuan Teknologi Informasi;

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen kuat serta leadership yang tinggi dari kepala daerah untuk memperhatikan sektor industri kreatif;
- ❖ Adanya wadah atau asosiasi komunitas kreatif sebagai salah satu faktor penggerak industri ekonomi kreatif;
- ❖ Adanya sarana dan prasarana pendukung serta sistem IT yang kuat;
- ❖ Adanya program dan kegiatan SKPD yang mendukung upaya pengembangan ekonomi kreatif;
- ❖ Adanya dukungan perbankan dalam pendanaan;
- ❖ Adanya distribusi pemasaran yang jelas.

Teknik Validasi : Data Sekunder
Sumber : Buku Apeksi jilid 8

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KOTA PROBOLINGGO

Produk inovasi	: Penataan jalur PKL dan penerbitan Kartu Kendali PKL
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Walikota Probolinggo 2007
Unit Pelaksana	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
Tahun inisiasi	: 2007
Tahun implementasi	: 2008
Kontak Person	: Kepala Satpol PP Kota Probolinggo (0335) 420266

Deskripsi :



Penataan PKL di Kota Probolinggo merupakan langkah untuk melakukan pemetaan jalur-jalur yang banyak dijadikan PKL beraktivitas dengan cara melakukan survei, memonitor langsung keadaan di lapangan dan menampung usulan atau pendapat dari para PKL dan paguyubannya pada sembilan jalur di kota Probolinggo.

Banyaknya PKL yang menjamur di bahu jalan, trotoar dan lahan kosong menimbulkan banyak masalah. Masalah yang ditimbulkan antara lain kemacetan lalu lintas, mengganggu pejalan kaki, dan menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitarnya. Pemerintah harus segera mencari solusi untuk mengatasi perihal PKL. Pemkot Probolinggo mengambil langkah dengan cara penataan PKL agar PKL tidak semakin semrawut.

Penataan PKL dilakukan dengan penerbitan kartu kendali PKL dan pembagian kaos. Kartu sebagai alat identifikasi identitas pedagang, jenis dan lokasi penjualan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi dan sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen kuat dari Pemkot Probolinggo untuk membenahi PKL;
- ❖ Adanya keinginan untuk menata wilayah perkotaan agar lebih tertib dan nyaman;
- ❖ Adanya kerjasama antara pihak Pemkot dengan pihak swasta dan PKL.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Sulitnya menghadapi PKL dadakan;
- ❖ Adanya masalah perihal dana untuk melakukan pemberdayaan;
- ❖ Pemkot belum dapat mengantisipasi jumlah PKL yang terus bertambah.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiasi dari Walikota Probolinggo;
- ❖ Pembuatan SK Walikota mengenai pengelolaan PKL Nomor 188.45/271/KEP/425.012/2007;
- ❖ Pemetaan jalur-jalur yang biasanya dipakai PKL;
- ❖ Tim menerbitkan Kartu Kendali PKL;
- ❖ Mediasi dengan semua pedagang;
- ❖ Penataan pedagang yang ada.

Manfaat :

- ❖ Kota terlihat tidak semrawut;
- ❖ Menurunnya tingkat pelanggaran perda oleh para PKL;
- ❖ Dapat mengetahui jumlah PKL secara tepat.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya political will yang kuat dari pimpinan daerah;
- ❖ Adanya program yang jelas dari pemda setempat dalam melaksanakan penataan wilayah perkotaan terkait dengan PKL;
- ❖ Adanya kemauan dari semua pihak baik dari pemerintah maupun stakeholder terkait;
- ❖ Adanya pendekatan kepada PKL dan tokoh masyarakat setempat untuk mendukung program penataan tersebut.

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: Buku Apeksi Jilid 6

PENINGKATAN KETAHANAN KOTA TERKAIT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM KOTA SEMARANG

Produk inovasi	: Strategi Ketahanan Kota Semarang dalam menghadapi dampak perubahan iklim
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Pemerintah Kota Semarang, Mercy Corps dan Rockefeller Foundation
Unit Pelaksana	: BAPPEDA Kota Semarang
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Kabid. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur BAPPEDA, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup

Deskripsi :



Strategi Ketahanan Kota Semarang dalam menghadapi dampak perubahan iklim merupakan upaya yang dilakukan pemerintah kota Semarang untuk mengatasi kerentanan kota dari bencana alam, seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung, abrasi, dan penyakit demam berdarah. Bencana-bencana ini sangat erat kaitannya dengan fenomena perubahan iklim. Strategi ini disusun mengingat bahwa selama ini kota Semarang mengalami berbagai bencana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Disamping itu, pemerintah kota tidak menyadari adanya pengaruh fenomena perubahan iklim dan dampaknya terhadap sistem perkotaan, sehingga belum mempertimbangkan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan pemerintah dan

stakeholder kota tidak memiliki cukup informasi mengenai perubahan iklim, sehingga dalam pembangunan kota, populasi dan sistem perkotaan akan memiliki resiko yang lebih tinggi dalam menerima dampak dari perubahan iklim. Tanpa penanganan yang serius dan mempertimbangkan perubahan iklim, maka permasalahan bencana yang terkait iklim akan sulit diselesaikan, dan memperparah masalah perkotaan yang sudah ada.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Semarang yang bergabung di dalam program ACCCRN (*Asian Cities Climate Change Resilience Network* – Jejaring Kota-Kota Asia dalam Membangun Ketahanan terhadap Perubahan Iklim) yang difasilitasi oleh *Mercy Corps* dan didukung oleh *Rockefeller Foundation* menyusun program untuk peningkatan ketahanan kota terkait dampak perubahan iklim tersebut. Pemerintah Kota Semarang menggunakan Pendekatan Aksi Iklim Terpadu (*Integrated Climate Strategy* yang dikembangkan ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*)) bersama GIZ *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*) dengan dikombinasikan dengan Pendekatan *Climate Resilient* yang dikembangkan *Mercy Corps* dengan dukungan *The Rockefeller Foundation dalam Asian Cities Climate Change Resilience Network* (ACCCRN).

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan kota Semarang untuk mengatasi bencana alam yang sering terjadi;
- ❖ Terbangunnya koordinasi yang kuat antar SKPD dengan berbagai stakeholder;
- ❖ Terbangunnya inisiatif proaktif untuk membuka adanya peluang kerjasama dengan berbagai institusi untuk membangun jaringan, memperoleh pendanaan, dan mengimplementasikan program/proyek peningkatan ketahanan kota terkait dampak perubahan iklim;
- ❖ Adanya proses partisipatif untuk menyusun Kajian Kerentanan Kota dan menyusun Strategi Ketahanan Kota Semarang dalam menghadapi dampak perubahan iklim;
- ❖ Telah diintegrasikannya isu-isu perubahan iklim di dalam dokumen perencanaan kota.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Wilayah kota Semarang memiliki lima tipologi kawasan yang rentan bencana alam yaitu kawasan dataran rendah pesisir, pemukiman bantaran sungai, kawasan lereng perbukitan, kawasan kritis dan terbuka, kawasan permukiman yang jauh dari sumber air;
- ❖ Masih rendahnya komitmen untuk menanggulangi dampak rob, banjir limpasan, puting beliung, gelombang tinggi, tanah longsor, kekurangan air bersih dan penyakit tular;
- ❖ Kurangnya anggaran dan sarana prasarana untuk menanggulangi dampak bencana alam;
- ❖ Dampak Emisi dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas CO₂, N₂O dan CH₄ yang tinggi di kota Semarang.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Menyusun Kajian Kerentanan Kota dan menyusun Strategi Ketahanan Kota Semarang dalam menghadapi dampak perubahan iklim;
- ❖ Penyusunan Dokumen Strategis;
- ❖ Pilot Project dan Studi Sektoral (2010);
- ❖ Kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang mendukung aksi perubahan iklim;
- ❖ Integrasi dan penyelarasan isu perubahan iklim dengan usaha kota dalam membangun ketahanan dan implementasi aksi berdasarkan Strategi Ketahanan Kota;
- ❖ Monitoring dan evaluasi

Manfaat :

- ❖ Mengubah perilaku dan sikap masyarakat lebih memahami kerentanan wilayahnya dari bencana alam;
- ❖ Mengurangi dampak bencana alam bagi masyarakat kota Semarang;
- ❖ Meningkatnya kesadaran warga masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- ❖ Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir dengan dilakukannya simulasi bencana rutin dan keberadaan KSB (Kampung Tangguh Bencana atau Kelompok Siaga Bencana);
- ❖ Memperkecil kerugian dari segi ekonomi masyarakat dan kerusakan yang mungkin terjadi.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya Komitmen pimpinan daerah untuk menanggulangi bencana alam yang sering terjadi
- ❖ Komitmen SKPD untuk mengintegrasikan kegiatan perubahan iklim ke dalam program yang sudah ada.
- ❖ Adanya Komitmen kota untuk menyediakan sumber daya, baik SDM, pendanaan baik APBD maupun dana pendampingan;
- ❖ Menyusun Kajian Kerentanan Kota dan Strategi Ketahanan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim;
- ❖ Penyusunan Dokumen Strategis;
- ❖ Melakukan Pilot Project dan Studi Sektoral;
- ❖ Kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang mendukung aksi perubahan iklim;
- ❖ Integrasi dan penyelarasan isu perubahan iklim dengan usaha kota dalam membangun ketahanan dan implementasi aksi berdasarkan Strategi Ketahanan Kota;
- ❖ Monitoring dan evaluasi.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi jilid 8

SHIFTING ANGKOT KOTA SUKABUMI

Produk inovasi	: Pembagian waktu operasi angkutan kota menjadi dua shift
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Walikota Sukabumi 2005
Unit Pelaksana	: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi
Tahun inisiasi	: 2005
Tahun implementasi	: 2005
Kontak Person	: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi (0266) 221506

Deskripsi :



Shifting angkot kota Sukabumi adalah kebijakan pembagian waktu operasi angkutan kota (angkot) menjadi dua shift. Pembagian waktu operasi ini dengan pembagian 1 hari libur dan 1 hari kerja, dimana satu trayek dibagi menjadi 2 shift. Hal tersebut karena jumlah kendaraan angkot melebihi jumlah kebutuhan warga kota. Kondisi ini diperparah akibat naiknya bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan konflik antar pengemudi angkot.

Tujuan dari kebijakan shifting angkot tersebut antara lain dapat menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas kota Sukabumi dan menaikkan tingkat pendapatan pengemudi dan pengusaha angkutan kota. Untuk

mendukung implementasi kebijakan shifting angkot tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan kota Sukabumi, Satlantas Polresta Kota, DPC Organda, Kelompok Kerja Usaha (KKU), Pengusaha dan Pengemudi Angkot.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya inisiatif dari Walikota Sukabumi;
- ❖ Adanya keinginan untuk menciptakan trayek angkot yang tertata dengan baik;
- ❖ Adanya dukungan dari stakeholder terkait;
- ❖ Adanya keinginan untuk menciptakan kerukunan antar pengemudi angkutan dalam mencari penumpang.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Timbul kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan menurunkan pendapatan pengemudi angkot;
- ❖ Heterogenya tingkat pendidikan pengemudi dan pengusaha menjadi salah satu penghambat proses komunikasi dan konsolidasi kegiatan;
- ❖ Kebijakan ini sangat sulit dilakukan pada trayek yang memiliki banyak persinggungan dengan trayek lain, terutama yang bersinggungan dengan trayek angkot luar kota, karena Pemerintah
- ❖ Kota Sukabumi tidak memiliki kewenangan mengaturnya;
- ❖ Masih adanya pengemudi pada trayek tertentu kembali ke satu shift karena pengemudi tidak merasakan peningkatan pendapatan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Melakukan proses identifikasi dan rangkaian kegiatan seputar masalah angkot;
- ❖ Melakukan koordinasi, konsolidasi dan sosialisasi dengan seluruh stakeholder;
- ❖ Melakukan kesepakatan dengan para pengemudi dan pengusaha angkot untuk melakukan uji coba selama satu hingga empat bulan untuk menerapkan pembagian shift;
- ❖ Melakukan pemberlakuan shifting angkot secara bertahap.

Manfaat :

- ❖ Turunnya kepadatan lalu lintas pada daerah yang menerapkan kebijakan shifting angkot;
- ❖ Berkurangnya potensi konflik antar pengemudi akibat berebut penumpang;
- ❖ Meminimalisasi biaya operasional angkot dan memperpanjang usia pakainya.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Pemerintah hanya sebagai fasilitator memfasilitasi stakeholder dengan memberikan kemudahan dan jadwal
- ❖ Mengikutsertakan stakeholder dalam merencanakan hingga mengimplementasikan program

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: Buku Apeksi Jilid 6

PENANGANAN PENGEMIS DAN PENGAMEN DENGAN PENDEKATAN KEMANUSIAAN KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Metode penanganan pengemis dan pengamen
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Kasatpol PP (Bp. Sutardjo)
Nama Instansi	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
Unit Pelaksana	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
Tahun inisiasi	: 2013
Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Deskripsi :



Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan merupakan komitmen satuan polisi pamong praja untuk menciptakan kota yang nyaman dan aman bagi warga kota Surakarta. Tujuannya adalah memberi rasa nyaman dan aman bagi warga dan memberikan solusi terhadap pelaku untuk melakukan aktifitas yang lain. Penanganan pengemis dan pengamen dilakukan dengan cara mendata terlebih dahulu pengemis dan pengamen yang ada melalui diteksi dini di lapangan. Setelah didata dan membekali diri dengan "buku saku" petugas juga mengantarkan mereka pulang setelah sepatat atas solusi yang diberikan. Dilakukan home visit untuk mengetahui potensi ekonomi dan usaha para

pengemis dan pengamen sehingga dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana yang tepat untuk beralih profesi. Bantuan sarana dan prasarana diperoleh dari CSR.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Sarana prasarana untuk melaksanakan tugas, termasuk mengantarkan pengemis dan pengamen ke rumahnya kembali;
- ❖ Kesadaran pengemis dan pengamen yang dipulangkan untuk melakukan aktifitas yang lebih berguna;
- ❖ Adanya pembahasan yang bisa memberi CSR.

Faktor Penghambat Inovasi :

Pengemis dan Pengamen yang kembali lagi melakukan kegiatannya.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pencanaan penanganan pengemis dan pengamen secara manusiawi. (penerapan konsep memanusiakan manusia yang dilakukan oleh Walikota Surakarta pada proses penanganan PKL);
- ❖ Memberi pembekalan pada petugas tentang standar Penanganan dan Pedoman Penanganan (Surakarta menyediakan 'Buku Saku');
- ❖ Pendataan pengemis dan pengamen yang ada di Surakarta;
- ❖ Koordinasi dengan dinas perhubungan, Polisi Satuan Lalulintas dan Linmas;
- ❖ Pelaksanaan Penanganan (Mendatangi, komunikasi dan pemberian solusi bagi pengemis dan pengamen);
- ❖ Tempat yang sudah ditinggal oleh pengamen/pengemis dijaga oleh Linmas.

Manfaat :

- ❖ Memberikan rasa nyaman dan aman bagi warga kota Surakarta;
- ❖ Memberikan solusi bagi pengemis dan pengamen.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen pimpinan, petugas dan pelaku untuk menjaga kenyamanan dan keamanan kota;
- ❖ Memiliki buku saku yang berisi tupoksi, Peraturan daerah, SOP bagi petugas;
- ❖ Melakukan kerjasama dengan satuan lalulintas dan dinas perhubungan serta linmas;
- ❖ Permohonan CSR ke perusahaan untuk memberikan alat yang dibutuhkan para pengamen sehingga bisa beralih profesi.

Teknik Validasi	: Observasi
Sumber	: Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

PENANGANAN GELANDANGAN DAN ORANG GILA DENGAN PENDEKATAN KEMANUSIAAN KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Metode Penanganan gelandangan dan orang gila
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Pelaksana	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun inisiasi	: 2014
Tahun implementasi	: 2014
Kontak Person	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Deskripsi :



Penanganan gelandangan dan orang gila merupakan inisiatif dari kantor polisi pamong praja yang digagas oleh Kepala satpol PP. Penanganan ini dilakukan mengingat Surakarta menjadi tujuan relokasi gelandangan dan orang gila dari daerah sekitar juga karena RSJ terletak di kota Surakarta. Penanganan ini dilakukan dengan tujuan menertibkan kota dari para gelandangan dan orang gila, sehingga tercipta ketenangan dan kenyamanan warga Surakarta. Penanganan, pendataan dan penanganan gelandangan pada malam hari dengan solusi dipulangkan sedangkan untuk orang gila dilakukan pada siang hari dengan solusi dirawat di RS jiwa/griya PMI lalu setelah mereka sembuh akan dikembalikan kepada keluarganya. Penanganan ini melibatkan Linmas, RS jiwa, Griya PMI dan dana berasal dari PAD dan para donatur.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen untuk berkoordinasi dan rasa kemanusiaan para petugas lapangan;
- ❖ Dukungan dana dari masyarakat dalam hal perawatan di griya PMI yang memadai (Biaya perawatan 500 ribu/bulan/orang);
- ❖ Dukungan dana dari pemerintah daerah untuk memulangkan gelandangan dan orang gila kepada keluarganya.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Munculnya kembali gelandangan/ orang gila yang merupakan buangan dari daerah lain;
- ❖ Belum adanya koordinasi penanganan gelandangan dan orang gila dengan daerah sekitar.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pencanangan Penanganan gelandangan dan orang gila oleh Kepala Satpol PP;
- ❖ Memberi pembekalan pada petugas tentang standar Penanganan dan pedoman penanganan (Surakarta menyediakan 'Buku Saku');
- ❖ Pendataan awal gelandangan dan orang gila melalui diteksi dini dan patroli petugas;
- ❖ Koordinasi dengan Linmas, Rumah sakit jiwa dan griya PMI dalam menangani dan menampung mereka yang ditemukan;
- ❖ Pelaksanaan Penanganan (Mendatangi, membawa dan membersihkan, serta menghantarkan ke rumahnya. Untuk orang gila akan diberikan perawatan sampai mereka sadar dan mengenali diri sendiri dan alamat rumahnya).

Manfaat :

- ❖ Memberi rasa nyaman dan aman bagi warga kota Surakarta;
- ❖ Mengembalikan orang gila ke fitrahnya sebagai manusia.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan untuk mengatasi permasalahan penyakit masyarakat;
- ❖ Koordinasi dilakukan dengan seluruh pihak terkait seperti petugas satpol PP, Linmas, Rumah sakit jiwa, Griya PMI;
- ❖ Kerjasama dengan stakeholder seperti rumah sakit jiwa dan griya PMI untuk penyembuhan orang gila, dinas perhubungan, angkutan umum lain untuk mengantarkan orang gila dan gelandangan kembali ke keluarganya;
- ❖ Diperlukan dukungan anggaran untuk ongkos antar gelandangan dan orang gila, serta perawatan rumah sakit jiwa / griya PMI.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PERMASALAHAN SISWA KOTA SURAKARTA

Produk Inovasi	: Metode Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa		
Jenis Inovasi	: Metode		
Penggagas	: Kasatpol PP (Bp.Sutardjo)		
Unit Pelaksana	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Surakarta		
Tahun inisiasi	: 2013	Tahun implementasi	: 2013
Kontak person	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		

Deskripsi :



Penanganan dan pencegahan permasalahan vandalisme siswa merupakan usaha proaktif pemerintah kota Surakarta untuk melakukan pembinaan sejak dini kepada siswa dan siswi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya vandalisme (corat-coret di tempat umum), perkelahian, bolos sekolah dan konsumsi minuman keras. Tujuannya adalah agar para siswa memahami pentingnya peran siswa dalam pembangunan manusia yang ditempuh lewat sekolah.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Surakarta adalah 1) melakukan pembinaan oleh Satpol PP dengan memberikan amanat pada saat upacara bendera di sekolah; 2) Satpol PP melalui anggota Satlinmas

wilayah mengidentifikasi lokasi-lokasi membolos anak-anak seperti warung makan, plas station, game online dan warnet; 3) melakukan patroli dan razia pelajar membolos dan patroli lingkungan guna antisipasi tindakan vandalisme dan perkelahian antar siswa; 4) memberikan pembinaan di kantor Satpol PP dan membuat surat pernyataan tidak mengulang bagi siswa yang kedapatan membolos yang selanjutnya diserahkan kepada orang tua dan sekolah untuk dibina kembali. Orang tua dan sekolah bertanggung jawab atas keberadaan siswanya bila terjadi siswa membolos lagi maka sekolah dan orang tua diharapkan untuk segera memberi tahu Satpol PP untuk dilakukan pencarian siswa tersebut. Dalam penangan permasalahan ini Satpol PP dan sekolah bekerjasama dengan SKPD terkait yaitu Dinas Dikpora, Disbudpar, Kepolisian.

Faktor Pendorong Inovasi :

- ❖ Komitmen menjadikan Surakarta kota kondusif untuk pelajar;
- ❖ Komitmen menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan kota;
- ❖ Dukungan dari masyarakat, dunia pendidikan dan orang tua siswa.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Komitmen beberapa siswa yang rendah untuk belajar ;
- ❖ Kurangnya kesadaran pengelola warung makan, warnet, game online dan play station untuk menolak siswa membolos masuk di tempat usaha mereka.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Melakukan perencanaan dan jadwal pembinaan di sekolah (upacara bendera dan ospek siswa baru);
- ❖ Melakukan perencanaan dan jadwal Penanganan siswa bolos dan vandalisme;
- ❖ Mengidentifikasi lokasi-lokasi membolos anak-anak;
- ❖ Melakukan tindak lanjut dan monitoring siswa membolos, hasil penanganan penertiban.

Manfaat :

- ❖ Menekan jumlah siswa membolos dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar;
- ❖ Menjamin rasa aman dan kondusifitas kota.

Prasyarat replikasi :

- ❖ Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk membina siswa guna mencegah permasalahan kesiswaan;
- ❖ Koordinasi seluruh SKPD terkait untuk lebih intensive penanganan siswa membolos dan vandalisme;
- ❖ Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dan orang tua;
- ❖ Mempersiapkan dan mendukung lokasi bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

PROGRAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Walikota Joko Widodo (2006)
Unit Pelaksana	: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta
Tahun inisiasi	: 2005
Tahun implementasi	: 2006
Kontak Person	: Dinas Pengelolaan Pasar dan Satpol PP Surakarta

Deskripsi :



Penataan pedagang kaki lima di Surakarta merupakan penataan pedagang yang dilakukan cukup unik, damai dan disesuaikan dengan karakteristik PKLnya. Penataan ini dilakukan karena melihat kondisi PKL yang "semrawut" dan tersebar di berbagai tempat sehingga mengganggu ketertiban umum. Tujuan dilakukannya penataan dan pengelolaan PKL untuk memberdayakan dan menata PKL secara humanis. Inovasi yang dilakukan adalah dengan melakukan relokasi melalui pendekatan humanis, yaitu dengan strategi 1) "nguwongke uwong" atau memanusiakan manusia, maksudnya adalah menempatkan manusia sesuai harkat dan martabatnya, 2) kemitraan, yaitu penataan PKL melibatkan masyarakat, pemerintah dan PKL itu sendiri, 3) hati nurani, bahwa ada rasa saling mengisi antara satu pihak dengan pihak yang lain,

dalam hal ini antara PKL, masyarakat dan pemerintah, 4) saling menghormati, yaitu adanya keseimbangan antara PKL, masyarakat dan pemerintah.

Program ini dapat berjalan berkat strategi yang disebut manajemen "Gotong Royong". Strategi ini diterapkan dengan cara tiap SKPD saling bekerjasama dengan mengalokasikan kegiatan yang mendukung program tersebut. PKL ditata sesuai karakter dan jenis usaha. Pemkot Surakarta membuat shelter untuk PKL, membantu memindahkan kelokasi yang baru serta menyediakan trayek baru untuk sarana transportasi menuju shelter. Pada akhirnya dalam perencanaannya penataan kota ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41/2010 dan Perpres No. 100/2010, serta diwujudkan pula dalam RPAD.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen Pimpinan daerah dan pimpinan SKPD yang menjalankan program yang baik;
- ❖ Partisipasi warga yang besar dalam mendukung program tersebut;
- ❖ Desakan masyarakat untuk membuat kota berseri (bersih tertib aman);
- ❖ Dukungan dari lembaga masyarakat (pelaku bank, akademisi, LSM);
- ❖ Adanya dukungan sarana dan prasarana oleh pemerintah kota (aturan, finansial, personal);
- ❖ Munculnya semangat untuk melakukan pekerjaan dengan senang ("bekerja dengan hati");
- ❖ Adanya keteladanan dari pemimpin.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Pola penanganan yang masih beragam menyebabkan Pemda harus bekerja keras melakukan pembinaan sesuai dengan karakter pedagangnya;
- ❖ Pemahaman tentang penataan sangat kurang, cenderung diartikan penggusuran;
- ❖ "Petualang" PKL sangat sulit diatur;
- ❖ Perilaku pengendali PKL/Bos PKL/ Broker PKL (Pengusaha PKL) yang cenderung seenaknya;
- ❖ Adanya orang yang melindungi PKL (Backing) untuk menempati tempat yang tidak sesuai;
- ❖ Mind set PKL yang beranggapan jika dipindahkan ketempat lain maka dagangannya tidak akan laku;
- ❖ Kurangnya koordinasi dari aparat pemerintah karena kurang memahami aturan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya komitmen dan keinginan pemimpin daerah untuk menata lingkungan dan wilayahnya;
- ❖ Menyusun Perda terkait dengan Penataan dan Pengelolaan PKL;
- ❖ Melakukan sosialisasi Perda kepada stakeholder;
- ❖ Melakukan komunikasi secara intens dengan PKL untuk memberikan solusi yang diperlukan;
- ❖ Memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa shelter, gerobak atau tenda;
- ❖ Membantu modal usaha melalui koperasi serba usaha (KSU) "MONJARI 45";
- ❖ Mempermudah perijinan (SIUP/surat ijin usaha perdagangan, KTPP/Kartu Tanda Pedagang, SHP/surat hak penempatan secara gratis selama satu tahun);
- ❖ Mempersiapkan trayek angkutan yang dapat mengakses pasar;
- ❖ Melakukan promosi baik melalui media elektronik, cetak maupun hiburan;
- ❖ Membantu pemindahan dan pengangkutan barang;
- ❖ Menerapkan penegakan hukum terhadap PKL sesuai Perda.

Manfaat :

- ❖ Terwujudnya lingkungan Kota yang tertata rapi dengan adanya 712 shelter PKL terbangun dan 3.898 PKL yang telah tertata dan akan terus bertambah, tidak merusak fasilitas, tidak membuat macet;
- ❖ Meningkatnya redistribusi daerah sampai pada titik 350 juta pada tahun 2013;
- ❖ Memberikan kepastian usaha sesuai dengan aturan yang ada sehingga bekerja aman, nyaman dan tentram;
- ❖ Masyarakat dapat menikmati hak akan lingkungan kota yang bersih, nyaman dan tertib;
- ❖ Berkurangnya konflik horizontal (masyarakat dan pedagang) berkaitan dengan hak yang didapatkan;
- ❖ Tumbuhnya kepatuhan / Kearifan lokal di Kota.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Mind set pemerintah sebagai "Pelayan Warga" harus diwujudkan sehingga akan muncul konsep kerja untuk "mengabdikan";
- ❖ Menumbuhkan rasa empati pada para petugas sehingga akan bermanfaat bagi sesama;
- ❖ Melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan para pedagang dan pihak terkait secara intensif;
- ❖ Menyediakan tempat berdagang yang layak dan disediakan akses bagi pengunjung ke tempat dagangan baru (trayek dan terminal);
- ❖ Menyediakan rambu/ petunjuk arah ke lokasi pemindahan/ shelter dagang;
- ❖ Melakukan pengelolaan yang tepat pada tempat dagang yang telah ditinggalkan.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU KOTA PROBOLINGGO

Produk inovasi	: Sistem Pengelolaan Sampah Berdaya Guna
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Walikota Probolinggo 2006
Unit Pelaksana	: Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
Tahun inisiasi	: 2006
Tahun implementasi	: 2006
Kontak Person	: Kepala Badan Lingkungan Hidup (0335) 421646

Deskripsi :



Daur ulang dilaksanakan oleh masyarakat skala rumah tangga.

Pengelolaan sampah terpadu adalah proses yang diperlukan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup dan harus berdaya guna dengan memperhatikan segi kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.

Sampah menjadi masalah serius bagi kota Probolinggo. Banyak sampah yang tidak ditangani secara benar membuat lingkungan di sana menjadi kotor dan tidak sehat. Kendala sampah dapat menjadi aspek internal dan eksternal. Masalah internal dalam pengelolaan sampah antara lain keterbatasan dalam pengelolaan sampah yang disebabkan belum adanya regulasi tentang pemilahan sampah, keterbatasan pengelolaan sampah di TPA dan masih adanya keterlambatan pengangkutan sampah. Sedangkan untuk masalah eksternal adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menangani sampah.

Pengelolaan sampah terpadu dimaksudkan untuk 1) menciptakan lingkungan kota yang bersih dan nyaman 2) mengubah olahan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan berdaya guna. Pengelolaan sampah terpadu di kota Probolinggo dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah kota Probolinggo dengan instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kota Probolinggo dan Universitas Brawijaya) untuk melakukan pembenahan TPA di kota Probolinggo.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya inisiatif dari Pemkot Probolinggo untuk mengelola sampah;
- ❖ Adanya keinginan untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih;
- ❖ Adanya dukungan dari stakeholder dan masyarakat untuk membantu mensukseskan program.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masih adanya beberapa masyarakat yang membuang sampah sembarangan;
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah;
- ❖ Masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mengelola sampah.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Usulan Pemkot Probolinggo untuk mengatasi masalah sampah;
- ❖ Pembuatan proposal kepada dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur dan Bappeda Kota Probolinggo untuk melakukan pembenahan di TPA;
- ❖ Penyediaan anggaran dari Pemkot Probolinggo untuk pembenahan TPA;
- ❖ Pembentukan UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah di bawah naungan BLH sesuai Perda No.7 Tahun 2008;
- ❖ UPT bekerja sama dengan masyarakat terkait pengolahan sampah dan pemberian pelatihan pembuatan kompos.

Manfaat :

- ❖ Meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat mengenai kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah;
- ❖ Tersedianya pupuk kompos bagi masyarakat yang berasal dari olahan sampah UPT;
- ❖ Terciptanya lingkungan TPA yang tidak kotor dan kumuh lagi seperti keadaan sebelumnya.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen kuat dari kepala daerah yang bukan hanya secara verbal, tapi juga harus ditunjukkan dengan bukti nyata;
- ❖ Membangun koordinasi yang intens di antara para stakeholder;
- ❖ Menyediakan sarana, prasarana dan anggaran yang dibutuhkan;
- ❖ Menumbuhkan kesadaran masyarakat harus juga disertai dengan penyediaan fasilitas, seperti kesiapan menjemput sampah yang sudah dipilah masyarakat.

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: Buku Apeksi Jilid 6

LAYANAN MEMIKAT KABUPATEN SEHAT KABUPATEN BANTAENG

Produk inovasi	: Memberi Layanan Kesehatan Jemput Bola Melalui Brigade Siaga Bencana (BSB)
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
Penggagas	: Prof. Dr. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr (Bupati Bantaeng)
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng

Deskripsi :



Layanan kesehatan jemput bola melalui Brigade Siaga Bencana (BSB) merupakan pelayanan kesehatan melalui saluran telepon 113. Layanan kesehatan gratis ini bertindak cepat memberikan pertolongan di rumah warga dengan mobil ambulance yang membawa pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Inovasi ini bertujuan untuk mengantisipasi setiap bencana yang timbul serta memberikan pelayanan kesehatan di tempat pasien, serta penanganan kasus darurat yang jauh dari pusat layanan kesehatan umum (Puskesmas). Kegiatan ini mulai diimplementasikan pada tanggal 7 Desember 2009. Dalam pelaksanaan BSB tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng membentuk struktur dan garis komando BSB tiga instansi, yakni Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA), dan Dinas Sosial. Kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah Jepang, menghasilkan

bantuan tiga ambulance dan dua mobil damkar dari perusahaan terkemuka otomotif Ehime, Toyota. Selain itu Walikota Matsuyama Jepang, juga menyumbang unit ambulance modern. Selain itu pada tahun 2013 BSB juga mendapat bantuan berupa kapal patroli berkecepatan tinggi.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya kebijakan dengan dikeluarkannya SK Bupati sebagai payung hukum untuk melakukan kerjasama dengan Dinas/ instansi terkait;
- ❖ Adanya unit BSB yang menyatukan kepentingan antar dinas terkait karena semua pihak memiliki kontribusi secara proporsional dan profesional;
- ❖ Adanya dukungan finansial baik sumber dari APBD maupun bantuan pihak swasta;
- ❖ Adanya kemitraan dengan Pemerintah Matsuyama Jepang, Toyota;
- ❖ Adanya bantuan beberapa unit ambulance modern yang setara dengan ambulance istana Presiden RI.

Faktor Penghambat Inovasi :

Adanya kendala teknis di lapangan namun bisa ditangani secara ad hoc di lapangan

Tahapan Proses Inovasi :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ❖ Inisiatif menerbitkan SK Tim Emergency servis; | komando BSB; |
| ❖ Membentuk Struktur dan garis komando; | ❖ Menyiapkan tenaga tenaga Medis; |
| ❖ Mengeluarkan SK Protap SOP dan garis | ❖ Menyiapkan kendaraan ambulance. |

Manfaat :

- ❖ Masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara tidak dipungut biaya atau gratis;
- ❖ Masyarakat mudah untuk mendapatkan akses layanan darurat (emergency);
- ❖ Masyarakat mudah mendapatkan layanan rujukan ke puskesmas dan rumah sakit;
- ❖ Dapat menurunkan kasus penyakit berbasis lingkungan antara lain yang ditimbulkan nyamuk demam berdarah;
- ❖ Menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
- ❖ Meningkatnya jumlah pasien yang dilayani BSB hingga tahun 2013 sebanyak 624 pasien.

Prasyarat Replikasi :

- | | |
|--|--|
| ❖ Adanya dukungan Kebijakan dari Pimpinan; | ❖ Tersediannya sarana operasional Mobil ambulance; |
| ❖ Tersediannya Standar Operating Procedure; | ❖ Tersediannya dokter, perawat, dan tenaga medis. |
| ❖ Tersediannya saluran komunikasi (telepon, SMS, dll); | |

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Pratik Baik inovasi pelayanan publik jilid 2

PEMBERDAYAAN PENGRAJIN TENUN TRADISIONAL KOTA DENPASAR KOTA DENPASAR

Produk inovasi	: Program Pengembangan Tenun Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Lokal
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Mantra dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Denpasar I.A Selly Dharmawijaya Mantra
Unit Pelaksana	: Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Denpasar
Tahun inisiasi	: 2011 Tahun implementasi : 2011
Kontak Person	: Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Denpasar

Deskripsi :



Program Pengembangan Tenun Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Lokal adalah program untuk membangkitkan geliat kain tenun tradisional khususnya tenun endek melalui penguatan pengrajin maupun promosi secara gencar ke berbagai kalangan. Kain tenun endek telah mengalami penurunan dan kehilangan popularitasnya. Harga tenun endek relatif lebih mahal karena bahan baku benangnya masih diimpor, waktu pengerjaannya membutuhkan waktu lama, butuh ketelitian dan ketrampilan khusus, mayoritas pekerjaan tenun adalah generasi tua dan semakin langka. Kain tenun endek juga belum mampu merambah pasar nasional dan belum dikembangkan menjadi produk jadi.

Pemikiran ini secara umum lahir sebagai wujud keprihatinan pemerintah atas terpuruknya industri tenun endek, kurang populernya endek di kalangan lokal sendiri dan sulitnya pemasaran. Pengembangan tenun tradisional ini sekaligus bertujuan untuk mengangkat pengrajin tenun sebagai upaya menopang kehidupan ekonomi.

Strategi pengembangan kain tenun tradisional antara lain 1) Pemberian bantuan alat tenun endek sebanyak 19 buah dan 1 buah persiapan lusi/pakan 2) Pelatihan tenun songket yang melibatkan generasi muda 3) Dibentuknya Tim Tekstil 4) Dibentuknya Asosiasi Bordir 5) Dekranasda Kota Denpasar bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menyerahkan manajemen pengelolaan Imperium Kumbasari kepada Asbest dan APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia)

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen kuat pimpinan daerah dan kesungguhan seluruh aparat untuk mengembangkan potensi daerahnya;
- ❖ Sinergi dan kerjasama yang kuat dari seluruh pihak yang terkait;
- ❖ Kesamaan pemahaman dan kesadaran tinggi dari seluruh jajaran pemerintah dan komponen masyarakat;
- ❖ Adanya keinginan untuk meningkatkan jangkauan pasar industri kain tenun baik lokal maupun mancanegara bagi pengrajin kain tenun tradisional.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan budaya tradisional;
- ❖ Bahan baku yang masih diimpor, sehingga harga tenun masih mahal;
- ❖ Pembuatan kain tenun masih menggunakan alat tradisional sehingga membutuhkan waktu yang lama;
- ❖ Persaingan dengan produk serupa dari daerah lain sehingga perlu promosi yang gencar.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Mengidentifikasi data pengrajin kain tenun serta kebutuhan dari para pengrajin (oleh Disperindag);
- ❖ Pembagian peran dari struktur pemerintahan kota Denpasar dimana Disperindag menjadi leading sector untuk proses pengembangan teknologi tenun serta pengembangan SDM pelaku industri tenun, sedangkan Dekranasda (di bawah sekretaris daerah bidang ekonomi dan pembangunan) bertugas untuk mengembangkan promosi tenun. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah pelatihan bagi generasi muda, pengadaan alat tenun, pembentukan tim tekstil;
- ❖ Melakukan promosi kain tenun ke berbagai kalangan baik lokal maupun internasional.

Manfaat :

- ❖ Terpromosikannya tenun endek, songket dan bordir kepada masyarakat melalui berbagai ajang;
- ❖ Tersedianya tempat sebagai media pemasaran dan penunjang kreatifitas bagi pengembangan tenun bordir, endek, dan songket kota Denpasar di pasar Kumbasari yang diberi nama Imperium Kumbasari;
- ❖ Terjadi peningkatan signifikan terhadap permintaan jumlah tenun endek dan songket, seperti terlihat pada data produksi industri pengrajin Sekar Jepang;
- ❖ Terjadi peningkatan omzet dari pameran Denpasar Festival untuk komoditi tekstil;
- ❖ Terjadi peningkatan penjualan kain tenun oleh Asbest;
- ❖ Produk tenun endek sudah menjadi komoditi ekspor ke negara Jepang dan Australia.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen kuat pimpinan daerah dan kemauan dari seluruh aparat pemerintahan untuk mengembangkan potensi daerahnya;
- ❖ Melakukan sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengangkat dan mengembangkan potensi lokal;
- ❖ Adanya kesamaan pemahaman dan kesadaran yang tinggi untuk menyelamatkan budaya tradisional sebagai langkah penguatan ekonomi lokal.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah, KemenPAN-RB, 2013

PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL (BELIMBING DEWA) SEBAGAI IKON KOTA KOTA DEPOK

Produk inovasi	: Budidaya Belimbing Dewa
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok
Unit Pelaksana	: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok
Tahun inisiasi	: 2004
Tahun implementasi	: 2007
Kontak Person	: Dinas Pertanian dan Perikanan Telp./Fax: 021-7721 0652/ 021-7764 412, Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda 021-7759 869, Puskop Belimbing Dewa Telp./Fax : 021-777 5451

Deskripsi :



<http://depok.go.id>

Upaya pembudidayaan belimbing dewa di kota Depok merupakan gerakan sadar pangan dan gizi (GSPG) yang dicanangkan oleh Departemen Pertanian yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Depok dengan menanam belimbing sebagai tanaman pekarangan dengan penyebaran 1000 pohon belimbing dengan setiap pekarangan menanam belimbing 2-10 pohon. Sebelum program ini dilaksanakan, produksi belimbing masih belum optimal dikarenakan belum adanya bibit unggul, teknologi budidaya dan pengolahan, sarana produksi, hama penyakit, belum adanya standard budidaya sehingga masih dilaksanakan sendiri-sendiri, belum adanya kelembagaan pemasaran, dan belum menjadikan belimbing sebagai sumber mata pencaharian.

Budidaya belimbing dewa ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani, di samping itu untuk pencapaian program dalam rangka memperluas ruang terbuka hijau kota Depok. Usaha ini terbukti berhasil dengan

meningkatnya pendapatan petani sebesar 10 - 20 % dan perluasan ruang terbuka hijau mencapai 20 hektar.

Untuk mendukung program tersebut telah dilakukan penciptaan pola teritorial manajemen, melakukan dialog langsung (dialog dan kelompok), pengembangan pola kemitraan permodalan dengan Bank Mandiri selama 3 tahun, memperkuat kelembagaan industri belimbing, memperkuat kelembagaan pengolahan hasil, memperkuat kelembagaan pengolahan belimbing dan mengalokasikan anggaran APBD 300 - 400 juta per tahun.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pemda untuk meningkatkan pendapatan petani belimbing yang masih rendah, karena pemasaran dikuasai tengkulak dan belum ada industri olahan;
- ❖ Adanya keinginan untuk memperluas ruang terbuka hijau;
- ❖ Adanya keinginan untuk menggali potensi unggulan daerah.
- ❖ Adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan petani belimbing;

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masih terbatasnya akses permodalan dari perbankan;
- ❖ Masih terbatasnya anggaran APBD untuk pengembangan program budidaya belimbing dewa;
- ❖ Terbatasnya jangkauan pemasaran produk hasil olahan belimbing dewa;
- ❖ Kurang tersosialisasinya standarisasi hasil produk olahan belimbing dewa;
- ❖ Masih terbatasnya fasilitas pendukung proses industri pengolahan belimbing dewa.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Inisiasi budidaya belimbing dewa dari dinas pertanian dan perikanan kota Depok;
- ❖ Melakukan koordinasi antar SKPD terkait dalam penyiapan program belimbing dewa;
- ❖ Melakukan diskusi dengan para petani untuk berbagi pengalaman dalam menyusun SOP budidaya belimbing dewa;
- ❖ Menyusun SOP budidaya belimbing dewa yang dapat diterapkan oleh para petani untuk menghasilkan belimbing dewa terkait dengan pemilihan lokasi, penentuan waktu tanam, penyiapan lahan, penyiapan bibit, penanaman, pemupukan, pengairan, pemangkasan, pengendalian OPT (organism pengganggu tanaman), penempelan, sanitasi kebun, penjarangan buah, panen, pengumpulan buah hasil panen, pembersihan, sortasi dan grading, pengemasan dan transportasi;
- ❖ Memperkuat kelembagaan pemasaran belimbing, dengan mendirikan lembaga untuk membantu petani buah belimbing memasarkan hasil produksinya yaitu Pusat Koperasi Pemasaran Buah dan Olahan Belimbing Dewa Depok (PKPBDD);
- ❖ Membangun kemitraan dengan Bank Mandiri;
- ❖ Melakukan pembinaan kepada kelompok tani melalui musyawarah kelompok, pelatihan, dan studi banding;
- ❖ Penyediaan anggaran berkisar Rp.300-400 juta/ tahun.

Manfaat :

- ❖ Meningkatnya jumlah petani belimbing pada tahun 2006 sebanyak 624 dari 28 kelompok tani telah meningkat menjadi 1231 petani dari 31 kelompok tani pada tahun 2007-2008;
- ❖ Pengakuan Varietas belimbing dewa dan sudah disertifikasi oleh Menteri Pertanian;
- ❖ Meningkatnya produksi belimbing dewa 12 ton belimbing per pekan dengan dipasarkan ke sejumlah retail, pasar modern (carefour dan makro), pasar tradisional, pasar induk keramat jati, supplier.
- ❖ Pemasaran belimbing dewa lebih terorganisir karena tidak lagi dikuasai tengkulak sepenuhnya;
- ❖ Meningkatnya pendapatan petani antara 10-20%;
- ❖ Adanya nilai tambah yang didapat petani lainnya kelestarian lingkungan, mutu produk sesuai dengan keinginan pasar, terjalin kemitraan, semakin kuatnya lembaga tani dan kelembagaan keuangan untuk akses permodalan;
- ❖ Bertambahnya luas ruang terbuka hijau (RTH) Kota Depok.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dan inisiasi dari dinas terkait untuk pengembangan produk unggulan daerah;
- ❖ Adanya ketersediaan lahan untuk pengembangan budidaya produk unggulan daerah;
- ❖ Adanya jaminan keberlanjutan produksi pasca panen sampai pada pemasarannya;
- ❖ Adanya ketersediaan dana yang memadai untuk pengembangan budidaya produk unggulan daerah;
- ❖ Adanya koordinasi dari seluruh SKPD terkait;
- ❖ Terbentuknya kemitraan dengan lembaga perbankan;
- ❖ Pengembangan budidaya belimbing dewa ini dapat direplikasi oleh komoditi lain yang menjadi produk unggulan daerah.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi Jilid 5

KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG KOTA PADANG PANJANG

Produk inovasi	: Kebijakan tentang Kawasan Tertib Rokok
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padang Panjang
Penggagas	: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padang Panjang
Tahun inisiasi	: 2005
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

Deskripsi :



Kawasan tertib rokok di Kota Padang Panjang merupakan upaya untuk menata lingkungan dengan memberikan tempat khusus bagi perokok agar tidak merokok sembarang tempat. Selain itu program ini menjadi salah satu usaha pemerintah kota untuk mengurangi angka penyakit paru paru di Kota Padang Panjang. Banyak kendala yang menghadang, mulai warga yang tidak disiplin hingga godaan penerimaan dana dari perusahaan rokok. Namun dengan komitmen dan keseriusan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan juga masyarakat itu sendiri, maka niat untuk menciptakan kawasan bebas dan tertib rokok terwujud.

Tujuan program ini dilakukan adalah melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dengan menertibkan masyarakat agar tidak merokok disembarang tempat dan menekan angka penyakit paru paru di kota Padang Panjang. Peraturan tentang kawasan tertib rokok meliputi tiga hal target yang ingin dicapai yaitu menjadikan orang-orang yang tidak merokok tidak terkontaminasi asap rokok, menjadikan anak dan ibu tidak terkontaminasi asap rokok, dan menjadikan kota dengan julukan Serambi Makkah ini bebas asap rokok. Strategi yang dilakukan pemerintah kota Padang Panjang adalah memberlakukan Peraturan Daerah No.8 tentang Kawasan Tertib Rokok. Pemerintah kota menargetkan beberapa kawasan untuk tertib rokok seperti kawasan wisata, pasar, restoran, rumah makan, terminal, kantor pemerintah, kantor swasta, pabrik dan industri lainnya. Awalnya hanya 36 RT yang bersedia menerapkan. Tahun berikutnya, perkembangannya cukup signifikan yaitu empat kelurahan secara sukarela bersedia bergabung menerapkan kawasan tertib rokok. Pemerintah kota juga memutuskan untuk menolak semua iklan rokok di seluruh Kota Padang Panjang, baik billboard, spanduk, reklame di toko dan jalanan maupun sponsor acara apapun khususnya olahraga dan atau acara yang menargetkan anak muda. Keputusan tersebut berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pemkot kehilangan/menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat tetap kukuh tidak akan mengubah keputusan terkait penolakan semua iklan rokok. Setelah dievaluasi pemerintah kota mencari dari sumber dana lainnya, seperti menerima iklan-iklan kesehatan dan berbagai produk lainnya. Kawasan di Padang Panjang terbagi menjadi dua yaitu

1. Kawasan Tanpa Asap Rokok merupakan kawasan yang “haram” adanya perokok beserta asap yang ditimbulkan. Kawasan ini antara lain tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat kegiatan anak-anak semacam PAUD dan angkutan umum.
2. Kawasan Tertib Rokok merupakan kawasan yang masih boleh merokok tetapi disediakan tempat khusus yang jauh dari keramaian. Kawasan ini mencakup perkantoran, hotel, restoran, terminal dan pasar. Di kawasan tersebut tidak boleh sembarangan merokok jika tidak ingin terkena sanksi.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen dan Keseriusan Pemerintah Kota dalam melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok;
- ❖ RSUD Padang Panjang yang dulu pernah dijadikan spesialisasi respirasi atau pernapasan kini tidak lagi sesak lantaran jumlah pasien paru-paru menurun drastis. Efek Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tertib Rokok telah berhasil menghapus penyakit paru-paru dari sepuluh besar penyakit terbanyak yang dilayani RSUD Padang Panjang;
- ❖ Dukungan dan komitmen masyarakat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Letak dan kondisi alam / geografis Kota Padang Panjang (suhu udara yang dingin yang dijadikan alasan untuk menghangatkan badan);
- ❖ Tradisi kental yang ada di masyarakat Kota Padang panjang yang dalam setiap kesempatan, baik dalam menjamu tamu maupun acara seperti hajatan selalu menggunakan rokok smpat.
- ❖ Aturan menolak iklan rokok menghilangkan salah satu pendapatan asli daerah (PAD)

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pada 2005, Wali Kota Padang Panjang pada periode 2003-2013 Suir Syam memberikan instruksi pada perkantoran untuk tidak merokok terutama di tempat tertutup;
- ❖ Pembentukan organisasi masyarakat bernama Forum Kota Sehat yang bertugas mensoalisasikan tentang bahaya rokok yang dilakukan selama 1 tahun hingga 2006;
- ❖ Pada 2007, mulai diberlakukan ancaman bagi pelanggar sosialisasi;

- ❖ Pada 2008 Pembuatan rancangan dan penetapan Perda KTAR/KTR dan kebijakan wali kota tidak menerima iklan rokok;
- ❖ Pada 2009 Pembuatan rancangan sampai disahkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tertib Rokok;
- ❖ Pada 2008 Pembuatan rancangan dan penetapan Peraturan Wali Kota No.9 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok;
- ❖ Rancangan penyediaan *smoking area* di beberapa kawasan yan telah ditentukan;
- ❖ Sosialisasi dan Implementasi peraturan dengan menerapkan ke kawasan yang ditetapkan juga melibatkan masyarakat lingkup RT/RW;
- ❖ Monitoring dan Evaluasi terhadap peraturan yang dilakukan tiap tahun hasilnya muncul alternatif pembiayaan kegiatan selain dari rokok yakni dari klan-iklan kesehatan dan berbagai produk lainnya.

Manfaat :

- ❖ Memberikan peringatan warga untuk tidak merokok di sembarang tempat (tertib merokok);
- ❖ Mengurangi jumlah penyakit paru-paru pada masyarakat Kota Padang Panjang;
- ❖ Terbangunnya komitmen dan peran aktif seluruh pihak, pemerintah daerah dan masyarakat;
- ❖ Adanya alternatif pembiayaan kegiatan selain dari iklan rokok.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kawasan yang bebas dari asap rokok dan dalam melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok;
- ❖ Aksi nyata dari pemerintah dengan menyusun peraturan terkait dengan usaha untuk tertib rokok;
- ❖ Mensosialisasikan ke masyarakat tentang kawasan yang bebas dari asap rokok dan sanksi yang didapat terhadap pelanggar peraturan;
- ❖ Kerjasama dari lingkungan sekitar untuk menyediakan area merokok sesuai dengan yang ada pada peraturan;
- ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan;
- ❖ Mencari alternatif pemasukan PAD sebagai dampak dari peraturan yang telah dibuat.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Koran Jawa Pos terbit hari Senin, 9 Juni 2014

BROADBAND LEARNING CENTER (BLC)
KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Layanan Jasa Pelatihan IT dan Penerapannya kepada Masyarakat
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Tri Risma Harini (walikota)
Unit Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya - (031) 531 2144 Pesawat 292 Jl. Jimerto 25-27 Surabaya

Deskripsi :



<http://dinkominfo.surabaya.go.id>

Broadband Learning Center (BLC) merupakan fasilitas pembelajaran IT yang dapat dinikmati oleh masyarakat Surabaya secara gratis sebagai salah satu upaya percepatan menuju Surabaya *Multimedia City*. Semakin banyak masyarakat Surabaya yang mengetahui keberadaan dan manfaat BLC, semakin cepat masyarakat Surabaya menjadi “Tidak GAPTEK IT”.

Pembangunan BLC mempunyai 3 (tiga) tujuan sebagai *Multi Media City* yakni 1) Surabaya *Broadband Government and Education (B-GovEd)*, merupakan wahana pelatihan pemanfaatan komputer dan internet secara selektif bagi pegawai yang telah ditunjuk pada tingkat kecamatan di Kota Surabaya, pelajar SD, SLTP, dan SLTA di Kota Surabaya; 2) Surabaya *Broadband Citizen*, merupakan layanan Free Hot Spot dan informasi di beberapa lokasi yang telah disepakati. Masyarakat bisa mengakses Internet dan beberapa aplikasi pelayanan publik seperti perijinan online

(Ijin POSTEL, Tanda Pencari Kerja, dll) secara gratis; 3) Surabaya *Government Community*, merupakan layanan informasi dan media pembelajaran Telematika yang berbasis internet di lokasi *Hot Spot*.

Broadband Learning Center (BLC) mempunyai beberapa layanan “GRATIS” antara lain 1)Pelatihan; 2) Bisnis Online; 3) Akses Perijinan Online; 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Adapun Sasaran BLC adalah pembelajaran TIK bagi : (1) anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak cacat; (2) pelajar SD/SLTP/SLTA atau mahasiswa; (3) guru/fasilitator dan tenaga pengajar; dan (4) keluarga, kelompok (perempuan/pemuda) dan masyarakat umum baik perseorangan ataupun dari LSM/ORMAS. Disamping itu juga terkait dengan : (1) pembelajaran Bisnis Online bagi UKM (Usaha Kecil Menengah); dan (2) pembelajaran produk pelayanan publik berbasis TIK (Perijinan Online) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebelumnya peserta pelatihan guru delegasi pendidikan kurang paham mengoperasikan aplikasi-aplikasi open source yang berbasis android dan berkomunikasi secara elektronik seperti : email, namun setelah dilakukan pelatihan oleh BLC, para guru tersebut menjadi mahir mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut dan berkomunikasi secara elektronik.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya upaya untuk mewujudkan Surabaya Multi Media City (SMMC);
- ❖ Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan IT;
- ❖ Perlunya anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak cacat untuk memperoleh pelatihan-pelatihan secara gratis;
- ❖ Masih banyak guru yang menjadi delegasi pendidikan kurang paham mengoperasikan aplikasi-aplikasi open source yang berbasis android dan berkomunikasi secara elektronik seperti email dll.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Adanya ketidakpedulian masyarakat;
- ❖ Adanya keterbatasan tenaga pengajar;
- ❖ Fasilitas yang belum memadai.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membangun komitmen para pihak yang memiliki kepedulian terhadap warga masyarakat terkait dengan kemampuan penggunaan TIK dan pembelajaran Bisnis Online bagi UKM dan
- ❖ pembelajaran produk pelayanan publik berbasis TIK;
- ❖ Penyediaan sarana dan prasarana;
- ❖ Penyediaan komputer dan internet;
- ❖ Penyediaan lokasi Hot Spot.

Manfaat :

- ❖ Pembelajaran Bisnis Online bagi UKM (Usaha Kecil Menengah);
- ❖ Pembelajaran produk pelayanan publik berbasis TIK (Perijinan Online) bagi seluruh lapisan masyarakat;
- ❖ Para guru tersebut menjadi mahir mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut dan berkomunikasi secara elektronik.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan daerah;
- ❖ Adanya dukungan dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan;
- ❖ Tersedianya jaringan internet;
- ❖ Tersedianya computer;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

PUSKEMAS RAMAH ANAK KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Layanan Puskesmas yang ramah terhadap anak
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Muspida Kota Surakarta
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kota Surakarta
Tahun inisiasi	: 2006
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Dinas Kesehatan Kota Surakarta

Deskripsi :



Puskesmas Ramah anak merupakan suatu wujud pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan. Puskesmas sering dipandang sebelah mata, keberadaan puskesmas yang belum sepenuhnya memberi kontribusi yang maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat masih rendah. Selain itu citra Puskemas masih kurang baik dalam mutu pelayanan maupun fisik bangunan mengakibatkan Puskemas sebagai pelayanan tingkat dasar semakin diabaikan keberadaannya oleh masyarakat. Banyak warga yang beranggapan bahwa Puskesmas merupakan sarana pengobatan penyakit sepele dan tenaga kerja yang ada di Puskesmas bisa

dikatakan tidak seprofesional tenaga kerja yang di klinik maupun rumah sakit swasta. Tenaga kerja di Puskesmas yang terlihat seperti kurang ingin untuk membantu pasien yang datang berobat ke Puskesmas. Untuk itu perlu dilakukan perubahan mealui program puskesmas ramah anak ini. Tujuannya adalah untuk memperbaiki citra Puskesmas di mata masyarakat dan agar masyarakat mau kembali berobat ke Puskesmas. Dengan begitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas sebagai pusat kesehatan bagi masyarakat. Strategi yang dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan menyediakan ruangan yang nyaman bagi warga dan anak. Selanjutnya dilakukan promosi kemasyarakat bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas sudah lebih baik dan ramah untuk dikunjungi masyarakat termasuk anak.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Anak merupakan amanah Tuhan YME;
- ❖ Anak merupakan generasi penerus;
- ❖ Anak memerlukan perlindungan;
- ❖ Pengembangan SDM yang berkualitas;
- ❖ Anak memerlukan ruang untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;
- ❖ 43,24% anak tinggal diperkotaan;
- ❖ Anak tumbuh 4,4% pertahun;
- ❖ Pada tahun 2025 diperkirakan 60% anak Indonesia tinggal di kota.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Ruang bermain anak belum menjadi prioritas pemerintah Kabupaten/Kota;
- ❖ Belum ada rute aman ke sekolah bagi anak;
- ❖ Belum terintegrasinya hak perlindungan anak ke dalam pembangunan;

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Sk Walikota Surakarta tentang Tim pelaksana PKLA;
- ❖ Komitmen unsur muspida;
- ❖ Pengembangan KLA, dengan memperbaiki standar pelayanan dan kualitas pelayanan;
- ❖ Pemberian pelatihan bagi seluruh pegawai kesehatan untuk dapat melayani dengan ramah;
- ❖ Mempersiapkan fasilitas dan ruang khusus bagi anak untuk bermain dan beraktifitas sambil menunggu;
- ❖ Mensosialisasikan kemasyarakat tentang perbaikan pelayanan kesehatan di puskesmas.

Manfaat :

- ❖ Meningkatkan prosentase penerima imunisasi dasar lengkap;
- ❖ Terbangunnya 5 Posyandu terintegrasi yang dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat ;
- ❖ 67 Pojok ASI yang telah terbangun memberi kenyamanan bagi ibu dan anak selama berada di puskesmas.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen pimpinan Daerah;
- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana;
- ❖ Tersedianya anggaran yang memadai untuk membangun ruangan yang layak anak;
- ❖ Tersedianya SDM yang memadai dengan pelatihan untuk perbaikan pelayanan;
- ❖ Melakukan sosialisasi atas perbaikan pelayanan yang diperbaiki.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi

NIGHT MARKET NGARSOPURO DI SURAKARTA KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Produk UMKM
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Wali Kota Surakarta: Ir. H. Joko Widodo
Unit Pelaksana	: Dinas Koperasi dan UMKM
Tahun inisiasi	: 2008
Tahun implementasi	: 2010
Kontak Person	: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Telp . (0271) 714890, Kepala Bidang UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM ;Telp. (0271) 714890

Deskripsi :



Night Market merupakan salah satu bentuk pasar yang menggabungkan eksotisme pasar tradisional dengan pasar modern yang aman dinikmati bagi para pengunjungnya sambil berjalan kaki. Dilihat dari aspek usaha sekitar 87 persen UMKM yang memiliki keterbatasan dalam pengembangan usaha, antara lain persaingan, penyelundupan, kebijakan ekonomi, kebijakan harga, penguasaan teknologi, permodalan dan manajerial. Untuk mengatasi hal tersebut, khususnya akses pemasaran untuk pasar lokal dan regional yang sekaligus dikaitkan dengan konsep urban space, maka Pemko menyelenggarakan pasar malam khusus produk-produk handicraft, makanan ringan, dan garment/batik di kawasan Ngarsopuro. Dengan lokasi yang sangat strategis, terletak di antara Jalan

Ronggo Warsito dan Jalan Slamet Riyadi, diharapkan pasar malam ini akan menarik perhatian masyarakat dan wisatawan sehingga akan menambah ikon kota. Adapun arti dari Ngarsopuro yang terdiri dari dua kata, yakni Ngarso dan Puro. Ngarso berarti depan sedangkan Pura berarti istana, Istana yang dimaksud adalah Pura Mangkunegaran. Sedangkan istilah asing *Night Market* yang dipakai mempunyai tujuan agar pasar dapat mengglobal dan *go international*.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya keinginan pemda untuk memberikan fasilitas usaha kepada UMKM yang memiliki keterbatasan dalam pengembangan usaha;
- ❖ Adanya keinginan untuk menyediakan media promosi dan pemasaran secara permanen bagi produk UMKM;
- ❖ Adanya keinginan untuk memberikan akses pemasaran produk kepada UMKM baik untuk pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional;
- ❖ Tersedianya Kawasan Ngarsopuro yang dikenal sebagai kawasan barang antik yang dimana seluruh kepemilikan bangunan yang berdiri di sepanjang kawasan tersebut hanyalah hak guna bangunan (HGB). Suatu kawasan yang menghubungkan antara Jl. Slamet Riyadi dengan Pura Mangkunegara.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Belum tersedianya gudang yang representatif untuk menyimpan perangkat tenda, meja dan lain sebagainya;
- ❖ Masih adanya pedagang yang tidak mematuhi ketentuan yang telah digariskan, seperti pengambilalihan hak berdagang kepada orang lain tanpa melaporkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM;
- ❖ Masih kurang disiplinnya para pedagang dalam membayar iuran, sehingga pengurus paguyuban kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar ongkos bongkar pasang tenda.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiasi dari Wali Kota Surakarta, Ir. H. Joko Widodo;
- ❖ Dinas Koperasi dan UMKM menampung aspirasi dari paguyuban dan pelaku UMKM yang terkait keterbatasan sarana promosi dan pemasaran produk;
- ❖ Aspirasi ditindaklanjuti dengan terbitnya SK Sekda Surakarta No.556.4.5/2010 tentang Pembentukan Pokja Pengelolaan Ruang Publik Kota Surakarta, dimana kawasan Ngarsopuro termasuk di dalamnya yang dikelola oleh pokja dengan leading sector-nya adalah Dinas Koperasi dan UMKM;
- ❖ Dinas kemudian melakukan penganggaran kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas;
- ❖ Pengelolaan *Night Market Ngarsopuro* dikelola dan dikoordinir oleh Dinas Koperasi dan UMKM;
- ❖ Sosialisasi *Night Market Ngarsopuro* melalui media cetak maupun elektronik lokal dengan pendekatan partisipasi para pelaku, baik saat akan dimulai maupun setelah berjalannya program;
- ❖ Pasar *Night Market* diresmikan oleh Menteri Perdagangan melalui soft launching pada tanggal 16 Februari 2009 dengan jumlah tenda yang dipasang sebanyak 57 tenda dan tiap-tiap tenda diisi oleh 4 pedagang, dengan demikian jumlah pedagang sebanyak 228 orang.

Manfaat :

- ❖ Meningkatnya omzet pedagang *Night Market Ngarsopuro* sebesar Rp 30 sampai 35 juta (bila tidak hujan). Sementara bila turun hujan, rata-rata omzet mencapai Rp 20 sampai 25 juta dengan jumlah kunjungan setiap buka rata-rata 2000 orang. Sementara untuk tahun 2011 sampai pertengahan 2012, omzet mereka rata-rata sudah mencapai Rp 100 juta rupiah/malam minggu, bila tidak hujan;

- ❖ Menambah pendapatan untuk kas keuangan paguyuban dengan kesenian atas kerjasama dengan pihak sponsor;
- ❖ Nilai positif bagi para pelaku UMKM dan menambah ikon kota sebagai tujuan wisata Kota Surakarta.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Tempat yang akan dijadikan lahan untuk kegiatan tersebut merupakan tempat yang strategis;
- ❖ Diperlukan komitmen dari pemerintah daerah tersebut dalam memberdayakan UMKM yang ditunjukkan dengan kebijakan terutama dukungan dana yang cukup;
- ❖ Penyediaan tempat-tempat hiburan rakyat guna memeriahkan tempat tersebut dan fasilitas pendukung lainnya.

Teknik Validasi : Data Sekunder
Sumber : Buku Apeksi jilid 8

PERPUSTAKAAN KAMPUNG DAN TAMAN CERDAS KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Sarana Dan Prasarana Untuk Belajar Dan Bermain Anak
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: BAPERMAS, PP, PA dan KB Kota Surakarta
Unit Pelaksana	: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PP, PA dan KB)
Tahun inisiasi	: 2008
	Tahun implementasi : 2008
Kontak Person	: Petugas Taman Cerdas Sumber, Taman Cerdas Pajang, Taman Cerdas Joyontakan, Taman Cerdas Mojosongo, Taman Cerdas Kadipiro, Taman Cerdas Gandekan serta BAPERMAS, PP, PA dan KB Kota Surakarta

Deskripsi :



Taman cerdas di kota Surakarta merupakan salah satu wujud komitmen untuk segera memanfaatkan pembangunan taman cerdas oleh masyarakat dan bagian dari Program Kota Layak Anak. Dapat dikatakan bahwa Taman Cerdas adalah tempat bermain dan belajar bagi anak. Misi Taman Cerdas ialah untuk memberikan pelayanan secara sukarela. Fasilitas gratis untuk membangun warga Surakarta menjadi lebih makmur dan mendukung Program Kota Layak Anak. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat khususnya anak-anak marginal segera memanfaatkan fasilitas taman cerdas yang telah dibangun di Kelurahan Mojosongo, Gandekan dan Pajang, diantaranya tempat bermain, tempat teknologi informasi (komputer), panggung seni kreasi dan ruang baca.

Pembangunan taman cerdas meningkatkan pengetahuan bagi anak-anak dan pihak swasta ikut berpartisipasi dalam memberikan penambahan fasilitas taman cerdas.

Perpustakaan Kampung Surakarta merupakan salah satu sumber belajar yang penting untuk memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan. Tujuan umum yang hendak dicapai perpustakaan kelurahan adalah terciptanya manusia yang lebih berkualitas, untuk itu, Perpustakaan Kelurahan SeSurakarta mempunyai tekad untuk ikut andil mencerdaskan masyarakat sekitar dan menumbuhkan budaya gemar membaca.

Program Perpustakaan Kampung /Kelurahan Surakarta dimulai tahun 2008, serentak di 12 Lokasi, 6 diantaranya adalah berupa Taman Cerdas yang berisi bangunan Perpustakaan, Bangunan IT dan Panggung Kesenian. Sedangkan selebihnya adalah; berupa bangunan perpustakaan saja. Hingga saat ini, di Kota Surakarta telah terdapat 18 lokasi Perpustakaan Kampung dan Taman Cerdas. Kota Surakarta ini memiliki 6 lokasi Taman Cerdas yang disediakan, yakni Taman Cerdas Sumber, Taman Cerdas Pajang, Taman Cerdas Joyontakan, Taman Cerdas Mojosongo, Taman Cerdas Kadipiro, Taman Cerdas Gandekan. Taman ini dibangun atas Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008. Terdapat ruang komputer, teknologi dan informasi, perpustakaan, taman bermain, aneka macam permainan, Telepon umum gratis, Internet free hotspot online 24 jam, dan macam-macam fasilitas lainnya yang diberikan gratis oleh PEMKOT Surakarta kepada warga masyarakat Surakarta.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak dan meningkatkan pengetahuan bagi anak-anak;
- ❖ Partisipasi pihak swasta ikut dalam memberikan penambahan fasilitas taman cerdas;
- ❖ Dukungan dari kelurahan dan masyarakat yang dijadikan lokasi penerapan taman cerdas;
- ❖ Keinginan untuk memberikan pelayanan secara sukarela, seluruh fasilitas gratis demi membangun warga Surakarta menjadi lebih makmur dan mendukung program Kota Layak Anak.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Jumlah sukarelawan (petugas) yang terlibat dalam mengelola dinilai kurang banyak;
- ❖ Bantuan dari stakeholder yang masih kurang cukup untuk melengkapi isi taman cerdas;
- ❖ Fasilitas taman yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah anak-anak yang memanfaatkannya.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Penurunan program kota layak anak menjadi kegiatan Perpustakaan Kampung dan Taman Cerdas;
 - ❖ Mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang program untuk membangun taman cerdas diseluruh Surakarta;
 - ❖ Memberikan alokasi anggaran untuk melakukan pembangunan perpustakaan kampung dan taman cerdas;
 - ❖ Menentukan lokasi pembangunan Perpustakaan kampung dan taman cerdas serta memfasilitasi perizinannya;
 - ❖ Membangun Taman Cerdas yang berisi bangunan Perpustakaan , Bangunan IT dan Panggung Kesenian serta kamar kecil;
- ❖ Bekerjasama dengan stakeholder (swasta dan masyarakat) untuk dapat mengisi fasilitas yang ada seperti

buku, perangkat komputer beserta jaringan internet, peralatan kesenian, serta fasilitas permainan lain untuk anak;

- ❖ Menugaskan petugas maupun sukarelawan untuk dapat mengelola dan merawat fasilitas yang telah dibangun.

Manfaat :

- ❖ Pemberian kesempatan dan fasilitas pada anak untuk berkumpul bersama untuk belajar dan bermain;
- ❖ Menambah nilai bagi kota Surakarta dalam mewujudkan diri menjadi Kota Layak Anak;
- ❖ Menambah sarana bermain dan belajar anak yang layak;
- ❖ Mengurangi pengeluaran dalam menambah ilmu karena fasilitas yang disediakan dapat digunakan secara bebas (gratis);
- ❖ Meningkatkan pendidikan anak (bebas buta aksara karena adanya gerakan wajib jam belajar 18.30 – 20.30 WIB dan sekolah ramah anak) dan disiplin anak.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen yang besar dari pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- ❖ Melakukan MOU kepada pihak terkait (stakeholder) dalam memfasilitasi pembangunan taman cerdas dan segala isinya;
- ❖ Menuangkan program taman cerdas kedalam perencanaan untuk direncanakan anggaran yang dibutuhkan;
- ❖ Bekerjasama dengan kelurahan, desa dan sukarelawan untuk memfasilitasi perawatan, pengembangan dari taman cerdas.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Pencarian melalui sumber sumber di internet

PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Beras Miskin Daerah (Raskinda) kota Surakarta
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Wali Kota Surakarta: Ir. H. Joko Widodo
Unit Pelaksana	: Kantor Ketahanan Pangan
Tahun inisiasi	: 2012 Tahun implementasi : 2013
Kontak Person	: Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta

Deskripsi :



Pengembangan cadangan pangan daerah melalui Raskinda merupakan program pemberian beras dengan kualitas premium bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak tercakup ke dalam program beras miskin (raskin) dari pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Kondisi ini disebabkan Pemkot Surakarta tidak punya lahan pertanian (yang dimiliki hanya 5% dari wilayah pertanian, itupun terdiri dari pekarangan dan taman) dan sebagian besar status tanahnya sudah kering dan pemiliknya berada di luar kota Surakarta. Tujuan Raskinda adalah untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemberian beras 5 kg/bulan selama 3 bulan (Oktober, Nopember dan Desember). Strategi yang dilakukan untuk mensukseskan program ini adalah

dengan memanfaatkan anggaran daerah. Pembiayaan Raskinda bersumber dari APBD kota Surakarta melalui DPA SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta. Selain itu untuk menentukan RTS-PM dari program Raskinda, maka ditetapkanlah melalui keputusan Walikota.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya dukungan dan komitmen dari jajaran Pemerintah daerah;
- ❖ Adanya Kepedulian Pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan masyarakat kota Surakarta Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan;
- ❖ Adanya masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menerima Raskin dari Pemerintah Pusat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Adanya data yang tidak akurat dari BPS tentang jumlah masyarakat berpenghasilan rendah;
- ❖ Kesenambungan program Raskinda bergantung pada PAD kota Surakarta.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Munculnya inisiasi dari walikota Joko Widodo pada tahun 2012 mengenai program Raskinda;
- ❖ Pada awal tahun 2013 pemkot menunggu kepastian beberapa sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk mendanai Raskinda;
- ❖ Triwulan terakhir 2013 program Raskinda dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan program raskinda.

Manfaat :

- ❖ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Surakarta dalam hal pangan;
- ❖ Mewujudkan masyarakat kota Surakarta Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Dilakukannya validasi dan pemutakhiran data RTS-PM;
- ❖ Adanya dana/anggaran yang cukup dan berkesinambungan;
- ❖ Adanya sinkronisasi / koordinasi antara Pemda dan DPRD.

Teknik Validasi	: Observasi
Sumber	: Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

PEMBERIAN INSENTIF IBU BERSALIN BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BUTON UTARA

Produk inovasi	: Insentif Transportasi bagi keluarga ibu hamil resiko tinggi
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
Penggagas	: Tim proyek Basics dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
Tahun inisiasi	: 2011
Kontak Person	: Kabupaten Buton Utara - Jalan Kompleks Bumi Sara Ea Buranga, Kulisusu - Sulawesi Tenggara - Telp. 081341621447

Deskripsi :



Pemberian Insentif Ibu Bersalin Bagi Keluarga Miskin merupakan upaya untuk memberikan bantuan insentif biaya transportasi kepada keluarga ibu hamil resiko tinggi yang harus dirujuk ke rumah sakit. Insentif tersebut berupa biaya perjalanan si Ibu dan dua orang pendampingnya. Adanya pendamping dibutuhkan untuk menolong ibu selama perjalanan berupa dukungan moral selama proses persalinan. Insentif transportasi ini berperan besar dalam menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Buton Utara sepanjang tahun 2013.

Upaya pemberian insentif ini muncul karena masih banyaknya keluarga ibu hamil dari keluarga miskin yang tinggal di daerah terpencil yang ditangani dukun bayi (baik persalinan normal maupun komplikasi) karena ketidakmampuan keluarga ibu hamil menjangkau unit pelayanan kesehatan. Data ini dikemukakan dalam kajian perencanaan ibu tahun 2010 di Kabupaten Buton Utara. Pemberian insentif keluarga ibu hamil telah diintegrasikan di dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 dan program rutin pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara. Untuk mendukung program ini, maka DPRD telah mengalokasikan APBD tahun 2014 sebesar 90 juta.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya keinginan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- ❖ Adanya dukungan dari kepala daerah setempat untuk pelaksanaan program;
- ❖ Adanya minat yang tinggi dari keluarga ibu hamil untuk mendapatkan insentif biaya transportasi.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan yang terdapat di Kabupaten Buton Utara;
- ❖ Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang ada.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Inisiasi dari dinas kesehatan dan proyek BASICS untuk memberikan kemudahan akses transportasi;
- ❖ Menyusun konsep kebijakan pemberian insentif bagi keluarga ibu hamil miskin;
- ❖ Mengimplementasikan pemberian insentif biaya transportasi.

Manfaat :

- ❖ Mampu menekan angkatan kematian ibu dan bayi baru lahir;
- ❖ Tersedianya dukungan moral kepada ibu hamil karena telah disediakan pendamping dari pihak keluarga selama proses persalinan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya kebijakan yang dapat menjadi landasan berjalannya pemberian insentif ini;
- ❖ Adanya dana yang cukup dari APBD;
- ❖ Adanya komitmen dari kepala daerah, DPRD dan seluruh jajarannya;
- ❖ Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: BASICS Praktik Cerdas

PROGRAM SUMIKOLAH KABUPEN MINAHASA UTARA

Produk inovasi	: Gerakan Menekan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Minahasa Utara
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora)
Penggagas	: Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Tahun inisiasi	: 2011
Tahun implementasi	: 2011
Kontak Person	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Komplek Perkantoran Bupati Jl. Arnold Mononutu Saroinsong Airmadidi Atas Lt. III; Telp/Fax. 0431- 893136

Deskripsi :



Program Sumikolah adalah sebuah gerakan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara untuk mengentaskan anak putus sekolah. Sumikolah merupakan bahasa Tombulu-Minahasa yang berarti “ke sekolah”. Penggunaan bahasa lokal dimaksudkan sebagai strategi membangkitkan harga diri orang Minahasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Gerakan Sumikolah sejalan dengan Program Nasional yaitu Wajib Belajar (Wajar) Sembilan tahun yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijamin oleh UU No. 20/2004 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No, 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Meskipun ada program sekolah gratis namun berdasarkan data BPS ditemukan tingginya tingkat anak putus sekolah

(SD/MI dan SMP/MTs) di Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini memotivasi Pemerintah Daerah untuk mengentaskan permasalahan tersebut.

Penyebab utama putus sekolah antara lain adalah : masalah ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya dukungan keluarga untuk melanjutkan sekolah dan situasi sekolah. Menyikapi hal tersebut dan sebagai bentuk komitmen bersama yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholders dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Minahasa Utara, diselenggarakan “Ikrar Pencanangan Gerakan Sumikolah”.

Program Sumikolah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Minahasa Utara serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sekolah dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Strategi yang dilakukan untuk program ini yaitu dengan melakukan pendataan melalui survey langsung ke masyarakat perlu dikembangkan pemerintah daerah dan menjadi satu bagian dari pendataan rutin yang dikembangkan Dinas Pendidikan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen kuat seluruh pihak seperti pimpinan daerah, orang tua, pihak sekolah dan pihak swasta serta masyarakat terkait dengan pembangunan SDM khususnya di bidang pendidikan;
- ❖ Adanya keinginan kuat dari anak-anak yang putus sekolah untuk mau belajar dan bersekolah kembali.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Faktor lingkungan masyarakat yang sebagian besar berada dalam masalah ekonomi;
- ❖ Motivasi anak didik yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan situasi sekolah;
- ❖ Kurangnya dukungan orang tua kepada anak putus sekolah untuk melanjutkan sekolah;
- ❖ Sosialisasi terkait program Sumikolah yang mungkin sangat sedikit dan tidak diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat;
- ❖ Orang tua menghimbau anaknya untuk cukup menamatkan SD atau putus sebelum menamatkan SMP;
- ❖ Masih kurangnya perhatian terhadap tenaga pendidik yang terlibat dalam gerakan Sumikolah.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pendataan Pendidikan;
Melengkapi pendataan reguler oleh Dikpora yang berdasarkan laporan rutin sekolah, sedangkan pendataan dalam program Sumikolah dilakukan melalui survey langsung ke masyarakat melalui kolaborasi Dikpora, OMS dan Dewan Pendidikan Kabupaten. Dalam proses ini selain dilakukan identifikasi dan verifikasi anak putus sekolah juga dilakukan penyadaran kepada orang tua dan anak akan pentingnya sekolah;
- ❖ Membangun Komitmen Pimpinan Daerah;
Merupakan langkah utama dalam pengelolaan program Sumikolah. Hasil pendataan pendidikan dijadikan bahan untuk meyakinkan pimpinan daerah untuk berkomitmen menangannya.
- ❖ Membangun Komitmen Orang Tua, Anak Putus Sekolah dan Pihak Sekolah;
Tim yang terdiri dari staf Dikpora, UPTD dan OMS melakukan kunjungan ke rumah anak-anak putus sekolah yang bertujuan untuk melakukan pendekatan pada keluarga atau orang tua/wali anak putus sekolah dan memberikan motivasi bagi anak untuk kembali bersekolah. Pada proses ini diupayakan ada kesepakatan bersama untuk anak kembali bersekolah melalui surat yang ditandatangani oleh orang tua, kepala sekolah, dan Kepala Desa/Lurah.
- ❖ Membangun Komitmen Pihak Swasta dan Masyarakat;

Guna memperoleh dan memperkuat dukungan dari pihak swasta ataupun kelompok masyarakat yang ingin berkontribusi menangani persoalan pendidikan umumnya dan anak putus sekolah khususnya, pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan pihak swasta.

- ❖ **Insentif bagi Keluarga Miskin;**
Salah satu alasan anak tidak bersekolah meskipun biaya sekolah gratis adalah karena tidak ada biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menyediakan insentif berupa perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang bersedia kembali ke sekolah, selain jaminan beasiswa.
- ❖ **Mengembangkan Unit Pelayanan Pendidikan Alternatif**
Memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Selain melaksanakan kegiatan belajar mengajar (kejar Pake A dan Paket B), PKBM juga memberikan pelatihan keterampilan bagi warga belajarnya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif
- ❖ **Monitoring**
Monitoring dilakukan secara berkala melibatkan pemerintah desa setempat, Dewan Pendidikan dan komite sekolah untuk mengetahui layanan sekolah, perkembangan PKBM, serta perkembangan anak yang telah kembali ke sekolah.
- ❖ **Penyusunan Kebijakan Daerah Terkait**
Dalam rangka keberlanjutan program Sumikolah ini, dipandang penting adanya kebijakan daerah yang dapat mendukung program dan anggaran rutin yang termuat dalam APBD dengan disusunnya Peraturan Bupati Minahasa Utara Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Putus Sekolah Pendidikan dasar.

Manfaat :

- ❖ Ketersediaan Data Pendidikan berbasis Masyarakat;
- ❖ Terbangunnya Komitmen yang kuat dari seluruh pihak : Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Anak Putus Sekolah serta Swasta dan Masyarakat;
- ❖ Kontribusi bagi beberapa indikator MDGs dan SPM Pendidikan Dasar untuk memperlancar program sumikolah.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya inisiatif yang dibangun dengan mendorong pelibatan aktif pimpinan daerah yang berdampak lebih luas bagi optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan;
- ❖ Melakukan pendekatan yang efektif memerlukan sinergi nyata berupa komitmen antar sejumlah pihak untuk bekerja bersama sesuai peran, minat, tanggungjawab dan rasa keadilan;
- ❖ Adanya dukungan kebijakan daerah untuk menjamin inisiatif/inovasi berkelanjutan;
- ❖ Adanya pelibatan instansi yang terkait dengan pendidikan dan lembaga sumberdaya manusia serta masyarakat.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku BASICS Responsive Initiative (BRI)

PROGRAM BASEKOLAH KOTA BITUNG

Produk inovasi	: Gerakan Pemerintah Kota Bitung dalam Mengembalikan Anak Putus Sekolah
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bitung
Penggagas	: Dinas Pendidikan, Kota Bitung
Tahun inisiasi	: 2011
Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bitung; Jl. Sam Ratulangi No. 45, Kota Bitung; Telp. 0438-21882, 31882. Fax. 21008

Deskripsi :



Program Basekolah merupakan program Pemerintah Kota Bitung dalam mengembalikan Anak Putus Sekolah untuk kembali bersekolah. Menyikapi masalah anak putus sekolah di Kota Bitung, Pemerintah Kota Bitung bekerjasama dengan BASICS mengambil beberapa langkah yang dikembangkan dengan tetap sinergi dengan program dan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program ini digalakkan sebagai dampak dari data yang dilansir oleh sebuah media lokal yang menyebutkan masih banyak ditemukan jumlah anak putus sekolah pendidikan dasar di Kota Bitung. Hal ini menggambarkan anomali dari kondisi nyata kemajuan kota Bitung dengan segudang penghargaan nasional maupun internasional atas berbagai prestasi pembangunan ternyata masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah. ironisnya bahkan terdapat sejumlah kelompok penduduk yang sama sekali tidak pernah bersekolah atau umumnya menjadi buta huruf.

Program Basekolah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kota Bitung serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sekolah dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Bitung. Strategi yang dilakukan untuk program ini adalah dengan melakukan pendataan secara langsung melalui survey langsung ke masyarakat perlu dikembangkan pemerintah daerah dan menjadi satu bagian dari pendataan rutin yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Pendekatan ini dinilai dapat mendorong peran para pihak di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan. Setelah itu pemerintah membuat kebijakan yang tepat untuk mendukung program serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sekolah dan tenaga pengajar yang ada. Pembentukan tim tugas juga dilakukan agar langsung bekerja pada masyarakat dalam melakukan pendataan dan melacak anak putus sekolah, melakukan edukasi dan penyadaran bagi anak putus sekolah, melakukan koordinasi dengan pihak di kelurahan. Penanganan anak putus sekolah tidak bisa semata-mata ditangani oleh sekolah dan dinas pendidikan, pendekatan persuasif dan kekeluargaan langsung pada keluarga anak putus sekolah juga dilakukan agar program ini menjadi lebih efektif.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya Komitmen kuat seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan SDM khususnya di bidang pendidikan antara lain: pimpinan daerah, orang tua, anak putus sekolah, pihak sekolah dan pihak swasta serta masyarakat;
- ❖ Adanya peraturan daerah yang mendukung penanganan anak putus sekolah seperti Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pedoman Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pendidikan Kecamatan (TPPK) periode tahun 2012-2015 bagi seluruh kecamatan di Kota Bitung sebagai teknis pelaksanaannya.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Faktor lingkungan masyarakat yang sebagian besar berada dalam masalah ekonomi;
- ❖ Motivasi anak didik yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan situasi sekolah;
- ❖ Kurangnya dukungan sebagian orang tua kepada anak putus sekolah untuk melanjutkan sekolah.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pembentukan Kebijakan Daerah untuk membangun komitmen pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama dalam menangani anak putus sekolah;
- ❖ Pembentukan Tim Kerja Daerah yang bertugas untuk melancarkan program Basekolah ini seperti:
 - Tim Kerja Pendidikan terdiri dari TPPK (Tim Pengembangan Pendidikan Kecamatan) dan BKR (Bina Keluarga Remaja). Kedua tim tersebut saling terkait dan memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi anak putus sekolah. TPPK bekerja dengan melibatkan para pihak pada tingkat kecamatan sementara BKR pada lingkup kelurahan. TPPK dibentuk melalui SK Kepala Dinas yang terdiri dari unsur UPTD Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pers dan pengusaha. Tugas utama tim ini adalah

mendukung pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan.

- Tim penanganan langsung kepada keluarga yang memiliki anak putus sekolah dikelola BKR. Tim ini terdiri dari kader-kader remaja serta didukung lurah, kepala lingkungan dan ketua RT. Tugas utama tim ini adalah memberikan konsultasi dan pembinaan pada anak putus sekolah dan orang tua yang bersangkutan, utamanya terfokus pada masalah mental-sosial yang mejadi penyebab utama putus sekolah.
- ❖ Penguatan Peran Sekolah mulai dari pendataan, penyelenggaraan kurikulum pendidikan, manajemen berbasis sekolah Pelatihan dan pertemuan bagi kepala sekolah, guru dan komite sekolah;
- ❖ Penguatan Tim Kerja Pendidikan (TPPK dan BKR) dengan membentuk kebijakan daerah yang menjamin keberadaanya serta memfasilitasi pembentukan tata kelola organisasi TPPK.

Manfaat :

- ❖ Peningkatan Kapasitas Sekolah sebagai fasilitas pengembangan sumberdaya manusia di kota Bitung;
- ❖ Peningkatan Alokasi Anggaran untuk mendukung program penanganan persoalan anak putus sekolah termasuk beasiswa anak putus sekolah dari keluarga miskin yang kembali sekolah dan mendukung TPPK;
- ❖ Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), tercatat telah cukup sukses mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah, tercatat 80 anak putus sekolah sudah kembali ke sekolah;
- ❖ Pelembagaan Tim Kerja Pendidikan di kelurahan dan kecamatan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya inisiatif dan komitmen pemerintah dari semua tingkatan untuk mengatasi permasalahan sumberdaya manusia umumnya, dan pendidikan khususnya;
- ❖ Adanya peran serta sekolah dan Dinas pendidikan untuk menangani permasalahan yang dialami oleh anak putus sekolah;
- ❖ Adanya pendekatan persuatif dan kekeluargaan langsung kepada keluarga anak sekolah dengan menjelaskan pentingnya pendidikan bagi masa depan;
- ❖ Adanya peran pemerintah daerah dalam memperkuat otonomi sekolah terkait pendataan anak putus sekolah, kurikulum dan manajemen berbasis sekolah sangat berkontribusi langsung pada upaya percepatan pencapaian SPM dan MDGs;
- ❖ Adanya dukungan dari organisasi masyarakat sipil yang fokus kepada bidang pendidikan dalam menekan anagka putus sekolah.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku BASICS Responsive Initiative (BRI)

PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG GARENDONG KOTA PAYAKUMBUH

Produk inovasi	: Penataan pasar tradisional dan sekaligus pemberdayaan pedagang garendong.
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: H. Josrizal Zain ;(walikota Payakumbuh)
Unit Pelaksana	: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh
Tahun inisiasi	: 2007 Tahun implementasi : 2007
Kontak Person	: Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Kabid Pengelolaan Pasar. Ketua LSM DIAN

Deskripsi :



Penataan pasar tradisional dan pemberdayaan pedagang garendong di kota Payakumbuh merupakan salah satu cara untuk mengakomodasi banyaknya pedagang yang ada dipasar Ibh yang sebelumnya dinilai tidak tertib. Pedagang garendong sendiri merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat Kota Payakumbuh untuk pedagang keliling yang menggunakan sepeda motor untuk berdagang berbagai kebutuhan sehari-hari, baik di kawasan dalam Kota Payakumbuh sampai ke kabupaten sekitar bahkan sampai ke perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Penataan dan pemberdayaan ini dilakukan karena ketersediaan lahan atau area tempat berdagang di lokasi Pasar Ibh sangat terbatas sementara pertumbuhan jumlah pedagang terutama PKL yang ingin berjualan di lokasi Pasar Ibh sangat tinggi. Selain dipenuhi oleh pedagang kaki lima, Pasar Ibh juga diramaikan oleh pedagang keliling (pedagang garendong).

Tahun 2002 komunitas pedagang garendong berjumlah sekitar 300-400 orang, dan terus bertambah.

Tujuan dilakukannya penataan pasar dan pemberdayaan pedagang ini adalah untuk menciptakan suasana pasar yang nyaman bagi pembeli dan pedagang yang saat itu dinilai tidak tertata rapih, dan membantu mereka meningkatkan usahanya melalui pinjaman modal melalui bank yang ditunjuk. Apalagi ternyata banyak diantara para pedagang garendong terilit hutang rentenir karena minimnya modal dan tingginya pembayaran kredit kendaraan (sepeda motor).

Pemerintah kota Payakumbuh melakukan sebuah strategi yang persuasif untuk membantu para pedagang untuk mau dilakukan penataan dan pemberdayaan. Penyuluhan terkait penentuan kesegaran produk, peningkatan kualitas barang pedagang dilakukan agar penghasilan mereka bisa jauh meningkat. Selain itu pinjaman modal juga ditawarkan untuk memajukan usaha para pedagang.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen yang kuat untuk memprioritaskan sektor informal sebagai salah satu penunjang pembangunan perekonomian Kota Payakumbuh;
- ❖ Adanya kerja sama antara pemerintah dan pemberi pinjaman modal untuk kepentingan usaha;
- ❖ Adanya program penguatan modal usaha melalui fasilitas pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif kecil, kredit dana bergulir dan lainnya;
- ❖ Antusiasme yang tinggi dari para pedagang untuk mau mengikuti program penyuluhan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Para pedagang garendong banyak yang ingin melakukan peminjaman secara pribadi, sedangkan lembaga perbankan/ koperasi mensyaratkan kepada para pedagang garendong untuk membentuk kelompok/group untuk menghindari macetnya pengembalian;
- ❖ Keinginan para pedagang yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Mensikapi hal tersebut pemerintah kota harus melakukan pendekatan persuasif serta adanya forum komunikasi antara pedagang pasar dengan pemerintah daerah.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Melakukan identifikasi pedagang kaki lima dan pedagang keliling;
- ❖ Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Asosiasi Pedagang Keliling atau Ikatan Pedagang Keliling Pasar Ibh Kota Payakumbuh;
- ❖ Meluncurkan program penguatan modal usaha melalui fasilitas pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif kecil dan bantuan kredit dana bergulir untuk 143 orang anggota pedagang garendong sebesar masing-masing satu juta rupiah;
- ❖ Melakukan pembinaan pedagang keliling (pedagang garendong) antara lain tentang peningkatan mutu dagangan yang higienis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, penataan pedagang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dan meningkatkan pengetahuan para pedagang bekerja sama dengan kepolisian tentang tertib berlalu-lintas;
- ❖ Penyediaan lokasi untuk fasilitas umum, seperti tempat beribadah, klinik kesehatan, wc umum, lokasi parkir,

tong sampah yang representatif serta fasilitas lain;

- ❖ Penempatan bidang pengelolaan pasar langsung di lokasi Pasar Ibhuh untuk memudahkan proses administrasi, perencanaan, pengawasan dan pengendalian pasar;
- ❖ Kerjasama dengan lembaga perbankan untuk pengadaan kendaraan bermotor bagi pedagang garendong.

Manfaat :

- ❖ Tersedianya jasa layanan antar alamat untuk berbagai jenis barang harian yang disediakan oleh para garendong, langsung ke alamat rumah konsumen sehingga. Tingkat kesegaran produk, harga dan kualitas barang di pasar;
- ❖ Memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang akan dibeli karena bisa memesan langsung untuk diantar esok harinya sehingga meminimasi waktu dan biaya para konsumen untuk datang langsung ke pasar dalam pembelian kebutuhan sehari-hari;
- ❖ Sebagai pengecer langsung, wadah promosi dan pemasaran dari produk pertanian dan home industri Kota Payakumbuh.
- ❖ Dijadikannya Kota Payakumbuh sebagai pusat studi banding pengelolaan pasar tradisional kota/kabupaten di Sumatera Barat, seperti Kota Padang Pariaman, Kota Surakarta, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Rokan Hilir.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen kuat serta leadership yang tinggi dari kepala daerah untuk memperhatikan sektor non informal sebagai bagian penting dalam pembangunan;
- ❖ Adanya aturan hukum yang melandasi untuk dipelajari oleh daerah lain (Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam);
- ❖ Adanya kerja sama antara pemerintah dan pemberi pinjaman modal untuk kepentingan usaha untuk program penguatan modal usaha;
- ❖ Disediaknya lokasi untuk fasilitas umum di area pasar;
- ❖ Menempatkan petugas pengelola pasar yang dapat memantau kondisi pasar.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi jilid 8

PENJAMINAN KEAMANAN PRODUK PANGAN MELALUI E-REGISTRATION BADAN POM RI

Produk inovasi	: Pelayanan pendaftaran produk pangan sebelum diedarkan dengan menggunakan sistem elektronik atau e-Registration
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI
Penggagas	: Badan POM RI
Tahun inisiasi	: 2012
Kontak Person	: Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI
	Tahun implementasi : 2012

Deskripsi :



Penjaminan keamanan produk pangan melalui e-Registration merupakan pelayanan berbasis internet yang merupakan perubahan pola pelayanan pendaftaran produk pangan sebelum diedarkan dari sebelumnya menggunakan cara-cara manual menjadi pelayanan pendaftaran dengan menggunakan sistem elektronik atau e-registration. Inovasi ini dilatar belakangi sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran dan pengetahuan memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk pangan secara tepat, benar dan aman dari sisi kesehatan. Kondisi tersebut dihadapkan pada serbuan berbagai produk pangan olahan bahkan sampai ke daerah terpencil. Survey kepuasan pelanggan yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan

terhadap penjaminan produk pangan sebelum beredar belum memuaskan (69,5%). E-Registration di gagas pada tanggal 1 Januari 2012 dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Maret 2012.

Tujuan e-Registration untuk meningkatkan pelayanan dalam hal pendaftaran produk pangan olah sebelum diedarkan agar lebih produktif, akuntabel, cepat dan profesional. Inovasi ini menerapkan pelayanan registrasi Obat dan Makanan Ceppatt (Cekatan, Efisien, Profesional, Pasti (waktu dan biaya), Akuntabel, Transparan dan Tanggap) Inovasi ini diawali dengan disusunnya standar kompetensi pegawai pada tahun 2010.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya dukungan kebijakan yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, PP No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Gizi Pangan, PP No. 48 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tariff PNBP;
- ❖ Adanya komitmen Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI untuk memberikan perlindungan keamanan bagi masyarakat terhadap mutu produk pangan yang tidak memenuhi standar;
- ❖ Adanya dukungan anggaran APBN serta dari pihak swasta (biaya pendaftaran);
- ❖ Adanya dukungan SDM yang terlatih dalam pengoperasian internet;
- ❖ Adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai panduan dan tatacara pendaftaran akun perusahaan maupun pendaftaran produk olahan pangan. Sosialisasi dilakukan melalui program pelatihan maupun website.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap makanan yang baik menurut kesehatan;
- ❖ Pola pikir pegawai bekerja dengan cara manual menjadi elektronik.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Inisiasi dari Badan POM RI diikuti dengan Soft Launching Master Plan e-Registration Pangan Olahan;
- ❖ Penyusunan standar kompetensi pegawai dan pelatihan;
- ❖ Implementasi sistem baru;
- ❖ Penerapan sistem pengawasan yang komprehensif;
- ❖ Monitoring dan Evaluasi.

Manfaat :

- ❖ Memberikan perlindungan keamanan pada masyarakat terhadap standar mutu pangan olahan;
- ❖ Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga maupun mutu produk pangan yang beredar dibuktikan dengan naiknya indeks kepuasan pelanggan dari 69,5% tahun 2010 menjadi 74,32% pada tahun 2012.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan kebijakan;
- ❖ Adanya dukungan anggaran;
- ❖ Adanya dukungan SDM melalui pelatihan khusus;
- ❖ Adanya sistim pengawasan;
- ❖ Adanya dukungan teknologi.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Pratik Baik inovasi pelayanan publik jilid 2

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN LOGISTIK BENCANA ALAM (SIMLOG) KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Produk inovasi	: Sistem Informasi Pengelolaan Logistik
Jenis Inovasi	: Metode
Unit Pelaksana	: Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penggagas	: Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia
Tahun inisiasi	: 2008
Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, http://www.hpli.org/bencana.php

Deskripsi :



Sistem Informasi Pengelolaan Logistik (SIMLOG) merupakan sistem pengelolaan persediaan barang habis pakai yang dapat memberikan kemudahan dalam mengelola data dan informasi logistik, menyediakan data logistik yang akurat untuk keperluan perencanaan kebutuhan barang, analisa kebutuhan dan distribusi, membantu kelancaran pekerjaan di bidang logistik, terutama dalam pembuatan laporan kebutuhan, distribusi barang. Distribusi Bantuan Logistik sendiri adalah suatu sistem penyaluran dan atau pembagian bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana dari daerah asal ke daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju. Latar belakangnya adalah Indonesia memiliki kerawanan bencana alam yang relatif banyak, adanya lempeng-lempeng tektonik di perairan Indonesia yang bergergak menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung berapi aktif serta patahan-patahan geologi yang merupakan zona rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor. Korban Bencana Alam menjadi salah satu program sebagai upaya mencegah dan melindungi seseorang/keluarga/kelompok dan atau masyarakat dari resiko.

Tujuan SIMLOG adalah membantu menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi yang dilaksanakan adalah membangun SIMLOG berbasis IT secara on-line. Pembangunan sistem dilakukan untuk menciptakan sistem penyaluran secara cepat, tepat dan akurat guna menghindari penyimpangan, melakukan ujicoba di beberapa wilayah serta menyusun perubahan SOP terkait prosedur pengelolaan logistik bencana alam.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Keinginan pimpinan untuk menerapkan sistem penyaluran secara cepat, tepat, akurat dan menghindari penyimpangan;
- ❖ Keinginan untuk mengkoordinasikan aktivitas tanggap darurat dan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Sistem itu sendiri (perangkat lunak, perangkat jaringan, manajemen pengelolaan saat implementasi dan petugas yang mengoperasikan sistem);
- ❖ Belum disusunnya SOP pemanfaatan SIMLOG penanggulangan bencana, akibatnya penyaluran bantuan menjadi kurang tepat sasaran, kurang tepat waktu, dan kurang tepat kebutuhan;
- ❖ Laporan pertanggungjawaban dibuat manual, yang akan sangat rentan serta rawan terhadap kemungkinan hilang atau tercecer;
- ❖ Pemanfaatan SIMLOG penanggulangan bencana masih belum bisa secara nasional dan masih belum mengakomodir kebutuhan untuk bencana mendadak diluar perhitungan;
- ❖ Sosialisasi penggunaan SIMLOG penanggulangan bencana masih belum menyeluruh karena masih seputar daerah yang dijadikan pilot project saja yaitu dinas/instansi sosial dari 27 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP);
- ❖ Perancangan dan Ujicoba Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Logistik (SIMLOG);
- ❖ Pengembangan sistem disesuaikan dengan kebutuhan terkini;
- ❖ Sosialisasi dan penerapan sistem aplikasi SIMLOG;
- ❖ Perencanaan anggaran pengembangan sistem aplikasi SIMLOG.

Manfaat :

- ❖ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan logistik kedaruratan ke kabupaten / kota dan hingga ke kelompok sasaran;
- ❖ Menghindari penyimpangan penggunaan logistik;
- ❖ Berkurangnya duplikasi data manajemen logistik penanggulangan bencana;
- ❖ Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap barang logistik;
- ❖ Tersedianya informasi secara lengkap dan actual kepada semua pihak yang terkait dengan unsure-unsur logistik penanggulangan bencana.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen yang kuat dari pihak pemerintah, lembaga bantuan sosial swasta dan juga masyarakat sebagai satu kesatuan;
- ❖ Perlu pemilihan yang tepat terhadap sistem yang digunakan, termasuk fitur, perangkat keras, dan perangkat ringan);
- ❖ Tersedianya anggaran untuk pengadaan sistem;
- ❖ Adanya SOP (penyesuaian manajemen yang bersifat konvensional menjadi berbasis teknologi;
- ❖ Adanya SDM pengelola sistem dan pelatihan penggunaan sistem.

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: SIMLOG Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM PROVINSI DKI JAKARTA

Produk inovasi	: Sistem Teknologi Informasi Transportasi
Unit Pelaksana	: Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Tahun inisiasi	: 2010
Tahun implementasi	: 2011
Kontak Person	: Dinas Perhubungan DKI Jakarta Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis lantai 16, Jakarta Pusat

Deskripsi :



Intelligent Transport System (ITS) adalah integrasi antar sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi, kendaraan dan pengguna jalan. Teknisnya adalah dengan mengelola dan menggunakan sumberdaya data yang dibagikan antara berbagai sistem pengelolaan informasi. Pengembangan sistem ini dilakukan akibat dari kemacetan di daerah ibu kota yang selalu menjadi penyakit kronis sejak awal tahun 1990-an, dengan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai solusi ditawarkan, namun tidak satupun berjalan efektif untuk mengatasinya, karena solusi yang ditawarkan (misal: jalur 3-in-1, jalur khusus bus, perbaikan jalan, dan pembangunan jalan tol) cenderung terpilah-pilah (parsial), tidak sistematis, dan tidak

kontinu. Sistem tersebut memadukan informasi dan fungsi manajemen lalu lintas untuk memudahkan kerjasama antara beberapa sistem. Untuk pengumpulan dan pengelolaan informasi yang standar ITS menggunakan 3 devices yaitu: CCTV, Auto Traffic Control System (ATCS) dan Camera Counting. ITS ini dimaksudkan untuk menangani traffic management di jalan-jalan ibukota dengan peralatan yang lebih modern. Tujuan dari ITS ini adalah agar kecepatan kendaraan di Jakarta bertambah dan mengurangi kemacetan dengan melakukan pengendalian langsung melalui sistem sehingga dapat memberikan jalan alternatif kepada pengguna jalan.

Strategi pengembangannya adalah dengan melakukan koordinasi dengan mitra kerja strategis dalam mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya ini, seperti Departemen Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian bidang lalu lintas darat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Jabodetabek. Dalam proses implementasi masyarakat diajak untuk terlibat dalam memberikan informasi lalu lintas sehingga dapat diberikan alternatif arus yang dapat dilalui. Sistem ini dapat diakses di <http://itsjakarta.com/>

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pimpinan dan jajarannya untuk mengadakan perubahan;
- ❖ Keinginan pemerintah dan masyarakat untuk dapat menikmati kelancaran lalu lintas di wilayah DKI Jakarta;
- ❖ Koordinasi yang baik dan intensif dengan mitra kerja strategis dalam mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya ini, seperti Departemen Perhubungan, Kepolisian bidang lalu lintas darat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Jabodetabek.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Keterbatasan masyarakat untuk mengakses sistem teknologi informasi;
- ❖ Persoalan teknis pelaksanaan yang masih dalam proses adaptasi.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen untuk bekerjasama dari mitra kerja strategis dalam mengatasi kemacetan di Jakarta;
- ❖ Memasukkan program kedalam arah kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta;
- ❖ Perancangan konten program "Intelligent Transport System";
- ❖ Penyediaan regulasi dan anggaran untuk pengadaan sistem beserta implementasi dan perawatannya;
- ❖ Pengembangan program "Intelligent Transport System" meliputi alur kerja beserta manajemen, mapping sistem dan database sistem yang disesuaikan kebutuhan pemantauan lalu lintas;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi pegawai pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem "Intelligent Transport System";
- ❖ Internalisasi "Intelligent Transport System" kepada seluruh stakeholders dan masyarakat;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem "Intelligent Transport System" agar berkesinambungan.

Manfaat :

- ❖ Mengintegrasikan pengguna jalan, sistem transportasi, dan kendaraan melalui sistem informasi dan teknologi komunikasi;
- ❖ Membantu sistem transportasi secara keseluruhan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
- ❖ Memberikan informasi awal kepada masyarakat tentang jalur alternatif yang dapat dilalui saat terjadi kemacetan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen untuk bekerjasama dari mitra kerja strategis dalam mengatasi kemacetan;
- ❖ Penyediaan regulasi dan anggaran untuk pengadaan sistem beserta implementasi dan perawatannya;
- ❖ Pengembangan sistem meliputi alur kerja beserta manajemennya, mapping sistem dan database sistem yang disesuaikan kebutuhan pemantauan lalu lintas;
- ❖ Menyusun standar operasional prosedur (SOP) bagi pegawai yang akan mengoperasikan sistem secara simultan;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi pegawai pengelola sistem;
- ❖ Sosialisasi yang terpadu keseluruhan pihak yang terlibat dan berkepentingan (Dinas dan instansi) termasuk masyarakat.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Pencarian melalui internet terutama <http://itsjakarta.com/>

PERBAIKAN TATA KELOLA PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA

Produk inovasi	: Distribusi Guru PNS Proporsional (DGP)
Jenis Inovasi	: Metode
Penggagas	: Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan LSM Lokal, Kinerja USAID dan Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI)
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 0411-545 692

Deskripsi :



Distribusi Guru PNS Proporsional DGP merupakan pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kecamatan, antar kabupaten, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Selain itu juga untuk menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Tujuan DGP antara lain : 1) tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pendidikan yang berkualitas, akuntabel dan transparan, 2) peningkatan SPM Pendidikan dan perbaikan layanan melalui PBM berkualitas secara kontinu dan berkelanjutan, dan 3) mendorong partisipasi publik melalui FMS dan Warung Demokrasi dari tahap perencanaan hingga monev. Program DGP ini dilatarbelakangi ada kesenjangan besar dalam distribusi

kelas dan guru mata pelajaran. Data menunjukkan bahwa hanya 47% dari 259 sekolah dasar di Kabupaten Luwu Utara yang memiliki cukup guru kelas PNS. Melihat kenyataan seperti itu dibutuhkan suatu upaya untuk membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara desa dan kota dan akan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil yaitu dengan Distribusi Guru PNS Proporsional (GDP).

Strategi pelaksanaan DGP, antara lain : penguatan organisasi masyarakat sipil, pembentukan dan penguatan Forum Multi Stakeholder (FMS), Pembentukan tim teknis di lingkungan Pemda, advokasi kebijakan oleh tim teknis dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh FMS.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan DGP secara berkelanjutan;
- ❖ Dukungan politik dari badan legislatif untuk menjamin tersedianya anggaran dan regulasi;
- ❖ Peningkatan kapasitas Forum Multi Stakeholders (FMS) dalam melakukan pengawasan berkelanjutan;
- ❖ Pembahasan kebijakan secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan;
- ❖ Adanya kepedulian terhadap pengelolaan data;
- ❖ Adanya media independen dalam peranan pengawasan publik.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Keberatan dari guru didistribusi karena menganggap bahwa redistribusi adalah suatu bentuk hukuman;
- ❖ Validitas data dan ketersediaan data di berbagai lokasi yang memperumit analisis masalah;
- ❖ Lemahnya keterampilan organisasi dan masyarakat sipil untuk melakukan advokasi kebijakan.

Tahapan Proses Inovasi :

- | | |
|---|--|
| ❖ Pembentukan Tim Teknis DGP; | ❖ Pembentukan Tim Implementasi; |
| ❖ Pendataan dan Perhitungan PTK bersama Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI); | ❖ Usulan Mutasi Guru oleh UPTD; |
| ❖ Pembentukan Forum Multi Stakeholders (FMS); | ❖ SK Mutasi DGP oleh BKDD; |
| ❖ Penyusunan PERBUP dan JUKNIS DGP; | ❖ Monev oleh DISDIK dan pemberian biaya transport bagi Guru DGP; |
| ❖ Sosialisasi, Diskusi Rutin dan Dialog Live; | ❖ Monitoring dan Evaluasi oleh FMS. |

Manfaat :

PEMDA

- | | |
|--|--|
| ❖ Ketersediaan data dan analisis distribusi guru | ❖ SPM yang diwajibkan secara nasional dapat tercapai |
| ❖ Peningkatan kapasitas pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dalam pengelolaan dan analisis data | ❖ Memperbaiki kepercayaan publik |
| ❖ Peningkatan efektivitas pengelolaan guru | |

GURU

- | | |
|--|---|
| ❖ Pemenuhan jam mengajar liner | ❖ Meningkatnya pengetahuan tentang kebijakan pendidikan |
| ❖ Kesempatan mengembangkan karir | |
| ❖ Meningkatnya kesejahteraan/Sertifikasi | |

SEKOLAH

Pemenuhan SPM dan PBM dengan guru-guru yang kompeten di semua kelas
SISWA dan MASYARAKAT

- ❖ Pelayanan pendidikan berkualitas lebih mudah diperoleh oleh masyarakat yang lebih luas
- ❖ Melalui Forum Multi Stakeholder, masyarakat dapat menyuarakan keprihatinan mereka dan melakukan pengawasan

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan DGP secara berkelanjutan;
- ❖ Adanya pembahasan kebijakan secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan;
- ❖ Adanya pembentukan tim kerja yang jelas;
- ❖ Pengelolaan data dilakukan dengan serius;
- ❖ Adanya pengawasan terhadap program yang dijalankan;
- ❖ Sosialisasi, Diskusi Rutin dan Dialog Live dilakukan secara rutin.

Teknik Validasi : Publikasi/Presentasi

Sumber : Paparan Bupati Luwu Utara dalam Simposium Inovasi Pelayanan Publik, 17 Juni 2014.



KELOMPOK *INOVASI* *PRODUK*

Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut. Ruang lingkup dari inovasi produk adalah produk yang dapat berupa fisik (barang) maupun non-fisik atau imaterial (jasa).

MENDEKATKAN PELAYANAN PEMBUATAN SIM PADA MASYARAKAT POLDA METRO JAYA

Produk inovasi	: Pelayanan pembuatan SIM
Jenis Inovasi	: Produk
Unit Pelaksana	: Satuan Pelaksana Administrasi (Satpas) SIM Polda Metro Jaya
Penggagas	: Polda Metro Jaya
Tahun inisiasi	: 2002
Kontak Person	: Satuan Pelaksana Administrasi (Satpas)SIM Polda Metro Jaya
	Tahun implementasi : 2002

Deskripsi :



Mendekatkan Pelayanan Pembuatan SIM pada Masyarakat merupakan terobosan pelayanan yang dilakukan oleh Satpas SIM untuk membuat pelayanan semakin baik dan mendekatkan pelayanan SIM pada Masyarakat. Terobosan ini dilatar belakangi oleh waktu pembuatan SIM yang relatif lama, pemusatan pelayanan, juga terjadinya praktek percaloan pembuatan SIM. Inovasi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses lokasi dan menurunkan waktu proses pembuatan SIM, serta menghilangkan praktek percaloan pembuatan SIM.

Strategi yang dilakukan adalah dengan membuka pelayanan pembuatan SIM di lima wilayah DKI Jakarta, menyediakan fasilitas SIM keliling di lima wilayah DKI Jakarta, Gerai SIM, standarisasi waktu pelayanan pembuatan SIM, SIM komunitas, banking system, online system, komputerisasi ujian SIM, penggunaan access card, program bimbingan, dan aplikasi komputer database. Selain strategi tersebut Satpas SIM membuat lingkungan kantor nyaman mungkin seperti menyediakan ruang pengaduan, ruang bermain, ruang menyusui, ruang perpustakaan, fasilitas ibadah, tempat parkir kendaraan yang luas.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya kerjasama dengan pihak perbankan dalam proses pembayaran;
- ❖ Adanya sistem komputerisasi dalam tes teori ujian tertulis SIM;
- ❖ Adanya penyediaan bahan soal online untuk sebagai latihan sebelum tes;
- ❖ Tersedianya fasilitas pelayanan yang nyaman untuk masyarakat;
- ❖ Tersedianya anggaran yang memadai (PNBP).

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM sistem online;
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan jasa percaloan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya kebijakan terkait dengan pembuatan dan perpanjangan SIM;
- ❖ Pelibatan pihak internal Polda Metro Jaya, para ahli, dan akademisi dalam pembuatan inovasi pelayanan;
- ❖ Pelibatan perbankan, asuransi, kedokteran, psikolog, Pemda, dan Pusat perbelanjaan dalam pelaksanaan inovasi;
- ❖ Pelatihan teknis termasuk komunikasi pelayanan bagi para petugas serta pengoperasian komputer dan aplikasinya;
- ❖ Uji kompetensi para penguji SIM secara berkala pada setiap tahun;
- ❖ Monitoring dan evaluasi.

Manfaat :

- ❖ Waktu proses pembuatan dan perpanjangan SIM menjadi lebih cepat;
- ❖ Proses penerbitan dengan sistem online lebih cepat, mudah dan sederhana;
- ❖ Objektifitas lebih baik dan akurat;
- ❖ Untuk pelaksanaan ujian teori tidak perlu menunggu jadwal lebih lama;
- ❖ Tidak lagi ada percaloan;
- ❖ Adanya alternatif lokasi pelayanan dalam pembuatan dan perpanjangan SIM;
- ❖ Sistem satu pintu.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya inisiasi dan komitmen untuk melakukan perubahan dalam pelayanan;
- ❖ Adanya kebijakan yang mendukung proses dan pelaksanaan terobosan pelayanan;
- ❖ Adanya anggaran yang memadai untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pelayanan (Software dan Hard Ware);
- ❖ Adanya SDM yang memadai yang dilakukan melalui proses pelatihan;
- ❖ Kerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain Perbankan, Asuransi, Pemda, Pengembang Sistem;
- ❖ Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Pratik Baik inovasi pelayanan publik jilid 2 dan presentasi saat FGD Direktori Inovasi

**PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
 PUSKESMAS SUMOBITO MELALUI “ARISAN BERENCANA”
 KABUPATEN JOMBANG**

Produk inovasi	: Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jenis Inovasi	: Produk
Penggagas	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang saat itu, dr. Hari Wibowo
Unit Pelaksana	: Puskesmas Sumobito, Kabupaten Jombang
Tahun inisiasi	: 2010
Tahun implementasi	: 2010
Kontak Person	: Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang

Deskripsi :



Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PSTBM) melalui arisan berencana merupakan program perbaikan sanitasi (jamban) bersifat lintas sektor dengan mengubah perilaku sehat melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode penarikan iuran 1000 rupiah / hari. Arisan jamban 1000 rupiah / hari diikuti oleh semua kepala keluarga baik yang telah memiliki jamban sehat maupun belum, dengan prioritas yang belum memiliki jamban sehat dapat arisan terlebih dahulu berupa pilihan paket jamban sehat, sedangkan yang telah memiliki jamban dapat digunakan untuk memperbaiki kamar mandi atau kebutuhan sanitasi lainnya.

Program ini dipicu oleh banyak keluarga yang belum memiliki fasilitas MCK sendiri dirumah yang berdampak negatif bagi kesehatan (mencemari air sungai, bisa menularkan penyakit dll). Adapun tujuan program ini antara lain untuk mengubah pola pikir dan menggugah kesadaran

masyarakat untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut dengan cara mewujudkan masyarakat sehat melalui kepemilikan MCK yang layak.

Untuk mewujudkan program ini, diawali menunjuk kader yang dipercaya untuk mengumpulkan uang arisan (voting) dari setiap kelompok dasawisma yang terdiri dari 10 rumah. Masing-masing puskesmas melakukan pendataan jamban tidak sehat dan rapat koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan dan ditindaklanjuti rapat koordinasi tingkat kabupaten untuk mewujudkan komitmen pengambilan kebijakan tingkat kabupaten dalam mendukung program STBM.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang suka buang hajat disembarang tempat melalui perbaikan sanitasi;
- ❖ Adanya komitmen bersama untuk mengubah perilaku kesehatan masyarakat yang suka buang air besar di sembarang tempat;
- ❖ Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan SKPD terkait dalam mewujudkan program perbaikan sanitasi;
- ❖ Adanya kesediaan puskesmas untuk melakukan program sanitasi ini melalui pendekatan arisan berencana dengan iuran 1000 rupiah hari;
- ❖ Adanya kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku membuang hajat di sembarang tempat dan pentingnya membangun sanitasi di masing-masing unit kepala keluarga;

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Keterbatasan jumlah SDM sanitarian di masing-masing puskesmas untuk mengawasi program ini;
- ❖ Keterbatasan biaya operasional;
- ❖ Tantangan dan hambatan yang datang dari masyarakat sendiri yang merasa bahwa program STBM tidak penting, dan mereka memprovokasi warga lain untuk tidak mendukung arisan jamban.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk memulai program STBM di tingkat Kabupaten melalui pendataan jamban tidak sehat, rapat koordinasi tingkat kabupaten, rapat koordinasi lintas sektor tingkat kecamatan, stakeholder meeting, monitoring dan evaluasi oleh tim fasilitator kabupaten dan puskesmas;
- ❖ Empat orang fasilitator membantu Puskesmas secara teknis;
- ❖ Menindaklanjuti kesepakatan arisan berencana Rp. 1.000 per hari.

Manfaat :

- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat;
- ❖ Menurunkan kasus penyakit se-Kabupaten Jombang;
- ❖ Masyarakat dapat memiliki jamban yang sehat.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen kepala daerah beserta para jajarannya untuk mensukseskan program;
- ❖ Membangun koordinasi yang baik antar stakeholder terkait;
- ❖ Menyiapkan anggaran untuk pendampingan perbaikan program sanitasi;
- ❖ Menyiapkan SDM sanitarian sebagai fasilitator STBM di masing-masing puskesmas;
- ❖ Melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perbaikan program sanitasi;
- ❖ Meyakinkan masyarakat bahwa arisan berencana untuk membiayai perbaikan sanitasi setiap unit kepala keluarga sangat bermanfaat dan konkret.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah, KemenPAN-RB, 2013

PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN KOTA BANJARMASIN

Produk inovasi	: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kota Banjarmasin	
Jenis Inovasi	: Produk	
Penggagas	: WaliKota Banjarmasin Ahmad Yudhi Wahyuni Usman	
Unit Pelaksana	: PD PAL Kota Banjarmasin	
Tahun inisiasi	: 2005	Tahun implementasi : 2005
Kontak Person	: Direktur PD PAL Banjarmasin ;Telp./Fax ;; 0511-3271940/ 0511-3252883	

Deskripsi :



Pengolahan air limbah di kota Banjarmasin merupakan pemilihan sasaran/target pembangunan karena kekhawatiran semakin menurunnya kondisi dan daya dukung lingkungan akibat kepadatan penduduk di kota Banjarmasin. Seluruh aktivitas di kota Banjarmasin sehari-hari bertumpu di sungai, mulai dari mandi, cuci sampai kakus. Di samping itu, fungsi sungai yang menguat saat musim kemarau, air menjadi payau akibat masuknya air laut ke darat. Air cucian (mandi, cuci) 99% belum dikelola, ada yang dibuang ke sungai, dan yang lainnya dibuang sembarang (umumnya dibawah kolong rumah), sisanya 1% berada pada kawasan pelayanan IPAL (off site). Dengan demikian sungai-sungai di Banjarmasin memiliki tingkat pencemaran yang sangat tinggi terhadap bakteri e-coli, yakni 16.000 ppm padahal standard baku mutu air adalah 30 ppm.

Program ini bertujuan untuk mengatasi pencemaran air limbah yang diwujudkan dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Pembangunan IPAL tidak hanya ditujukan padapenduduk miskin tapi juga pada penduduk yang mampu membayar. IPAL menggunakan teknologi RBC (Rotating Biological Contactor) yaitu teknologi yang dapat mengolah air limbah menjadi (effluent) yang memenuhi standar baku mutu air yang diijinkan. Untuk menjalankan proses IPAL, dilakukan integrasi dan koordinasi program pengolahan air limbah antara Dinas Pekerjaan Umum dan PD PAL.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya keinginan pemkot untuk mengatasi pencemaran air limbah;
- ❖ Tingginya tingkat polusi pencemaran air yang disebabkan limbah tinja ataupun limbah cair lainnya;
- ❖ Adanya integrasi dan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan PD PAL untuk mengelola IPAL;
- ❖ Banyaknya jumlah penduduk yang membutuhkan air bersih.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Budaya masyarakat yang melakukan kegiatan mulai dari mandi, cuci sampai kakus disungai yang sangat mengakar kuat;
- ❖ Pengetahuan masyarakat yang kurang terkait pengelolaan air limbah rumah tangga;
- ❖ Besarnya nilai investasi dalam pembangunan sistem terpusat menyebabkan pengembangannya dilakukan bertahap;
- ❖ Memberikan pemahaman dan mengubah mindset memerlukan waktu dan cara-cara pendekatan yang bersifat individual;
- ❖ Kurangnya prasarana pendukung;
- ❖ Ketersediaan listrik yang seringkali tidak mencukupi.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Penyusunan Strategi Sanitasi Kota;
- ❖ Penyusunan Masterplan Pengolahan Air Limbah;
- ❖ Penyusunan RPJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Pengolahan Air Limbah;
- ❖ Pembentukan POKJA Sanitasi;
- ❖ Penetapan SK Walikota No. 151/2000 tentang penguatan kelembagaan, percepatan, penyehatan lingkungan dan peningkatan pelayanan yang optimal;
- ❖ Penetapan Perda No. 3/2006 mengenai pembentukan PD PAL;
- ❖ Melakukan pengolahan lanjutan terhadap limbah yang dihasilkan untuk keperluan pembuatan pupuk organik;
- ❖ Melakukan sosialisasi secara kontinyu yang aktif dalam pokja sanitasi tingkat nasional.

Manfaat :

- ❖ Terjadinya perubahan mindset masyarakat terkait dengan budaya membuang limbah rumah tangga ke sungai;
- ❖ Berkurangnya tingkat polusi limbah rumah tangga yang berada di sungai;
- ❖ Meningkatnya target pelayanan PD PAL Banjarmasin pada daerahberpotensi pelanggan yang relatif tinggi;
- ❖ Air hasil olahan tinja dan lindi sampah yang dihasilkan dari IPLTL sudah bisa dialirkan dan dibuang langsung ke sungai karena sudah memenuhi standar baku mutu;

- ❖ Limbah tinja dan lindi sampah dimanfaatkan menjadi pupuk organik dengan kisaran harga Rp. 2000- Rp.2.500/ karung. Walau belum bisa memberikan pendapatan bagi kas daerah namun sudah bisa menciptakan efisiensi anggaran daerah untuk pemeliharaan taman kota;
- ❖ Dari sisi lingkungan dan tata ruang secara bertahap mengalami perubahan dan tertata rapih;
- ❖ Pemilik hotel dan perdagangan sudah tidak bingung memikirkan pembuangan limbah tinja ataupun limbah cair lainnya;
- ❖ Diterimanya penghargaan City Summit 2009 di Surakarta atas keberhasilan dalam pengolahan limbah rumah tangga.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah dalam pengelolaan air limbah untuk memperbaiki lingkungan;
- ❖ Program pengelolaan air limbah dituangkan dalam RPJMD;
- ❖ Menerapkan teknologi RBC yang telah dikembangkan;
- ❖ Adanya koordinasi yang baik antara dinas Pekerjaan Umum dan PDAM untuk mengelola program;
- ❖ Adanya sosialisasi yang terus menerus, sehingga mendapat dukungan dari masyarakat luas.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi 5

PALEMBANG KOTA *CLEAN, GREEN* DAN *BLUE*

KOTA PALEMBANG

Produk inovasi	: Clean Air , Clean Water , Clean and Green Land
Jenis Inovasi	: Produk
Penggagas	: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang – Ir. H. KMS. Abubakar,MM
Unit Pelaksana	: Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang
Tahun inisiasi	: 2006
Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Kepala Badan Lingkungan Hidup– Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah BLH 0711-31015

Deskripsi :



Clean Air : Program bank pohon, kendaraan ramah lingkungan, Larangan penggunaan CFC melalui Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 tahun 2009, upaya hemat energi melalui penggantian lampu LED dan penerapan energi surya sebagai pengganti energi PLN

Clean Water : Pengendalian limbah pabrik melalui metode lumpur aktif, Pemantauan kualitas udara ambient, Program Kali Bersih (Prokasih). **Clean and Green Land** : kegiatan pembuatan pupuk organik, program kampung ramah lingkungan, penataan perkotaan melalui dana swadaya, mengelola CSR .

Kondisi geografis kota Palembang yang tepat di sekitar muara Sungai Musi membuat Palembang menjadi pemasok buangan dari hulu sungai dan berakibat rusaknya ekosistem sungai di kotatersebut. Kota Palembang

menyandang predikat kota terkotor di Indonesia pada tahun 2006 menurut Badan Lingkungan Hidup. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pembenahan di bidang lingkungan melalui program Clean, Green dan Blue dengan langkah Clean Air, Clean Water, Clean and Green Land.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Kesadaran dari seluruh jajaran BLH untuk melaksanakan program;
- ❖ Adanya kerjasama SKPD dan bantuan Pemerintah untuk keberlangsungan program;
- ❖ Penuangan Moto Palembang Clean Air, Clean Water dan Clean and Green Land 2013 dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Palembang.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM di lingkungan Badan Lingkungan Hidup kota Palembang;
- ❖ Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kualitas hidup;
- ❖ Masih adanya masyarakat yang belum memahami secara benar tentang pentingnya fungsi dan pemeliharaan lingkungan;
- ❖ Masih banyaknya pihak swasta yang belum menyadari sepenuhnya bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan hidup.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiatif melakukan perubahan;
- ❖ Badan Lingkungan Hidup (BLH) pro aktif membenahi masalah lingkungan dan melakukan identifikasi masalah untuk memenangkan piala adipura;
- ❖ BLH merangkul SKPD untuk bekerja sama melakukan pembenahan masalah lingkungan yang didukung oleh Wali Kota Palembang;
- ❖ Pemkot Palembang mengeluarkan sejumlah peraturan daerah untuk mempertegas komitmen terkait masalah lingkungan;
- ❖ Menerapkan strategi Clean Air, Clean Water, dan Clean and Green Land.

Manfaat :

- ❖ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota Palembang dengan adanya ruang terbuka hijau lebih kurang 30% atau setara dengan 520 Ha;
- ❖ Adanya peran masyarakat yang sangat menonjol dalam program pelestarian lingkungan seperti Kampung Ramah Lingkungan (KRL);
- ❖ Adanya program susulan yang berawal dari program Palembang Clean, Green, and Blue.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya niat kuat dan dukungan sepenuhnya dari semua pihak untuk mensukseskan suatu program;
- ❖ Adanya dukungan kebijakan untuk mempertegas komitmen yang telah dicanangkan;
- ❖ Adanya strategi yang tepat dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan program.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi Jilid 6

REVITALISASI KAWASAN KOTA LAMA KOTA SAWAHLUNTO

Produk inovasi	: Kota Wisata Tambang Sawahlunto
Jenis Inovasi	: Produk
Unit Pelaksana	: Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Pemkot Sawahlunto
Penggagas	: Walikota Subari Sukardi (2001) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun inisiasi	: 2001
Tahun implementasi	: 2003
Kontak Person	: Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, Jl. Abdulrahman Hakim No. 1, Kota Sawahlunto Telp.0754-61985

Deskripsi :



Revitalisasi kawasan kota lama Sawahlunto merupakan program pemerintah kota untuk mengubah citra kota sawahlunto dari kota pertambangan baru bara menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Revitalisasi kawasan kota lama bertujuan untuk membangkitkan kembali perekonomian kota Sawahlunto yang terpuruk akibat penutupan perusahaan tambang batu bara PT Bukit Asam yang mengalami kerugian. Sawahlunto dahulu merupakan daerah yang dikelilingi oleh alam yang indah dan memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya batubara. sejarah Sawahlunto yang tidak bisa dilepaskan dari tambang batu bara dan karena sangat bergantungnya pada batu bara sebagai urat nadi perekonomian. Penutupan PT. Bukit Asam ini memberi dampak kepada perekonomian, masyarakat setempat merasa terpukul, perekonomian

mereka goncang. Dengan berbekal alam yang indah, fasilitas dan gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda yang dianggap menjadi koleksi bangunan histori, maka pemerintah kota berinisiatif merubah citra.

Strategi yang dilakukan untuk revitalisasi kawasan kota adalah dengan menerbitkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Sawahlunto. Visi dan Misi Kota Sawahlunto saat itu adalah “ Mewujudkan Sawahlunto tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya”. Dengan begitu disusunlah buku Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) dengan menggandeng Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPM-ITB) untuk mewujudkannya. Selain itu ada University of Malaka Malaysia pada tahun 2004 dan Dirjen Cipta Karya-Kementerian PU pada tahun 2004. Walikota terpilih tahun 2003 Amran Nur, mengkonkritkan langkah tersebut dengan melakukan serangkaian program revitalisasi fasilitas dan gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda untuk menjadi museum atau cagar budaya yang menarik. Pemkot ikut melibatkan lembaga/ organisasi kebudayaan seperti Badan Warisan Sumatera Barat (BWSB), Program Pengiriman Manajer Belanda (PUM : Programma Uitzending Managers) untuk membantu mendata dan menginventarisir bangunan tua yang ada di Sawahlunto. Beberapa SKPD juga ikut andil dalam program tersebut.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Letak Geografis dari Kota Sawahlunto yang dikelilingi oleh alam yang indah dan koleksi peninggalan fasilitas dan gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda;
- ❖ Komitmen Pemerintah daerah untuk mencari sumber daya ekonomi utama yang baru;
- ❖ Konsolidasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan dibentuknya tim yang terdiri dari SKPD Kota Sawahlunto, kecamatan, kelurahan dan juga melibatkan peran aktif dari masyarakat luas;
- ❖ Kerjasama yang baik dengan lembaga swasta di bidang pariwisata dan cagar budaya.

Faktor Penghambat Inovasi :

Dukungan dari masyarakat karena lebih memilih menutup usahanya dan pulang kampung saat liburan padahal hari itulah para wisatawan berkunjung ke Sawahlunto.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Melakukan kajian tentang upaya peningkatan dan perbaikan kawasan kota lama (Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Warisan Sumatera Barat (BWSB) dan Programma Uitzending Managers (PUM) Belanda pada tahun 2003, University of Malaka Malaysia pada tahun 2004 sekaligus mengirimkan para tokoh masyarakat untuk belajar, dan Dirjen Cipta Karya-Kementerian PU pada tahun 2004);
- ❖ Sosialisasi Program (Melakukan sosialisasi program kepada masyarakat secara terus menerus melalui berbagai media yang ada di Sawahlunto.);
- ❖ Melakukan Pelatihan, Lokakarya dan Workshop mengenai pentingnya revitalisasi kota kepada jajaran aparat Pemkot;
- ❖ Studi Banding dan Benchmark tentang revitalisasi bagi pegawai Pemkot khususnya bidang perencanaan dan teknis ke kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri;
- ❖ Melakukan inventarisasi program-program terkait dengan penataan dan pelestarian fasilitas dan koleksi cagar budaya.

Manfaat :

- ❖ Adanya sumber daya ekonomi utama yang baru dengan melihat pada potensi yang menjadi ciri khas daerah kemudian dikemas untuk dijadikan sebagai daya tarik daerah;
- ❖ Pengembangan potensi wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
- ❖ Aktivitas kota yang hampir mati menjadi hidup dan ramai kembali.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen pimpinan daerah dan DPRD untuk menjaga, memelihara dan terus mengembangkan potensi kota dan dukungan anggaran terhadap program-program yang ada;
- ❖ Peran serta aktif dari masyarakat luas;
- ❖ Peran serta swasta dalam memfasilitasi perbaikan tata kota.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi yang tersedia online

KARTU INSENTIF ANAK KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Modernisasi KIA dan Sistem Relasi Catatan Kelahiran
Jenis Inovasi	: Produk
Penggagas	: Wali Kota Surakarta: Ir. H. Joko Widodo
Unit Pelaksana	: Dukcapil Bagian Bidang data dan Statistik Kota surakarta
Tahun inisiasi	: 2008
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Bagian Bidang data dan Statistik Dukcapil . Website : disdukcapilSurakarta .co.id

Deskripsi :



Kartu Incentif Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak di Surakarta yang berumur 0-18 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selama ini hak anak sebagaimana diamanatkan konvensi PBB dan UU No. 23 Tahun 2002 belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan KIA adalah 1) memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak, 2) untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuat akta kelahiran bagi anaknya, 3) untuk memberikan

jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.

KIA memberikan kemudahan dan layanan bagi anak anak di kota Surakarta di bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, olah raga, transportasi. Setiap anak yang memiliki KIA dapat memperoleh potongan harga pada sejumlah fasilitas yang telah bekerjasama dengan pemerintah kota Surakarta. Penerapan KIA diintegrasikan dengan pelayanan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKC) Kota Surakarta sebagai bagian dari penerapan kota layak anak.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Goodwill pemerintah kota Surakarta (dalam rangka mendukung program Kota Layak Anak yang targetnya tahun 2015) sehingga program ini banyak didukung;
- ❖ Adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan anak-anak;
- ❖ Adanya keinginan untuk mempercepat kenaikan cakupan kepemilikan kartu akte kelahiran.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Kurangnya respon dari masyarakat untuk mendaftarkan anaknya untuk memperoleh kartu ini;
- ❖ Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait implementasi KIA ini;
- ❖ Pemerintah mengalami kesulitan untuk mengembangkan jaringan stakeholder yang mau ikut bergabung dalam memfasilitasi anak.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Inisiasi dilakukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil;
- ❖ Diterbitkannya Peraturan Walikota Surakarta terkait MoU kerjasama antara stakeholder dan walikota;
- ❖ Mempersiapkan anggaran melalui perencanaan program;
- ❖ Melakukan kerjasama dengan stakeholder melalui penandatanganan MOU;
- ❖ Mengintegrasikan data pemegang KIA dengan data kependudukan catatan sipil;
- ❖ Membuat sistem aplikasi yang dapat menghubungkan KIA dengan database fasilitas yang didapatkan;
- ❖ Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai kota Surakarta dan masyarakat mengenai program KIA;
- ❖ Melakukan penambahan dan perawatan fasilitas yang bisa didapatkan pemegang KIA.

Manfaat :

- ❖ Meningkatnya jumlah kepemilikan akte kelahiran (93,6% pada tahun 2013);
- ❖ Meningkatnya tambahan pendapatan stakeholder;
- ❖ Meningkatnya jumlah stakeholder yang ikut bergabung dalam program KIA (dari 11 menjadi 45 stakeholder)

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kepentingan anak;
- ❖ Mempersiapkan anggaran dengan perencanaan program yang jelas;
- ❖ Mempersiapkan sistem aplikasi database peserta dengan stakeholder;
- ❖ Kolaborasi dengan stakeholder.

Teknik Validasi	: Observasi
Sumber	: Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

RUMAH PEMULIHAN GIZI KOTA YOGYAKARTA

Produk inovasi	: Layanan Kesehatan terkait gizi
Jenis Inovasi	: Produk
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Penggagas	: Dyah Suminar, Ketua TP PKK Kota Yogyakarta
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2010
Kontak Person	: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Deskripsi :



Rumah Pemulihan Gizi merupakan tempat perawatan antara bagi anak-anak bermasalah terhadap gizi dengan cara menjembatani anak gizi buruk yang telah usai menjalani perawatan di rumah sakit hingga benar-benar pulih dengan kondisi gizi yang baik. Anak-anak yang dirawat di RPG juga terjaring dari hasil screening yang dilakukan oleh Posyandu di wilayah RW. Atas rekomendasi posyandu atau berdasarkan laporan dari masyarakat anak-anak tersebut dapat mengikuti perawatan secara gratis. Di RPG anak-anak gizi buruk tersebut dirawat dengan intensif disertai pemberian asupan gizi yang baik. Dengan pendampingan orangtua mereka setiap pagi datang ke RPG untuk mendapat perawatan hingga sore hari. Orangtua pendamping juga diajarkan bagaimana melakukan

perawatan khusus serta diberi pelatihan tentang pola makan dan menu gizi yang baik bagi anak-anaknya. Mereka menjalani perawatan beberapa minggu hingga dari hasil pemeriksaan dinyatakan telah pulih. Pembentukan Rumah Pemulihan Gizi di kota Yogyakarta didasari tingginya kasus gizi buruk, yaitu sebanyak 169 kasus gizi buruk pada 2009 yang mayoritas dialami oleh anak usia balita. Adapun tujuan pembentukan Rumah Pemulihan Gizi antara lain : (1) Menyediakan tempat penanganan komprehensif bagi balita gizi buruk/kurang di Kota Yogyakarta; (2) Menangani kasus balita gizi buruk secara komprehensif sesuai kewenangannya; dan (3) Mendidik keluarga dan orangtua untuk perawatan kesehatan anaknya. Agar program Rumah Pemulihan gizi dapat berjalan dengan baik, maka beberapa strategi yang dilakukan antara lain upaya promotif berupa penyuluhan kepada masyarakat, orangtua balita antara lain mengenai keberadaan RPG, pola asuh anak, psikologi dan tumbuh kembang anak; upaya preventif : berupa demonstrasi pengasuhan anak antara lain dalam hal penyiapan makanan anak, penyusunan makanan, pertolongan pertama pada penyakit; upaya kuratif: berupa penanganan dan pengobatan sesuai instruksi dokter; serta upaya rehabilitatif: berupa penatalaksanaan pasca perawatan Rumah Sakit.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan daerah untuk mengurangi kasus gizi buruk;
- ❖ Komitmen PK PKK Kota Yogyakarta untuk ikut berpartisipasi aktif dalam peningkatan gizi bagi balita;
- ❖ Adanya dukungan yang kuat dari berbagai SKPD yang terkait;
- ❖ Adanya dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD dari berbagai SKPD terkait maupun yang bersumber dari pihak lain dan mitra kerja.
- ❖ Dukungan dari masyarakat terkait dengan upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif terhadap kasus gizi buruk.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masih rendahnya pemahaman orang tua terhadap pemberian asupan gizi yang baik bagi anak balita;
- ❖ RPG belum memiliki tenaga medis dan non medis, sehingga tenaga yang ada masih bantuan dari pihak lain;
- ❖ kasus gizi buruk tidak semata-mata disebabkan faktor kemiskinan, namun juga terkait budaya dan perilaku orangtua yang tidak paham atau karena faktor penyakit bawaan sehingga upaya penanganannya membutuhkan sumber daya yang banyak.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membangun komitmen berbagai pihak untuk menangani kasus gizi buruk;
- ❖ Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya menangani kasus gizi buruk termasuk orangtua;
- ❖ Menyiapkan sarana dan prasarana sebagai tempat perawatan bagi balita penderita gizi buruk;
- ❖ Menyusun mekanisme operasional atau SOP;
- ❖ Penyediaan anggaran dari APBD Kota Yogyakarta melalui SPKD yang terlibat, yaitu Dinas Kesehatan, Bagian Kesmas dan PUG, Dinas Kesejahteraan Sosial dan BPBD serta sumber pendanaan dari luar yang berasal dari TP PKK, IDAI Yogyakarta dan Mitra Kerja yang mendukung;
- ❖ Menyiapkan tenaga administrasi RPG dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan RPG;
- ❖ Menyiapkan tenaga medis (Dokter anak dan ahli gizi) untuk pelayanan;
- ❖ Membantu menghubungkan dengan pihak ketiga untuk kelangsungan RPG.

Manfaat :

- ❖ Mengurangi kasus gizi buruk bagi balita, sehingga pertumbuhan anak-anak balita lebih baik dan normal;
- ❖ Memberikan kecukupan gizi bagi balita sesuai dengan target asupan gizi yang memadai;
- ❖ Memberikan pemahaman bagi orang tua balita pendamping dalam melakukan perawatan khusus serta pola makan dan menu gizi yang baik bagi anak-anaknya.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen yang tinggi pimpinan daerah untuk mengurangi kasus gizi buruk;
- ❖ Membangun koordinasi yang baik antar SKPD terkait dalam pengentasan kasus gizi buruk;
- ❖ Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya menangani kasus gizi buruk;
- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana sebagai tempat perawatan bagi balita penderita gizi buruk;
- ❖ Tersedianya tenaga medis (Dokter anak dan ahli gizi) untuk pelayanan.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Sinovik Top 99

GERAKAN BERKELANJUTAN ANTI SAMPAH PLASTIK (GELATIK) KABUPATEN BADUNG

Produk inovasi	: Sistem Pengolahan Sampah Plastik
Jenis Inovasi	: Produk
Unit Pelaksana	: Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Penggagas	: Bupati Badung
Tahun inisiasi	: 2011
Tahun implementasi	: 2011
Kontak Person	: Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Deskripsi :



Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik (Gelatik) merupakan program unggulan mengurangi sampah plastik, juga mengubahnya menjadi energi terbarukan. Adapun tujuan pembentukan Program Gelatik tersebut bertujuan untuk menanggulangi sampah plastik dan membuatnya menghasilkan manfaat-manfaat ekonomis melalui pelibatan partisipasi masyarakat. Program Gelatik ini dilaterbelakangi oleh pengelolaan sampah plastik selama ini belum dilakukan secara optimal dan belum dapat menghasilkan produk-produk baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Hingga saat ini program Gelatik telah menghasilkan sebuah reaktor pirolisis yang mampu mengolah sampah plastik menjadi sumber energi alternatif terbarukan, dimana manfaat gelatik power proyek tahap I telah menghasilkan BBM, selain itu sampah plastik juga didaur ulang menjadi

tas. “Guna mendukung program ini, tahun 2014 Pemkab Badung menggarkan dana sebesar Rp. 5,4 M untuk pembangunan 16 TPST.

Agar program Gelatik mampu mengoptimalkan penanganan sampah plastik, maka Pemkab Badung melakukan strategi dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari sekolah-sekolah, pasar tradisional, kelompok masyarakat maupun PKK. Beberapa komponen pendukung gelatik terdiri dari 118 sekolah, 132 unit pasar, kelompok masyarakat 24 unit, 6 kelompok PKK serta dukungan TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen Pemkab. Badung meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui program-program inovatif daerah;
- ❖ Adanya dukungan masyarakat secara luas termasuk lembaga pendidikan (sekolah-sekolah) dilingkungan Kabupaten Badung;
- ❖ Dukungan yang luas dari tempat-tempas usaha termasuk pasar-pasar tradisional maupun modern;
- ❖ Adanya dukungan yang tinggi dari kelompok PKK;
- ❖ Dukungan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam pengelolaan sampah plastik melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masih terbatasnya jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagai mitra Gelatik dalam pengolahan sampah plastic;
- ❖ Bahan bakar solar yang dihasilkan dari program Gelatik baru dapat digunakan digunakan untuk motor pengangkut sampah;
- ❖ Besarnya anggaran Daerah yang digunakan untuk mendukung Program Gelatik;
- ❖ Belum semua warga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya pengolahan sampah plastik, sehingga kurang mendukung program Gelatik tersebut.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membangun komitmen di jajaran pimpinan daerah terkait upaya pengelolaan sampah baik organik maupun unorganik;
- ❖ Membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai mitra bagi program Gelatik;
- ❖ Membentuk kebijakan yang mengatur kerjasama antara TPST dengan Program Gelatik;
- ❖ Menyiapkan anggaran untuk mendukung pendirian TPST untuk mendukung Program Gelatik;
- ❖ Melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak baik di lingkungan sekolah, kelompok PKK maupun PD Pasar dan Pasar Modern;
- ❖ Mendukung pemanfaatan hasil pengolahan sampah plastik serta peluang pasar bagi BBM hasil dari program Gelatik.

Manfaat :

- ❖ Meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat pengelola sampah plastik;
- ❖ Mengurangi penumpukan sampah di berbagai sudut wilayah Kabupaten Badung;

- ❖ Meningkatkan kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Badung;
- ❖ Tersedianya alternative energi terbarukan dari pengolahan sampah plastik menjadi BBM alternatif.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan wilayah Kabupaten Badung;
- ❖ Adanya komitmen Kepala SKPD terkait untuk melakukan pembinaan terhadap Program Gelatik menyerahkan fungsi pelayanan kepada UPTKP;
- ❖ Tersedianya sumber pendanaan yang cukup.
- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara TPST dengan Program Gelatik;
- ❖ Didukung oleh masyarakat luas baik dari kalangan sekolah, pasar dan anggota masyarakat.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Pencarian dari beberapa sumber di Internet

PROGRAM PETANI MANDIRI SEJAHTERA (TANIMAS) KABUPATEN BADUNG

Produk inovasi	: Sistem Pengolahan Kotoran Hewan Menjadi Produk Bernilai Ekonomis
Jenis Inovasi	: Produk
Unit Pelaksana	: Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Penggagas	: Dinas Pertanian
Tahun inisiasi	: 2012
Kontak Person	: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung
	Tahun implementasi : 2012

Deskripsi :



Dalam Program Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas) yang dicanangkan Pemkab Badung kotoran hewan diolah menjadi pupuk dan produk-produk organik lainnya. Adapun tujuan pembentukan Program Tanimas tersebut adalah optimalisasi potensi pertanian berintergrasi tanaman-ternak dengan sentuhan inovasi teknis sosial ekonomi dan kelembagaan. Saat ini tercatat 12 unit Tanimas menghasilkan produk organik ramah lingkungan seperti pupuk organik dan limbah ternak (limbah bio-urine) untuk mengusir hama tikus dan dari kotoran ternak menghasilkan biogas. Program Tanimas ini dilaterbelakangi oleh pengelolaan sampah kotoran hewan selama ini belum dilakukan secara optimal dan belum dapat menghasilkan produk-produk baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Beberapa strategi yang dilakukan Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Program Tanimas dengan membentuk kelompok-kelompok Tanimas, penyediaan anggaran dan menyiapkan pasar bagi produk-produk hasil pengolahan kotoran hewan serta melakukan penyadaran masyarakat peternak terkait dengan manfaat dari pengolahan kotoran ternak yang dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomi.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pengelola ternak dan unit-unit bisnis peternakan;
- ❖ Keinginan untuk meningkatkan nilai ekonomis kotoran hewan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal;
- ❖ Adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat peternak;
- ❖ Keinginan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat dan kelompok masyarakat peternak meningkatkan produksi daging dan susu.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masih terbatasnya jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagai mitra Program Tanimas dalam pengolahan sampah kotoran ternak menjadi pupuk dan bahan organik lainnya;
- ❖ Masih terbatasnya jumlah Kelompok Tanimas yang dapat menghasilkan produk pupuk dan bahan organik lainnya;
- ❖ Besarnya anggaran Daerah yang digunakan untuk mendukung Program Tanimas;
- ❖ Belum semua warga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya pengolahan kotoran ternak, sehingga kurang mendukung program Tanimas tersebut.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membangun komitmen di jajaran pimpinan daerah terkait dengan upaya pengelolaan sampah kotoran ternak menjadi pupuk dan bahan baik organik lainnya;
- ❖ Membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai mitra bagi program Tanimas;
- ❖ Membentuk kebijakan yang mengatur kerjasama antara TPST dengan Program Tanimas;
- ❖ Menyiapkan anggaran untuk mendukung pendirian TPST untuk mendukung Program Tanimas;
- ❖ Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok Tanimas terkait dengan proses pengolahan maupun pemasaran produk hasil olahan kotoran ternak;
- ❖ Mendukung pemanfaatan dan pemasaran hasil pengolahan kotoran ternak.

Manfaat :

- ❖ Terciptanya kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat pemeliharaan ternak;
- ❖ Meningkatnya pendapatan kelompok peternak;
- ❖ Meningkatnya motivasi kelompok peternak untuk meningkatkan produksi ternaknya;
- ❖ Meningkatnya kelompok Tanimas yang menghasilkan produk organik ramah lingkungan seperti pupuk organik dan limbah ternak (limbah bio-urine) untuk mengusir hama tikus
- ❖ Menghasilkan biogas dari pengelolaan kotoran ternak.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok peternak;
- ❖ Adanya komitmen Kepala SKPD terkait untuk melakukan pembinaan terhadap Program Tanimas dalam pengelolaan kotoran ternak;
- ❖ Tersedianya sumber pendanaan yang cukup.
- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara TPST dengan Program Tanimas.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Pencarian dari beberapa sumber di Internet

DARI AMPAS TAHU TERBITLAH ENERGI BARU KOTA PEKALONGAN

Produk inovasi	: Pengolahan Limbah Tahu menjadi Energi alternatif (Biogas)
Jenis Inovasi	: Produk
Unit Pelaksana	: Kantor Lingkungan Hidup
Penggagas	: Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Tahun inisiasi	: 2010
Tahun implementasi	: 2010
Kontak Person	: Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan – Jl. Singosari No. 2 Pekalongan - tlp. 0285-422581 - Website www.pekalongankota.go.id

Deskripsi :



Pengolahan ampas tahu menjadi energi baru merupakan salah satu cara yang dilakukan Kota Pekalongan untuk memanfaatkan limbah industri tahu menjadi sesuatu yang lebih berguna terutama bahan bakar alternatif. Hal ini dilakukan mengingat Pekalongan memiliki industri kecil yang tersebar di beberapa kelurahan dimana industri ini membawa dampak terhadap pencemaran air minum sekaligus memiliki potensi untuk pengembangan energi alternatif.

Tujuan pengolahan ampas tahu ini adalah untuk memperbaiki lingkungan yang kumuh di kampung penghasil tahu, sekaligus menghasilkan produk sampingan yang bermanfaat bagi warga, serta menjadi upaya penataan lingkungan yang kumuh akibat aktivitas industri tahu. Banyaknya industri kecil pembuatan tahu yang belum memiliki kesadaran terhadap pencemaran lingkungan telah mendorong Pemerintah Kota Pekalongan

untuk melakukan pengolahan limbah tahu untuk dijadikan bahan baku energi alternatif, yaitu menjadi biogas. Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan melakukan strategi kerjasama untuk pemanfaatan ampas tahu tersebut. Pemerintah Kota Pekalongan menggandeng penyedia jasa yang kompeten dan berpengalaman dalam pembangunan sarana prasarana biogas agar hasilnya dapat maksimal meski anggaran yang terbatas.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen yang kuat dari pimpinan Kota Pekalongan;
- ❖ Adanya keinginan untuk melestarikan lingkungan hidup dari bahaya limbah industri;
- ❖ Sarana dan prasarana yang memadai;
- ❖ Adanya pihak swasta yang bersedia membantu pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah ampas tahu.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup meski sudah dilakukan himbauan dan sosialisasi;
- ❖ Kurangnya peran dari pemerintah dalam hal menginisiasi program pencegahan kerusakan lingkungan hidup selain pengolahan limbah.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiasi dan komitmen pimpinan Kota Pekalongan untuk menjaga lingkungan;
- ❖ Dilakukannya survey ke sentra industri tahu yang layak secara teknis;
- ❖ Pembuatan dokumen perencanaan yang dalam prosesnya pemerintah mendengarkan pendapat masyarakat serta berkonsultasi dengan akademisi;
- ❖ Proses pengadaan untuk prasarana pengolahan;
- ❖ Pembangunan instalasi dan fasilitas dengan desain dan pembangunannya dilakukan oleh swasta;
- ❖ Sosialisasi proses perawatan instalasi dan sosialisasi proses pengolahan limbah tahu kepada masyarakat.

Manfaat :

- ❖ Mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah tahu bagi masyarakat;
- ❖ Dihasilkannya biogas sebagai bahan bakar alternatif;
- ❖ Tertatanya lingkungan hidup disekitar industri;
- ❖ Dapat dilakukan penghematan sebesar 60 ribu per bulan untuk pengeluaran memasak bagi rumah tangga yang dialiri biogas dari ampas tahu sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya inisiasi dan komitmen pimpinan daerah dan jajarannya untuk menjaga lingkungan;
- ❖ Adanya sentra industri tahu untuk dilakukan pengolahan limbah sisa hasil produksi tahu;
- ❖ Dilakukan survey terhadap pelaku usaha untuk nantinya dapat dilakukan penerapan program;
- ❖ Adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, swasta dan akademisi untuk membangun instalasi pengolahan limbah;
- ❖ Adanya anggaran dan sarana prasarana untuk membangun pengelolaan limbah dan manajemennya;

- ❖ Melakukan pelatihan kepada fasilitato sebelum mensosialisasikan program pengelolaan limbah;
- ❖ Melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan kepada masyarakat.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Best Practice Pelayanan Publik (Buku APEKSI) Jilid 9



KELOMPOK INOVASI *KONSEPTUAL*

Inovasi yang ditujukan untuk perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah. Ruang lingkup dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru yang sebelumnya tak terbayangkan.

KLINIK ASURANSI PREMI SAMPAH INDONESIA MEDIKA

Produk inovasi	: Solusi Layanan Kesehatan dengan Pemanfaatan Sampah		
Jenis Inovasi	: Konseptual		
Unit Pelaksana	: Indonesia Medika		
Penggagas	: dr. Gamal Albinsaid		
Tahun inisiasi	: 2010	Tahun implementasi : 2013	
Kontak Person	: Informasi lengkap tentang Klinik Asuransi Sampah dapat dibaca lewat situsnya : banggamal.com		

Deskripsi :



Klinik Asuransi Premi Sampah adalah program asuransi kesehatan dengan premi sampah sebagai pembiayaan program kesehatan. Konsepnya sama seperti asuransi pada umumnya, di mana nasabah membayar premi tiap bulan. Tapi nilai preminya terbilang murah, dan tidak perlu mengeluarkan uang. "Cukup dengan sampah". Jenis sampahnya bisa organik, bisa juga anorganik. Yang pasti, nilai sampah harus Rp10 ribu per bulannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Klinik Asuransi Premi Sampah bekerjasama dengan Bank Sampah Malang (BSM) untuk menilai berapa harga sampah yang disetor nasabah. Implementasinya mudah, yaitu warga cukup menyerahkan sampah kepada Klinik Mawar Husada di Jalan Sumbersari VB/377, Kecamatan Lowokwaru, Malang Jawa Timur. Sampah yang dikumpulkan warga diolah menjadi uang sebagai "Dana

Sehat" melalui 2 cara, untuk sampah organik dijadikan pupuk dengan Metode Takakura, sedangkan untuk sampah anorganik (seperti botol plastik, kardus dan kertas yang dapat didaur ulang) dijual ke pengepul. Hingga saat ini sudah ada 5 klinik di Malang yang menerapkan Klinik Asuransi Presmi Sampah tersebut dengan jumlah anggota kurang lebih 500 orang.

Pembentukan Klinik Asuransi Premi Sampah dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap rendahnya akses kesehatan bagi warga miskin utamanya bagi warga pemulung sampah. Dimana suatu ketika, anak pemulung sampah sakit dan dibawa keliling dengan gerobak sampahnya oleh orang tunya untuk mendapat pengobatan. Namun mengingat sulitnya mendapatkan akses kesehatan, maka akhirnya meninggal dunia di dalam gerobak sampah.

Beberapa strategi yang dilakukan agar Klinik Asuransi Premi Sampah ini tetap eksis dan berkembang antara lain melakukan kerjasama dengan Bank Sampah Malang (BSM) untuk menilai berapa harga sampah yang disetor nasabah.. Klinik itu mengajak kader Posyandu, ibu-ibu PKK dan masyarakat untuk mengembangkan Klinik Asuransi Premi Sampah untuk membantu masyarakat.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen dr. Gamal Albinsaid untuk ikut berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- ❖ Adanya komitmen masyarakat untuk membantu warga miskin mendapatkan akses pengobatan;
- ❖ Adanya dukungan dari Bank Sampah Malang (BSM) untuk menilai berapa harga sampah yang disetor nasabah.
- ❖ Dukungan masyarakat terkait dengan upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif bagi masyarakat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Terbatasnya fasilitas kesehatan yang tersedia termasuk tenaga dokter mengingat sistem ini murni inisiatif masyarakat;
- ❖ Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan nilai ekonomis sampah dilingkungan tinggalnya;
- ❖ Masih rendahnya semangat wirausaha bagi masyarakat terkait upaya pengolahan sampah atau daur ulang sampah;
- ❖ Keberlangsungan hidup sistem Klinik Asuransi Premi Sampah ini sangat bergantung pada model kepemimpinan dan konsistensi masyarakat yang menjadi anggotanya.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Menuangkan ide atau gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu khususnya terkiat dengan akses mendapatkan pelayanan kesehatan;
- ❖ Mendirikan wadah organisasi yang mengelola layanan kesehatan masyarakat dalam bentuk klinik asuransi premi sampah;
- ❖ Melakukan kerjasama dengan unit pengolah sampah;
- ❖ Membangun kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan mengolah sampah menjadi lebih bernilai.

Manfaat :

- ❖ Meningkatkan kebersihan lingkungan wilayah tempat tinggal;
- ❖ Memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu hanya dengan menyeter sampah senilai Rp. 10.000,- setiap bulannya;
- ❖ Memeberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat kurang mampu tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan pentingnya jaminan kesehatan keluarga mereka;
- ❖ Masyarakat kurang mampu dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara holistik, yaitu pengobatan jika pasien sakit (kuratif), melakukan program peningkatan kualitas kesehatan (promotif, seperti: penyuluhan, konsultasi gizi, pembagian buku, dll), mencegah terjadinya sakit (preventif), dan rehabilitatif (*home visit*, kontrol diabetes, dll).

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen masyarakat untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu;
- ❖ Membangun kesadaran masyarakat kurang mampu terkait dengan pentingnya pelayanan kesehatan bagi keluarganya;
- ❖ Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam mengolah dan mendaur ulang sampah, sehingga memiliki nilai ekonomis;
- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana atau klinik sebagai tempat perawatan bagi warga kurang mampu;
- ❖ Tersedianya tenaga medis (Dokter) dan obat-obatan;

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Pencarian data berdasarkan sumber dari internet lewat situsnya : banggamal.com

COMMUNITY DEVELOPMENT SOLUSI KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL

Produk inovasi	: <i>Community Development</i> Mengentaskan Kemiskinan (Comdev-MK)
Jenis Inovasi	: Konseptual
Unit Pelaksana	: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Penggagas	: Bupati Bantul H.Idham Samawi
Tahun inisiasi	: 2006
Tahun implementasi	: 2006
Kontak Person	: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Deskripsi :



“*Community Development*” merupakan sebuah konsep memberdayakan masyarakat melalui pendekatan *bottom-up*, maksudnya adalah agar masyarakat dapat mandiri dan saling menguatkan dalam rangka keluar dari lingkaran kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan sangat berhubungan dengan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dimensi-dimensi sosial seperti orang miskin, rumah tidak layak huni, pengangguran, dan kriminalitas berhubungan dengan dengan kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2006 masuk dalam katagori “daerah miskin” dengan 81.398 keluarga miskin. H. Idham Samawi selaku Kepala Daerah menggagas program *community development* dalam mengentaskan kemiskinan

(Comdev-MK) di Kabupaten Bantul. Program Comdev-MK juga dipengaruhi dampak gempa bumi di Kabupaten Bantul pada tahun 2006 yang meningkatkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, yang menyebabkan kerusakan ratusan ribu bangunan rumah dan fasilitas umum serta pengungsian korban gempa sebanyak 779.287 orang.

Adapun tujuan Comdev-MK adalah menciptakan suatu masyarakat yang mampu berdiri sendiri, mandiri dan mampu menentukan arah kehidupannya sendiri, terbebas dari perangkap kemiskinan, dan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraannya pemerintah Kabupaten Bantul memperkuat program tersebut dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 B Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Community Development* Mengentaskan Kemiskinan (CD-MK) Kabupaten Bantul sebagai strategi awal. Selanjutnya menanamkan prinsip pengentasan kemiskinan berbasis “pedukuhan” dengan saling “Asah, Asih, Asuh” dalam rangka melindungi, melayani, memperkuat dan meningkatkan fasilitas sumber daya manusia melalui berbagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap mental dan ketrampilan, mengurangi faktor keterbatasan (limitation), efisiensi dan kontrol dalam penyelenggaraannya. Untuk meningkatkan persentase keberhasilannya maka dilibatkanlah berbagai pihak antara lain pemerintah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan dan perguruan tinggi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul masuk dalam katagori “daerah miskin” (jumlah 81.398 kel);
- ❖ Kemiskinan semakin parah dengan adanya gempa bumi di Kab Bantul tahun 2006;
- ❖ Dukungan pemerintah pusat atas penguatan modal;
- ❖ Perencanaan Bantul sebagai kota mandiri.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Kualitas sarana dan prasarana publik yang belum memadai;
- ❖ Bahan baku sebagian besar diperoleh dari luar daerah;
- ❖ Motivasi pengrajin masih rendah;
- ❖ Terjadinya kerusakan akibat dari gempa bumi;
- ❖ Letak Kabupaten Bantul kurang strategis;
- ❖ Minimnya distributor;
- ❖ Belum berfungsinya kelompok sentra industri;
- ❖ Kurang kesadaran UKMK;
- ❖ Panjangnya rantai penjualan produk UKM;
- ❖ Promosi investasi belum maksimal.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Tahap Sosialisasi : Sosialisasi dimulai setelah persiapan administrasi dan kelembagaan di tingkat Tim Fasilitator kabupaten selesai, dengan melibatkan elemen pemerintah (kecamatan, desa dan pedukuhan);
- ❖ Tahap persiapan: penguatan kelembagaan dan perencanaan yang dilakukan dengan rapat koordinasi, konferensi kerja kecamatan;
- ❖ Tahap pembentukan kelompok Comdev-MK : forum Pedukuhan atau rembug pedukuhan, yang diarahkan dapat membentuk kelompok secara demokratis, mufakat dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat;

- ❖ Tahap pembekalan dan pelatihan kelompok Comdev-MK: Pembekalan dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan kesiapan kepada kelompok;
- ❖ Tahap penyusunan program kelompok Comdev-MK yaitu membuat rancangan program, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan;
- ❖ Tahap penilaian proposal: Penilaian dimaksudkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengesahan proposal tersebut dilakukan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- ❖ Tahap penyerahan dana program: tahun Anggaran 2006 tiap kelompok mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ❖ Tahap pelaksanaan kegiatan: kegiatan meliputi: (a) penetapan pelaksana dan lokasi program; (b) penetapan skenario usaha;
- ❖ Tahap monitoring dan evaluasi: berupa pendampingan selama proses pelaksanaan program. Gagasan pendampingan disini adalah untuk memastikan program berjalan, dan disisi lain mampu menggali sumber daya pendukung lain yang akan meningkatkan kualitas program.

Manfaat :

- ❖ Hubungan dengan pihak DPRD guna memperoleh dukungan politis, sangat penting dikembangkan;
- ❖ Terciptanya “Pola” yang disepakati stakeholders (dunia usaha, LSM, perguruan tinggi) dalam pengembangan hubungan pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan;
- ❖ Kebijakan comdev-MK menjadi acuan dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan;
- ❖ Kebijakan comdev-MK menjadi inspirasi program nasional PNPM Mandiri yang dimulai tahun 2008;
- ❖ Tahun 2014 diterapkan Undang-undang tentang Desa yang diilhami oleh kebijakan comdev-MK khususnya yang terkait dengan pendampingan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen yang kuat dari pihak pemerintah daerah untuk segera melepaskan diri dari predikat “daerah miskin”;
- ❖ Adanya dukungan dana yang besar;
- ❖ Adanya Tim Pendampingan (dari unsur pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator).
- ❖ Adanya kerjasama dengan pihak dunia usaha, lembaga kemasyarakatan dan perguruan tinggi serta Dewan Perakilan Rakyat Daerah.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Berbagai sumber tulisan jurnal dan pencarian dari beberapa sumber di Internet

KOTA LAYAK ANAK KOTA DENPASAR

Produk inovasi	: Kota Denpasar Sebagai Kota Layak Anak	
Jenis Inovasi	: Konseptual	
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
Penggagas	: I.B. Rai D. Mantra (Walikota Denpasar), kementerian Pendayagunaan Perempuan dan perlindungan Anak	
Tahun inisiasi	: 2010	Tahun implementasi : 2010
Kontak Person	: Dinas Kesehatan Kota Denpasar	

Deskripsi :



Kota Layak Anak Kota Denpasar merupakan pemberian fasilitas hak anak-anak yaitu pemberian Akta Kelahiran gratis, pemberian Jamkesda, Penyediaan diskon di beberapa toko buku dan seragam sekolah bagi seluruh siswa apabila menggunakan seragam sekolah atau menunjukkan kartu pelajar. Pelaksanaan Kota Layak Anak ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yaitu ; 1) belum semua anak memiliki akta kelahiran, 2) Belum semua anak mendapatkan hak asuh dengan baik oleh orang tua, keluarga, orang tua asuh wali, 3) belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai, 4) Belum semua anak mendapatkan kesehatan yang optimal, 5) belum semua anak mendapatkan perlindungan hukum secara khusus.

Program Kota Layak Anak Kota Denpasar bertujuan untuk memberikan fasilitas dan perlindungan anak-anak serta menguatkan kualitas generasi penerus mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Strategi pelaksanaan Kota Layak Anak ini adalah mengembangkan program-program yang antara lain; penyusunan profil Denpasar Kota Layak Anak, pemberian fasilitas hak-hak anak sipil, pengintegrasian keberadaan posandu PKK dan PUAD untuk meningkatkan tumbuh kembang anak, memberikan penyuluhan dan workshop mengenai konvensi anak, mengembangkan pojok ASI di berbagai terminal, kerjasama dengan swasta dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas/pengetahuan, menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak, membentuk forum anak Kota Denpasar (FAD) di setiap banjar (desa).

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Tersedianya kebijakan Peraturan Walikota;
- ❖ Pelaksanaan program secara terkoordinasi berbagai pihak SKPD Pemerintahan Kota Denpasar, Perguruan Tinggi, LSM, dan media masa;
- ❖ Adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah daerah terhadap program Kota Layak Anak secara berkelanjutan;
- ❖ Adanya koordinasi yang baik antar lembaga dan pemerintah daerah serta kemitraan dengan pihak-pihak yang mendukung
- ❖ Tersedianya aparat yang siap bekerja penuh dan serius dengan masyarakat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Tidak mudah merangkul SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar; merupakan hambatan yang paling besar dalam pelaksanaan program ini;
- ❖ Masih kuatnya budaya patriaki di masyarakat; ❖ Program ini masih harus bersaing ketat dalam proses penyusunannya.
- ❖ Keterbatasan aspek anggaran daerah

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pencanangan pengembangan Kota Layak Anak dengan dikeluarkan Peraturan Walikota;
- ❖ Dukungan dan koordinasi dengan SKPD dilingkungan Kota Denpasar;
- ❖ Kerjasama dengan pihak swasta;
- ❖ Pembentukan forum anak di setiap desa;
- ❖ Menyediakan fasilitas anak-anak dan remaja untuk menyalurkan bakat dan minat pada waktu liburan sekolah

Manfaat :

- ❖ Seluruh anak sudah memiliki akta kelahiran secara gratis;
- ❖ Menurunya angka kematian bayi (2010 :3, 2011 :27, 2012; 0);
- ❖ Seluruh pelajar sekolah memiliki fasilitas diskon sebesar 10-15% di beberapa toko buku;
- ❖ Pemberian santunan kematian bagi pemegang tanda penduduk WNI dan Kartu Identitas Anak WNI.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan kebijakan;
- ❖ Adanya dukungan SKPD;
- ❖ Adanya dukungan anggaran;
- ❖ Adanya sistim pengawasan

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Pratik Baik inovasi pelayanan publik jilid 2

PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH KOTA MALANG

Produk inovasi	: Konsep pengelolaan sampah terpadu dan pemanfaatan sampah sebagai nilai tambah
Jenis Inovasi	: Konseptual
Unit Pelaksana	: Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Malang
Penggagas	: Hj. Dra. Heri Puji Utami, M.AP (Ketua Tim PKK), Drs. Wasto, SH, MH (Kepala DKP kota Malang)
Tahun inisiasi	: 2010
Tahun implementasi	: 2011
Kontak Person	: Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Malang. Jl. Bingkil No.1, Malang. Tel. 0341 369377

Deskripsi :



Pengelolaan sampah melalui bank sampah merupakan salah satu ide yang digagas oleh pemerintah kota Malang untuk menerapkan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse and recycle*). Gagasan ini tercetus karena banyaknya tumpukan sampah di lingkungan masyarakat dan tempat pembuangan sampah yang membuat lingkungan menjadi kotor dan menjadi sumber penyakit. Bank sampah sendiri merupakan tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar

lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

Tujuan pengelolaan sampah melalui konsep bank sampah ini adalah 1) membantuk Pemkot dalam mengurangi volume sampah; 2) Mengubah cara pandang masyarakat tentang sampah yang ternyata dapat menjadi penghasilan tambahan yang dapat ditabung; 3) harapan akan lahirnya kepedulian dan gotongroyong di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, melalui Bank sampah ini pemerintah kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan pertanaman (DKP) mengajak masyarakat untuk menumbuh kembangkan kepedulian sosial untuk lingkungan sekaligus memberi penghasilan tambahan bagi mereka. Strategi yang dijalankan DKP Malang dengan memperkenalkan kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang metode 3R dalam pengelolaan sampah. Masyarakat diajari cara pemilahan dan pemanfaatan sampah organik (basah) dan an-organik (kering). DKP Malang melalui media cetak dan elektronik lokal mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah dan gerakan menabung dengan sampah. Selain itu bekerjasama dengan PT. Jasa Tirta untuk menangani sungai agar DAS Brantas bersih dari sampah.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya keinginan pemerintah dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kepedulian sosial untuk lingkungan;
- ❖ Dilembagakannya Bank Sampah Malang (BSM) dengan akte notaris 12 agustus 2011, pengesahan oleh Walikota Malang 16 Agustus 2011 dan peresmian oleh Menteri Lingkungan Hidup 15 November 2011;
- ❖ Adanya paguyuban kader lingkungan yang melakukan sosialisasi tentang lingkungan ke masyarakat.
- ❖ Adanya dana hibah dari pemerintah kota Malang sebesar 250 juta dan dana CSR dari PT PLN Distribusi Jawa Timur sebesar 30 juta pada tahun 2011;

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Banyaknya anggaran yang dikeluarkan dalam rangka mensosialisasikan tentang kepedulian lingkungan tidak sebanding dengan dana yang diperoleh (sudah termasuk dana hibah);
- ❖ Tidak mudahnya untuk mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat kota Malang dalam mengelola sampah.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiasi dan komitmen dari pemerintah kota Malang (Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Malang dan Tim PKK) untuk menumbuhkembangkan kepedulian sosial untuk lingkungan.
- ❖ Pembentukan kelompok kader lingkungan yang dikenal dengan Paguyuban Kader Lingkungan Desember 2010;
- ❖ Sosialisasi tentang lingkungan kemasyarakat seperti pengelolaan sampah, metode 3R dalam pemilahan sampah.
- ❖ Melembagakan Bank Sampah Malang pada tanggal 26 Juli 2011 dalam bentuk koperasi fungsional kader lingkungan;
- ❖ Pemerintah daerah menyediakan tempat untuk berjalannya koperasi BSM;
- ❖ Melakukan study banding ke daerah lain terkait pengelolaan sampah, mulai dari rapat kerja, magang, survey;
- ❖ Disusun dan diterbitkannya perda tentang pengelolaan sampah dan gerakan menabung dengan sampah, bayar listrik dengan sampah, rekreasi sekolah dengan sampah, beli pulsa dengan sampah dan sebagainya;
- ❖ Menggandeng pihak terkait untuk memberi dana bantuan dan hibah pemerintah kota (PT PLN, PT Philips);

- ❖ Menjalin kemitraan dengan lapak lapak pemulung yang ada di kota Malang dan sekitarnya;
- ❖ Membuat Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk komputerisasi input pembelian, output penjualan, dan transaksi-transaksi nasabah.

Manfaat :

- ❖ Penurunan jumlah pembuangan sampah hingga 50 % dari total harian;
- ❖ Cara pandang masyarakat tentang lingkungan mulai berubah dan mampu memanfaatkan sampah menjadi barang berguna dan memiliki nilai jual;
- ❖ Tumbuh kembangnya semangat gotong royong untuk mengolah sampah organik dan an-organik demi menjaga lingkungan;
- ❖ Manfaat tambahannya adalah perolehan Adipura Kencana tahun 2013 dan penghargaan AMPL 2013 bidang terobosan manajemen pada KSAN 2013.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dan inisiatif pemerintah terutama unit terkait untuk lebih peduli terhadap lingkungan;
- ❖ Adanya payung hukum tentang pengelolaan sampah;
- ❖ Adanya pelibatan kelompok masyarakat untuk mensosialisasikan semangat kepedulian lingkungan;
- ❖ Adanya dukungan anggaran dan sarana prasarana dari pemerintah dan swasta;
- ❖ Mempersiapkan manajemen pengelolaannya koperasi baik administrasi, sistem menabung, sampai daftar harga barang;
- ❖ Menjalin kemitraan dengan lapak-lapak pemulung yang ada;
- ❖ Mempersiapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk komputerisasi transaksi dengan nasabah.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Dokumentasi Best Practice APEKSI Jilid 9

KOTA LAYAK ANAK KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak
Jenis Inovasi	: Konseptual
Penggagas	: kementerian Pendayagunaan Perempuan dan perlindungan Anak
Unit Pelaksana	: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Surakarta (Bidang Perlindungan Anak)
Tahun inisiasi	: 2006
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapermas Surakarta

Deskripsi :



Kota Layak Anak (KLA) merupakan strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Tujuannya adalah untuk melindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksperesikan diri di kotanya sendiri. Kebijakan program KLA digagas karena adanya kekerasan anak, keadaan anak yang belum merasa aman di tempat umum bahkan di rumah dan tempat bermain bagi anak-anak yang masih kurang. Terdapat 31 indikator kota layak anak yang merupakan penjabaran dari 5 kluster hak-hak anak yaitu : hak sipil dan

kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, perlindungan khusus.

Untuk merealisasikan Surakarta sebagai kota layak anak dilakuka strategi perluasan kawasan infrastruktur kota yang mempertimbangkan ruang bagi anak; penguatan kelembagaan forum anak di tingkat kelurahan dan partisipasinya dalam perencanaan pembangunan; penguatan peran pelayanan terpadu perempuan dan anak surakarta (PTPAS), dan pengembangan kelompok-kelompok kreatif anak. Di samping itu juga dilakukan melalui pembentukan kelurahan dan kecamatan layak anak serta pembentukan forum anak, yang telah terbentuk di 51 kelurahan dan 5 kecamatan. Untuk memenuhi 31 hak anak dilakukan upaya – upaya antara lain : perlindungan pada perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan, telah dibentuk pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak kota surakarta (ptpas), pembentukan dan peningkatan kapasitas pos pelayanan terpadu (PPT) di 10 kelurahan (33 PPT pada tahun 2014), kelurahan rehabilitasi (sosial, psikologis, pendidikan dan ekonomi), rumah aman bila kondisi korban membutuhkan, serta pembangunan pojok asi di 51 kelurahan, taman cerdas di 6 kelurahan, zona aman sekolah, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak. Bidang-bidang KLA ada 4 (empat) yaitu: mengenai kesehatan, pendidikan, perlindungan dan partisipasi. Dalam kegiatan program KLA melibatkan sejumlah SKPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapermas (bidang perlindungan anak), bidang partisipasi anak, dan masyarakat.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Anak memerlukan perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- ❖ Penyiapan SDM masa depan yang berkualitas;
- ❖ Anak memerlukan ruang untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;
- ❖ Adanya resiko Kekerasan anak (ESKA dan *trafficking*).

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Ruang bermain anak belum menjadi prioritas pemerintah kabupaten/kota
- ❖ Terbatasnya kebijakan pemerintah untuk menyatukan isu hak anak kedalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota
- ❖ Belum terintegrasinya hak perlindungan anak ke dalam pembangunan kabupaten / kota
- ❖ Masih banyaknya anak yang “sering kembali” ke jalanan setelah dibina

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dan unsur muspida
- ❖ Dikeluarkannya SK Walikota Surakarta tentang Tim pelaksana PKLA
- ❖ Pengembangan KLA
 - Th 2006 : Pengembangan KLA dimulai dengan Komitmen unsur Muspida
 - Th 2008 : Dikeluarkan SK Walikota Surakarta tentang Tim Pelaksana PKLA
 - Th 2009 : Pengembangan KLA di 2 kecamatan dan 5 kelurahan dan pembentukan FAS
 - Th 2010 : KLA menjadi salah satu program prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJM Tahun 2010-2015
 - Th 2010 : Pengembangan KLA di 3 kecamatan dan 16 kelurahan
 - Th 2011 : Pendampingan dan pengembangan kecamatan/kelurahan layak anak. Pemanfaatan ruang publik

- yang diakses oleh anak (Taman Cerdas)
- Th 2011 : Pengembangan KLA di 10 kelurahan
 - Th 2012 : Dikeluarkan Perda Perlindungan Anak, berbagai Kebijakan yang Pro terhadap Pemenuhan Hak Anak
 - Th 2012 : Pengembangan KLA di 4 kelurahan
 - Th 2013 : Pengembangan KLA di 16 Kelurahan

Manfaat :

- ❖ Meningkatnya berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial;
- ❖ Terlindunginya hak anak yang berhadapan dengan hukum;
- ❖ Berkurangnya kekerasan kepada anak hingga hampir 100%;
- ❖ Meningkatnya pendidikan dan disiplin terhadap anak (bebas buta aksara karena adanya gerakan wajib jam belajar 18.30 – 20.30 WIB dan sekolah ramah anak);
- ❖ Meningkatnya kesehatan bagi anak melalui Kartu Pemeliharaan Kesehatan Anak dan puskesmas ramah anak;
- ❖ Meningkatnya kesejahteraan anak.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya anggaran yang cukup untuk sarana prasarana yang dibutuhkan;
- ❖ Komitmen bersama antara Pemda dengan akademisi, LSM, Masyarakat yang dinyatakan kedalam MoU;
- ❖ Adanya infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung program KLA;
- ❖ Memberikan peran kepada anak untuk mengembangkan diri melalui program yang mendukung kota layak anak.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

TAMAN PINTAR YOGYAKARTA ALTERNATIF LAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Produk inovasi	: Taman Pintar Yogyakarta
Jenis Inovasi	: Konseptual
Unit Pelaksana	: Kantor Pengelolaan Taman Pintar Yogyakarta
Penggagas	: Wali Kota Yogyakarta
Tahun inisiasi	: 2004
Tahun implementasi	: 2007
Kontak Person	: Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Yogyakarta serta Humas dan Pemasaran Taman Pintar Yogyakarta, Jl. Penembahan Senopati 1-3 Yogyakarta, Telp. 0274-583631 Fax. 0274-583664

Deskripsi :



Taman Pintar merupakan sebuah wahana atau pusat pembelajaran sains dan teknologi bagi anak-anak, serta wahana ekspresi, apresiasi dan kreasi sains dalam suasana yang menyenangkan, dan konten yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal (pengetahuan tentang budaya Jawa dan Kesultanan). Latar belakang bahwa sebelum tahun 2004, kota Yogyakarta yang mempunyai predikat sebagai kota pendidikan dan kota wisata belum memiliki "Icon" yang dapat mengemban sebutan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya "tool" untuk mewujudkan fasilitas layanan publik yang dapat mencerminkan keunggulan kompetitif kota sekaligus untuk menguatkan kapasitas warganya.

Tujuan Pembentukan Taman Pintar adalah menyediakan sarana pembelajaran sains bagi siswa yang mendukung kurikulum pendidikan; Memotivasi anak dan generasi muda untuk mencintai sains; Membantu guru dalam mengembangkan pengajaran di bidang sains; Mengenalkan budaya lokal bagi anak dan masyarakat secara umum; Menyebarkan informasi ilmu pengetahuan sains dan teknologi sesuai dengan perkembangan usia anak; Memberikan wisata alternatif sains. Strategi yang dilaksanakan adalah membentuk Tim pengembang Taman Pintar sebelum pembentukan Kelembagaan dan Struktur Organisasi. (Perwali Yogyakarta No. 22 Tahun 2007).

Faktor Pendorong inovasi :

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, kota pendidikan, dan kota pariwisata. Sebagai kota pendidikan, aktivitas kota banyak diwarnai oleh kegiatan pendidikan untuk segala tingkatan. Untuk mendukung predikat tersebut, kota Yogyakarta membangun sebuah "icon" yang disebut sebagai Taman Pintar.

Faktor Penghambat Inovasi :

Taman Pintar Yogyakarta mengalami keterbatasan untuk melakukan pengembangan program, kemitraan, dan promosi, dikarenakan Taman Pintar merupakan instansi pemerintah yang harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang berlaku.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Tahun 2006, pembangunan dan peresmian zona layanan playground gedung PAUD Barat dan Timur;
- ❖ Tahun 2007, pembangunan dan peresmian gedung oval lantai 1 & 2 serta gedung kotak lantai 1;
- ❖ Tahun 2008, grand opening semua fasilitas layanan Taman Pintar termasuk gedung kotak lantai 2 & 3, Tapak Presiden, dan gedung memorabilia.

Manfaat :

Melayani warga masyarakat di sekitar Yogyakarta, memenuhi kebutuhan pengetahuan tentang sains dan teknologi untuk para turis domestik maupun luar negeri dari berbagai kalangan dan usia.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Sebagai instansi pemerintah yang harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku sehingga menghambat inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu disepakati secara terus menerus melakukan konsultasi, koordinasi, dan diskusi dengan instansi terkait, baik di lingkungan Pemkot Yogyakarta, Provinsi DIY, maupun Pemerintah Pusat;
- ❖ Adanya dukungan dari Kepala Daerah, kemampuan berinovasi, kemitraan, serta menerapkan paradigma layanan pada masyarakat.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Buku APEKSI Jilid 9)



KELOMPOK INOVASI *TEKNOLOGI*

Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Ruang lingkup dari inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan.

SISPEDAP: SISTEM PENGELOLAAN DATA PEGAWAI BERBASIS WEB BPKP

Produk inovasi	: Pengelolaan ;Layanan Online Data Kepegawaian berbasis web
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP
Unit Pelaksana	: Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP
Tahun inisiasi	: 2011
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP

Deskripsi :



SISPEDAP merupakan sebuah sistem pengelolaan data pegawai berbasis web (online) sehingga dapat terhubung langsung dengan pegawai dan unit kerja di seluruh Indonesia di manapun dan kapanpun sepanjang terhubung dengan internet. Permasalahan dalam pengelolaan data pegawai dengan jumlah pegawai yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia memunculkan dorongan untuk menciptakan sistem pengelolaan kepegawaian. Sistem ini tidak serta merta dapat diterima langsung oleh seluruh instansi pemerintah, mengingat hampir seluruh instansi pemerintah menciptakan sistem kepegawaianya sendiri. Pegawai dan unit kerja dapat mengakses dan memutakhirkan data pegawai secara langsung (real time) dan setiap saat.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Perlunya optimalisasi pengelolaan data pegawai di seluruh Indonesia yang terintegrasi
- ❖ Keinginan untk mempercepat akses dan pemutakhiran data pegawai secara langsung (real time) dan setiap saat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Mahalnya membangun dan maintenance sistem;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ SDM yang mampu mengoperasikan sistem.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database SISPEDAP yang disesuaikan dengan alur data kepegawaian;
- ❖ Membuat alur kerja SISPEDAP beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem SISPEDAP (software dan hardware) sesuai dengan alur data kepegawaian ;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem SISPEDAP ;
- ❖ Internalisasi SISPEDAP kepada seluruh stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem SISPEDAP .

Manfaat :

- ❖ Tersedianya data pegawai yang selalu up-to-date;
- ❖ Akses data kepegawaian yang cepat, mudah dan setiap saat;
- ❖ Mempermudah dalam perencanaan dan kebutuhan pengembangan pegawai.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen seluruh jajaran pimpinan;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja manual (SOP);
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia

PORTAL RUMAH BELAJAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Produk inovasi	: Rumah Belajar berbasis web
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Pelaksana	: Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
Tahun inisiasi	: 2010
Tahun implementasi	: 2011
Kontak Person	: Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – (021) 741 8808

Deskripsi :



Rumah belajar merupakan portal pendidikan yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas pendidikan. Portal ini berisi bahan ajar untuk Guru, bahan belajar siswa (SD,SMP/MTs,SMA/MA, dan Perguruan Tinggi), wahana aktivitas komunitas / forum, bank soal dan katalog media pembelajaran.

Pemanfaatan Rumah Belajar ditujukan untuk siswa, guru, dan masyarakat luas. Dalam rangka meningkatkan layanan dan kebutuhan sumber belajar bagi peserta didik, melalui program layanan TIK untuk pembelajaran seperti bahan belajar interaktif dilengkapi dengan media pendukung gambar, animasi, video dan simulasi. Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan Program layanan TIK pembelajaran melalui media berbasis web dan televisi, pada tanggal 15 Juli 2011.

Media berbasis web berupa Portal Rumah Belajar untuk semua masyarakat Indonesia dan bahan pembelajaran berbasis televisi yang diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus yaitu media TV/video untuk SLB-B (kategori B/Tuna Rungu).

Portal rumah belajar menyediakan fasilitas Kelas Maya, Sumber Belajar, Pengembangan Profesi Berkelanjutan, Kurikulum 2013 dan Jelajah Luar Angkasa. Rumah belajar dapat dimanfaatkan siswa, guru, dan masyarakat luas. Portal tersebut dapat diakses di <http://belajar.kemdikbud.go.id>.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya keinginan untuk meningkatkan mutu layanan e-pembelajaran melalui penerapan standar nasional pendidikan;
- ❖ Adanya keinginan untuk meningkatkan pemerataan layanan e-pembelajaran melalui penyebaran dan pemerataan ilmu pengetahuan dalam bentuk objek pembelajaran;
- ❖ Adanya keinginan untuk Meningkatkan efisiensi layanan e-pembelajaran melalui penggunaan bersama sumber belajar dalam bentuk mekanisme share dan reuse objek pembelajaran.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Pengguna layanan harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke masing masing sub sistem sehingga kurang efektif;
- ❖ Sumber bacaan dan database pelajaran masih cukup terbatas jumlahnya;
- ❖ Konten masih sedikit dan adanya kesulitan dalam mengupdate isi konten.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Keinginan untuk meningkatkan layanan dan kebutuhan sumber belajar bagi peserta didik dan memfasilitasi ketersediaan konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik;
- ❖ Memasukkan program/ kegiatan kedalam perencanaan;
- ❖ Mempersiapkan anggaran khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana serta sistem aplikasinya;
- ❖ Menyusun alur kerja sistem(aplikasi rumah belajar dan sub aplikasinya);
- ❖ Melakukan pengembangan sistem (Software) sesuai dengan alurkerja yang telah disusun;
- ❖ Pelatihan kepada petugas operator sistem untuk menjalankan prosedur yang telah ditentukan dan mengisi konten sistem;
- ❖ Melakukan ujicoba sistem pada kalangan internal.

Manfaat :

- ❖ Sumber Bahan Belajar
 - Dapat memperoleh sumber bahan belajar yang meliputi Materi Pokok; Modul Online; Pengetahuan Populer; Bank Soal/Uji Kompetensi; Multimedia Interaktif; Video on Demand;
 - Dapat berbagi ilmu dengan cara mengirimkan karya berupa bahan belajar berbasis web secara langsung ke Rumah belajar untuk dipublikasikan;
 - Dapat mendownload bahan belajar pada rumah belajar dan menggunakannya sesuai kebutuhan belajar Anda. 2. Sebagai Sarana Komunikasi dan Kolaborasi Antarsekolah.
- ❖ Sebagai Sarana Komunikasi dan Kolaborasi Antarsekolah

- Dapat berkomunikasi, berbagi ide dan pengalaman dengan pengguna lainnya melalui fasilitas forum;
- Dapat memperoleh dan mengirimkan informasi mengenai berita dan artikel serta event yang terjadi dalam komunitas pendidikan;
- Memperoleh ruang (space) untuk menampilkan profil sekolahnya sebagai subdomain rumah belajar;
- Dapat mengikuti kelas maya melalui fitur telekolaborasi rumah belajar.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen yang tinggi untuk meningkatkan layanan dan kebutuhan sumber belajar bagi peserta didik dan memfasilitasi ketersediaan konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik;
- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana serta IT;
- ❖ SDM yang terlatih dan paham IT untuk mengisi konten ;
- ❖ Adanya dukungan dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan;
- ❖ Tersedianya jaringan internet;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia dan pencarian melalui sumber sumber di internet

SISTEM INFORMASI LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK ONLINE (SILAYAN) KEMENTERIAN PERTANIAN

Produk inovasi : *One Stop Services for Public Information* di Kementerian Pertanian

Jenis Inovasi : Teknologi

Penggagas : Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian

Unit Pelaksana: Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian

Tahun inisiasi : 2011

Tahun implementasi : 2012

Kontak Person : Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian – (021-7816485)

Deskripsi:



Sistem Informasi layanan Permohonan Informasi Publik (SILAYAN) Online merupakan aplikasi pelayanan informasi publik berbasis web sebagai implementasi Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Silayan Online ini merupakan transformasi mekanis pelayanan permohonan informasi dan pengajuan keberatan. Sistem ini terintegrasi dengan tiga aplikasi informasi publik lainnya yaitu Sistem Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik (SIBERAT), Sistem Database Dokumen Informasi Publik (SIDADO) dan Sistem Rekapitulasi Informasi Publik (SIREKAP). Sistem ini dapat pula dikatakan sebagai One Stop

Services for Public Information, yang sebelumnya masih berjalan secara manual dan parsial.

Tujuan dibangunnya sistem tersebut adalah untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan

informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Untuk memperkuat pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Pertanian telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian serta penyiapan sarana prasarana dan media pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pimpinan terkait dengan pemberian pelayanan informasi publik yang efektif;
- ❖ Adanya undang-undang Nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik
- ❖ Adanya peraturan Komisi Informasi (PerKi) Nomor 1/2010 terkait Pelaporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian/Lembaga;
- ❖ Adanya rata-rata kenaikan permohonan informasi publik sejak tahun 2010.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Belum adanya pemahaman dan komitmen yang sama mengenai Pengelolaan Layanan Informasi Publik, sehingga belum menjadi kegiatan yang prioritas;
- ❖ Terbatasnya SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik (pranata kehumasan, pranatakomputer, arsiparis, pustakawan, dan perancang peraturan perundang-undangan);
- ❖ Informasi Publik yang ditampilkan di situs web UK/UPT masih terbatas pada kegiatan utama/tupoksi belum menampilkan berbagai jenis informasi publik yang diamanahkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Menyiapkan teknologi aplikasi sistem informasi layanan permohonan informasi publik (SILAYAN) Online
- ❖ Membuat mapping sistem dan database SILAYAN yang disesuaikan dengan alur data layanan;
- ❖ Membuat alur kerja SILAYAN beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem SILAYAN (software dan hardware) sesuai dengan alur data layanan ;
- ❖ Menyiapkan SDM yang berkompeten untuk mengelola aplikasi
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem SILAYAN;
- ❖ Internalisasi SILAYAN kepada seluruh stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem SILAYAN.
- ❖ Sosialisasi kepengguna layanan terkait aplikasi
- ❖ Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap aplikasi (SILAYAN) Online.

Manfaat :

- ❖ Pemohon dapat melakukan permohonan informasi publik secara online;
- ❖ Pemohon dapat melakukan pemantauan terhadap proses permohonannya dan terjamin hak-haknya;
- ❖ Berkurangnya sengketa informasi dan keberatan;
- ❖ Waktu pelayanan informasi publik semakin cepat.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran aparatur pemerintah;
- ❖ Adanya pemahaman pentingnya Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- ❖ Menjadikan pengelolaan layanan informasi publik sebagai kegiatan prioritas;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja manual;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan) yang telah dibangun agar bisa berkelanjutan.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia

SISTEM KOMPUTERISASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS (PROGRAM LAYANAN KESEHATAN BERBASIS SIMPUS KOTA TEGAL) KOTA TEGAL

Produk inovasi	: Layanan kesehatan berbasis Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)
Jenis Inovasi	: Teknologi
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan kota Tegal
Penggagas	: WalikotaTegal
Tahun inisiasi	: 2008
Tahun implementasi	: 2011
Kontak Person	: Dinas Kesehatan, Anggota Tim Akselerasi Simpus kota Tegal. (Bagian P3PL), Jl. Proklamasi 16 Tegal, Telepon : 0283-353351, email : m3siswoyo@gmail.com

Deskripsi :



Sistem Komputerisasi Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas (Program Layanan Kesehatan Berbasis Simpus Kota Tegal) adalah mekanisme pelayanan kesehatan dasar puskesmas dengan menggunakan komputerisasi, dimana seluruh pelayanan terhadap pasien dilakukan secara komputerisasi online (elektronik). Semula pelayanan dasar kesehatan mengalami beberapa kendala yaitu antrian yang lama, terlalu banyak pekerjaan administrasi, kekurangan tempat arsip kartu pasien, kartu medis pasien sering hilang. Saat ini pemerintah kota Tegal melakukan perubahan terhadap mekanisme pelayanan kesehatan dasar

berbasis IT Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) dengan tujuan mempercepat pelayanan mulai dari waktu pendaftaran, antri, serta mempermudah menemukan rekam medis/*medical record*, laporan bulanan, data penyakit, mengetahui dengan cepat obat kadaluarsa, obat habis, alergi obat.

Strategi yang dijalankan adalah melakukan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan yang diolah oleh Tim Mutu Puskesmas dan KOICA serta Tim Dinas Kesehatan Kota Tegal dan diserahkan kepada Walikota Tegal, kemudian hasil telaah tim dibuat proposal dan rencana kegiatan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Keinginan untuk mempercepat pelayanan;
- ❖ Keinginan untuk merubah sistem pelayanan kesehatan dasar puskesmas;
- ❖ Komitmen pimpinan.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Belum ada puskesmas di Indonesia yang menggunakan sistem komputerisasi, sehingga tidak contoh sebagai acuan di awal pelaksanaan program th 2008;
- ❖ Banyaknya alur/tahapan yang harus dilalui para pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- ❖ Banyaknya petugas medis (paramedis) yang belum mengenal dan aham penggunaan perangkat komputer.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pemerintah Kota Tegal melalui Puskesmas Margadana – Dinas Kesehatan kota Tegal dan Korea Junior Expert (KJE) menyusun anggaran yang dibutuhkan dan membuat proposal;
- ❖ Proposal dipresentasikan di hadapan manajemen KOICA Republik Korea di Jakarta;
- ❖ Pengecekan lapangan/survei oleh manajemen KOICA ke Puskesmas Margadana;
- ❖ Rapat Tim KJE dan Manajemen KOICA untuk memberikan persetujuan terhadap proposal Pemkot Tegal;
- ❖ Menyiapkan Hardware bersama konsultan yang ditunjuk KOICA;
- ❖ Menyiapkan software (kerjasama puskesmas dan KOICA);
- ❖ Dana operasional sistem ditanggung pemkot Tegal lewat anggaran Dinas Kesehatan atau sumber lain;
- ❖ Pembentukan tim akselerasi SIMPUS, Tim Pengajar, dan Tim Pemantau oleh Kadinkes agar semua puskesmas dapat menggunakan sistem berbasis IT;
- ❖ Instruksi Walikota Tegal tentang e-government untuk memperkuat pelaksanaan program.

Manfaat :

- ❖ Kecepatan pelayanan dan keakuratan data lebih meningkat, sehingga efisiensi waktu dan efektifitas kerja meningkat;
- ❖ Kemudahan dalam menemukan rekam medis/*medical record* setiap pasien yang datang berobat ke Puskesmas; laporan bulanan dan data penyakit;
- ❖ Data bisa di print out sesuai dengan tingkat kebutuhan, dan mudah dipelajari karena menggunakan *simple design, automatic warning* dan *web base platform*.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pimpinan untuk menerapkankualitas pelayanan berbasis elektronik
- ❖ Adanya infrastruktur sarana dan prasarana seperti anggaran (pendanaan), komputer dan jaringan, sumber daya manusia yang mau belajar.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Buku APEKSI Jilid 9)

SURABAYA *SINGLE WINDOW* (SSW) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Pelayanan Terintegrasi berbasis elektronik
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Bambang DH (Walikota)
Unit Pelaksana	: Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap
Tahun inisiasi	: 2007
Tahun implementasi	: 2007
Kontak Person	: Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya - Jalan Menur No. 31 B - (031) 598 2284

Deskripsi :



Surabaya Single Window (SSW) merupakan sistem pelayanan perijinan online yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya. Tujuannya SSW antara lain untuk memperpendek waktu pelayanan dan pengecekan data serta persyaratan bisa lebih cermat dilakukan. Melalui SSW, seluruh izin dapat langsung diproses diproses bersamaan. Rentang waktu penyelesaian perizinan di SSW ini beragam, mulai dari 14 hari hingga 30 hari tergantung jenis izin yang diajukan. Beberapa izin yang bisa diurus melalui SSW yakni Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), Amdal Lalin, UKL-UPL, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Dengan sistem layanan perizinan online tersebut, masyarakat bisa memasukkan dokumen dari rumah sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Seluruh proses SSW menggunakan data elektronik, terintegrasi dan bisa diakses secara online dari rumah, sehingga semakin memperkecil peluang tatap muka antara pemohon dengan pelaksana tugas di pemerintahan. Dengan begitu, tidak ada peluang nepotisme karena semua dilakukan serba online. Dengan mekanisme baru ini, dapat terwujud adanya kepastian waktu penyelesaian dan pemohon dapat memonitor progres status berkasnya secara online dan riiltime. Selain itu, nilai tambah dari sistem tersebut adalah selain memangkas alur birokrasi juga memudahkan pemohon memantau progres perizinan yang tengah diurus. Untuk mendukung kenyamanan pemohon, UPTSA dilengkapi berbagai fasilitas diantaranya layar informasi touch screen, aplikasi online, cctv, hingga wi-fi area. Disamping itu suasana ruang tunggu yang nyaman semakin memanjakan para pemohon. "Semua fasilitas tersebut diimbangi dengan peningkatan SDM karyawan berupa pelatihan-pelatihan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perijinan yang cepat, murah dan transparan;
- ❖ Keinginan pemimpin daerah yang sangat tinggi;
- ❖ Komitmen seluruh SKPD teknis yang memiliki kewenangan dan regulasi.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masyarakat masih banyak yang gagap teknologi;
- ❖ Pelayanan yang tidak masuk di jaringan maksimal 15 menit harus ditangani;
- ❖ Penandatanganan ijin masih di dinas-dinas.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database pelayanan terpadu disesuaikan dengan alur kerja pelayanan terpadu;
- ❖ Membuat alur kerja SSW beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem SSW (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja pelayanan terpadu;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem SSW;
- ❖ Internalisasi SSW kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem SSW.

Manfaat :

- ❖ Seluruh izin dapat langsung diproses secara bersamaan;
- ❖ Melalui layanan perizinan online tersebut, masyarakat bisa memasukkan dokumen dari rumah;
- ❖ Nilai tambah dari sistem tersebut selain memangkas alur birokrasi juga memudahkan pemohon memantau progres perizinan yang tengah diurus;
- ❖ Dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara nyata.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah;
- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana serta IT;
- ❖ SDM yang terlatih dan paham IT;
- ❖ Adanya sinergi antara Kominfo, dinas Teknis dan UPTSA;

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-PAYMENT) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Pembayaran Online
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Tri Risma Harini (Walikota Surabaya)
Unit Pelaksana	: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
Tahun inisiasi	: 2013
Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Deskripsi :



E- Payment merupakan sistem pencairan dana APBD secara elektronik. E-payment dapat mempermudah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya. Disamping itu, E-payment juga dapat mempercepat pembayaran uang proyek untuk rekanan pada umumnya. Melalui E-payment penyedia jasa dan barang cukup melengkapi persyaratan administrasi secara online. Setelah melengkapi persyaratan, penyedia barang dan jasa menerima pembayaran pada bank yang ditunjuk setelah dua hari. Pembayaran dilakukan melalui bank Pemkot yang ditransfer ke bank perusahaan yang menjadi rekanan. Tak hanya itu, dengan e-payment banyak yang dapat dihemat Pemkot, mulai dari waktu hingga penggunaan kertas juga untuk mengurangi kesalahan pada pekerjaan yang dilakukan secara manual

serta meminimalisir pertemuan antara PPKM dengan penyedia barang dan jasa. Tujuan dari e-Payment adalah mengurangi kemungkinan adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) bisa muncul.

Sebelum adanya e-Payment, pengurusan administrasi dalam hal pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa masih dilakukan secara manual, yaitu berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan dikirimkan dari SKPD kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berupa hard copy. Proses administrasi manual seperti itu dirasa kurang efektif dan tidak efisien waktu. Dengan adanya e-Payment, maka berkas-berkas persyaratan berupa hard copy tidak lagi dikirimkan ke Dinas Pendapatan, tetapi disimpan oleh pihak SKPD sebagai arsip dan yang dikirim ke Dinas adalah berupa dokumen elektronik yaitu e-SPM (Surat Permintaan Membayar elektronik) dan check list kelengkapan berkas-berkas tersebut melalui aplikasi SIPK (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan). Dengan adanya perubahan sistem pengadministrasian pencairan dana dari manual menjadi elektronik (online), maka diharapkan akan dapat mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana, khususnya dalam hal ini kepada para penyedia barang dan jasa.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Keinginan untuk memperbaiki proses administrasi manual kurang efektif dan tidak efisien waktu;
- ❖ Pengurusan administrasi pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa masih dilakukan secara manual, dimana berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan dikirimkan dari SKPD kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berupa hard copy.
- ❖ Adanya komitmen pimpinan daerah yang tinggi untuk menghilangkan KKN dalam pembayaran kepada rekanan.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Perlu waktu untuk mengubah mindset para pegawai untuk membangun dan menjalankan e-payment;
- ❖ Adanya resistensi penolakan pada beberapa SKPD;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ Adanya keterbatasan SDM untuk mengoperasikan aplikasi e-payment;
- ❖ Masih banyaknya SKPD yang belum memahami penggunaan aplikasi e-payment.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database sistem e payment disesuaikan dengan alur kerja sistem pembayaran;
- ❖ Membuat alur kerja e-payment beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem e-payment (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja musrenbang;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem e-payment;
- ❖ Internalisasi e-payment kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem e payment.

Manfaat :

- ❖ Mempermudah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya.
- ❖ Dapat mempercepat pembayaran uang proyek untuk rekanan pada umumnya.
- ❖ Melalui e-payment penyedia jasa dan barang cukup melengkapi persyaratan administrasi secara online.
- ❖ Mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana, khususnya dalam hal ini kepada para penyedia barang dan jasa.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dan rekanan;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem pembayaran berbasis online;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem pembayaran berbasis online;
- ❖ Membangun sistem pembayaran sesuai dengan alur kerja (SOP);
- ❖ Menyusun SOP penyusunan sistem pembayaran berbasis online;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK (E-BUDGETING) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Penganggaran Program dan Kegiatan berbasis Online
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Bambang DH (Walikota)
Unit Pelaksana	: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Deskripsi :



Sistem e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran di lingkungan pemerintahan kota Surabaya secara online. Dalam sistem ini untuk membuat sebuah anggaran, dibutuhkan komponen-komponen penyusun yang mana komponen-komponen penyusun tersebut merupakan hasil dari survey di lapangan. Komponen penyusun terdiri dari tiga jenis pengelompokan, yaitu : Standar Harga Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Analisa Belanja (SAB). Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya dan juga dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan. Penggunaan sistem online ini telah berdampak pada penghematan anggaran. Dicontohkan Wali Kota, untuk perjalanan dinas

selama satu tahun, usulan anggaran dari masing-masing dinas harus melalui satu atap dan ternyata bisa menghemat Rp5 miliar dari Rp14 miliar menjadi Rp9 miliar.

Fitur yang terdapat dalam sistem Surabaya e-budgeting :

- Pembuatan komponen-komponen penyusun;
- Pembuatan anggaran;
- Pengiriman rincian anggaran;
- Evaluasi anggaran;
- Daftar harga dan daftar penyusun komponen;
- Rekap anggaran;
- History rincian anggaran;
- Setting kode rekening komponen penyusun anggaran.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pimpinan daerah untuk mempercepat proses penganggaran;
- ❖ Mengurangi kebocoran anggaran APBD;
- ❖ Mempercepat proses penyusunan RKA SKPD;
- ❖ Mengurangi penggunaan kertas;

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Perlu waktu untuk mengubah mindset para pegawai untuk membangun dan menjalankan e-budgeting;
- ❖ Adanya resistensi penolakan pada beberapa SKPD;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ Adanya keterbatasan SDM untuk mengoperasikan aplikasi e-budgeting;
- ❖ Masih banyaknya SKPD yang belum memahami penggunaan aplikasi e-budgeting.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database budgeting disesuaikan dengan alur kerja manajemen penganggaran;
- ❖ Membuat alur kerja e budgeting beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem e budgeting (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja manajemen kinerja;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem e budgeting;
- ❖ Internalisasi e budgeting kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem e budgeting.

Manfaat :

- ❖ Penyusunan Anggaran SKPD menjadi lebih cepat;
- ❖ Mempermudah dan mempercepat SKPD untuk melakukan perubahan atau menambahkan komponen pada rincian RKA jika sudah ada ijin dari tim;
- ❖ Tersedianya standar harga (SBU) untuk menyusun anggaran;
- ❖ Mendapatkan Informasi dan data rencana anggaran lebih cepat.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dan SKPD;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem penganggaran berbasis online;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem penganggaran berbasis online;
- ❖ Membangun sistem penganggaran sesuai dengan alur kerja (SOP);

- ❖ Menyusun SOP penyusunan sistem penganggaran berbasis online;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA SECARA ELEKTRONIK (*E-PERFORMANCE*) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Informasi Manajemen Kinerja Pegawai
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Bambang DH
Unit Pelaksana	: Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan)
Tahun inisiasi	: 2010
Tahun implementasi	: 2010
Kontak Person	: Aplikasi ePerformance bisa menghubungi administrator di (031)-5312144 Ext-391 / Email : eperformance@bp.surabaya.go.id

Deskripsi :



E-Performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan dari *E-performance* antara lain dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Pemkot Surabaya dalam proses pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Cara kerja *e-performance* adalah dengan memasukan update data, input aktivitas, penugasan-penugasan, melalui akun individu sesuai yang terintegrasi

dengan website pemerintahan daerah dan ditunjang dengan pemberian Uang Kinerja sesuai poin yang didapat dari input-input tupoksi yang telah dibuatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Uang kinerja tersebut adalah sejumlah uang yang diberikan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output dan atau outcome kegiatan sebagai Sasaran Kinerja Individu (SKI) ditetapkan oleh atasan Pegawai yang bersangkutan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Kerja Tahunan pada SKPD/Unit Kerja. Hasilnya saat itu Pemerintah Kota menghapus sistem pendapatan pada PNS menggunakan honorarium seperti honor panitia seminar, ketua pelaksana seminar dan lainnya. Kemudian diganti dengan pemberian reward dengan sistem berdasarkan target kinerja yang dulu berebut di dinas yang banyak proyek sekarang mereka bisa sama dengan yang dinas lain. Bahkan level kecamatan dan kelurahan sekarang Pegaewainya pada berlomba-lomba meningkatkan kinerja sesuai target yang dibebankan. Hal ini disebabkan *reward*-nya tinggi tanpa ada penyimpangan. Kalau yang kinerjanya malas otomatis *take home pay*-nya sedikit.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan kinerja PNS di lingkungan Kota Surabaya;
- ❖ Seringnya terjadi keterlambatan dalam proses surat-menyurat yang dilakukan secara manual;
- ❖ Perlunya pengelolaan surat-surat dan dokumen-dokumen secara cepat dan mudah dalam mendapatkannya kembali;
- ❖ Mengurangi penggunaan kertas;

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Adanya penolakan pada saat pengenalan sistem;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ SDM yang mampu mengoperasikan sistem terbatas;

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database performance disesuaikan dengan alur kerja manajemen kinerja;
- ❖ Membuat alur kerja e performance beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem e performance (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja manajemen kinerja;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem e performance;
- ❖ Internalisasi e performance kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem e performance.

Manfaat :

- ❖ Dapat memberikan *reward* dan *punishment* terhadap pegawai secara adil dan transparan;
- ❖ Meningkatkan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja manual;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

E-SURAT (TATA PERSURATAN DIGITAL) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Tata Persuratan Digital (Aplikasi E Surat)
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi 2012
Unit Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informasi
Tahun inisiasi	: 2012
Kontak Person	: Dinas Komunikasi dan Informasi
	Tahun implementasi : 2012

Deskripsi :



E-Surat merupakan transformasi surat dalam bentuk digital yang diciptakan untuk merespon informasi yang masuk atau keluar. Adanya sistem e-Surat itu memudahkan dalam surat menyurat. E-surat bisa mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk. Sehingga seorang pejabat bisa memberikan respon yang cepat. E-surat juga bisa menekan penggunaan kertas sehingga paperless. Yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dokumen akan menjadi lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT. Sistem e surat dibuat karena telah terjadi beberapa masalah, misalnya e-surat dibuat berawal dari penemuan dokumen palsu, oleh karena itu penyusunan e-surat juga ditujukan untuk menekan pemalsuan dokumen lainnya.

Adapun tujuan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah kegiatan surat-menyurat dalam pemerintahan di Pemerintah Kota Surabaya, agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat. Proses surat menyurat dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi Internet. Beberapa keunggulan aplikasi e-surat :

- a. Dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi Internet.
- b. Penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan permasalahan.
- c. Proses pencarian surat (searching) dilakukan lebih mudah, lebih cepat dan dapat dicetak pada saat dibutuhkan.
- d. Informasi adanya surat masuk dapat diketahui dengan cepat melalui SMS (Short Message System).
- e. Pejabat pemberi disposisi tidak harus berada di kantor, tetap dapat memberikan disposisi dan memantau perkembangan maupun laporannya via internet.
- f. Penghematan biaya kertas karena paperless, penghematan waktu karena berbasis surat elektronik.
- g. Dapat melakukan verifikasi tandatangan melalui SMS.
- h. Terdapat fitur remainder batas waktu pelaksanaan disposisi
- i. Pengaturan hak akses hanya untuk yang berhak mengakses.
- j. Dapat dikembangkan fitur lain sesuai kebutuhan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Diketemukannya surat-surat dan dokumen-dokumen palsu;
- ❖ Seringnya terjadi keterlambatan dalam proses surat-menyurat yang dilakukan secara manual;
- ❖ Perlunya pengelolaan surat-surat dan dokumen-dokumen secara cepat dan mudah dalam mendapatkannya kembali;
- ❖ Mengurangi penggunaan kertas;

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Perlu waktu untuk mengubah mindset para pegawai untuk menjalankan aplikasi surat menyurat elektronik tersebut
- ❖ Adanya penolakan pada saat pengenalan sistem;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ Adanya keterbatasan SDM untuk mengoperasikan aplikasi surat menyurat elektronik

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database tata persuratan disesuaikan dengan alur kerja tata persuratan;
- ❖ Membuat alur kerja e-surat beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem e-surat (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja tata persuratan;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi pegawai dalam penggunaan aplikasi surat menyurat elektronik;
- ❖ Ujicoba sistem aplikasi surat menyurat elektronik;
- ❖ Internalisasi aplikasi surat menyurat elektronik kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem e-surat.

Manfaat :

E-surat dapat mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk. Disamping itu, penggunaan sistem e-surat juga bisa menekan penggunaan kertas sehingga paperless. Dalam hal pengarsipan dokumen surat-menyurat akan menjadi lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem e-surat;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem e-surat;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja (SOP);
- ❖ Menyusun SOP mekanisme penggunaan e-surat;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

KLINIK KURIKULUM 2013 KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Penyajian Kurikulum 2013 secara online
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Deskripsi :



Klinik Kurikulum 2013 merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan menyajikan rancangan kurikulum yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan serta menjadi sarana komunikasi bagi sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang dinilai menggunakan pendekatan ilmiah. Pada tahun 2013, pemerintah meluncurkan kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SLTA. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum-kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogi modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membentuk jejaring.

Tujuannya adalah sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi bagi sekolah dalam menjalankan kurikulum baru 2013. Karena perubahan mendasar seperti penataan pola pikir, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses, dan penyesuaian beban perlu diterapkan di setiap sekolah. Elemen yang berubah seperti Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian perlu diketahui oleh semua pihak.

Strategi yang dilakukan untuk menyebarkannya adalah dengan memanfaatkan jaringan sosial media dan website dinas pendidikan kota Surabaya. Dengan adanya Klinik Kurikulum ini masyarakat dapat mengetahui dan mengakses berbagai informasi terkait dengan implementasi kurikulum 2013.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pimpinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan juga adanya kebijakan yang mendukung;
- ❖ Kebutuhan masyarakat akan informasi terkait implementasi kurikulum 2013.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Membutuhkan koneksi internet sehingga tidak semua orang yang dapat mengakses internet;
- ❖ Koneksi internet juga tidak semuanya yang berjalan dengan cepat karena jaringan yang belum memadai;
- ❖ Budaya belajar masyarakat yang cenderung menunggu dari pihak terkait (dinas pendidikan/ sekolah);
- ❖ Sosialisasi kurikulum 2013 dari pemerintah pusat yang belum maksimal.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Mempersiapkan anggaran untuk pengadaan sistem online;
- ❖ Melakukan MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Mempersiapkan hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Mapping kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan kementerian pendidikan dan budaya;
- ❖ Mempersiapkan petugas yang akan mengisi data awal untuk dilatih;
- ❖ Melakukan sosialisasi kemasyarakatan untuk menggunakan Sistem.

Manfaat :

- ❖ Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait implementasi kurikulum 2013 secara online;
- ❖ Sebagai bukti bahwa implementasi kurikulum 2013 telah diterapkan di Surabaya.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Pemahaman terhadap materi kurikulum 2013;
- ❖ Inisiasi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ Tersedianya anggaran untuk pengadaan sistem;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan);
- ❖ Sosialisasi ke masyarakat tentang penggunaan sistem tersebut.

Teknik Validasi	: Observasi
Sumber	: Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

RAPORT ONLINE (RAPORT BERBASIS ELEKTRONIK) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem penyampaian raport berbasis elektronik
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Kepala Dinas Pendidikan 2012
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Deskripsi :



Raport online merupakan sebuah jawaban untuk melakukan percepatan dalam penulisan raport dan penyamaan persepsi penilaian di pemerintah kota dalam rangka menyambut implementasi kurikulum 2013. Perubahan metode penilaian yang otentik menjadikan format penulisan *raport* menjadi lebih kompleks karena harus menyiratkan kemampuan siswa tidak hanya dalam bentuk angka tetapi sebuah deskripsi. Disamping itu, *raport online* dapat memudahkan wali murid untuk melihat rapor putra-putrinya tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Rapor online ini akan berbentuk deskripsi dalam memberikan penilaian kepada siswa, sehingga nantinya para orang tua dan guru dapat dengan mudah memantau perkembangan pendidikan seorang siswa di sekolah.

Raport online ini solusi yang bisa memudahkan guru untuk memberikan

penilaian ke siswanya. Pasalnya kurikulum 2013 ini tak lagi berisi angka-angka saja, tetapi ditekankan pada diskripsi dari tiga penilaian siswa yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Jika penilaian ini dilakukan secara manual, dipastikan akan merepotkan guru karena setiap siswa saja ada tujuh lembar yang harus diisi lengkap dengan diskripsinya. *Raport online* juga bisa dipakai orangtua siswa untuk mengontrol perkembangan anaknya. Nantinya mereka akan diberi password untuk bisa membuka raport online anaknya.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan;
- ❖ Adanya kebijakan yang mendukung;
- ❖ Sosialisasi yang cukup rutin kepada para stakeholder (sekolah, orangtua dan siswa).

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ SDM yang mampu mengoperasikan sistem terbatas.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database raport online disesuaikan dengan alur kerja sistem pengendalian kegiatan;
- ❖ Membuat alur kerja beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem raport online (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja manajemen kinerja;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem raport online;
- ❖ Internalisasi raport online kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem raport online.

Manfaat :

- ❖ Membantu wali murid agar dapat melihat atau memonitor raport;
- ❖ Membantu murid untuk melihat nilai hasil belajar.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja manual;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi	: Observasi
Sumber	: Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis web
Jenis Inovasi	: Teknologi
Pengagas	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Tahun inisiasi	: 2012 Tahun implementasi : 2013
Kontak Person	: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Deskripsi :



Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan siswa baru, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime). Proses penerimaan peserta didik baru menjadi hal yang selalu dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran sebagai awal pendataan dan seleksi peserta didik yang akan masuk pada tahun pelajaran baru. PPDB Online dinilai mampu mewujudkan pelayanan PPDB yang prima (lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, efektif dan efisien) kepada masyarakat dan penyelenggara. Secara umum tujuan penerapan SIAP PPDB Online, antara lain: meningkatkan mutu

layanan pendidikan; menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat dan transparan; melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien; menyediakan basis data sekolah yang akurat; memberi fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan akurat.

Dalam menjalankan sistem ini dilakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah agar memanfaatkan sistem secara optimal, selain itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan dan jadwal pendaftaran sebelum program penerimaan siswa baru dimulai.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pimpinan untuk menjalankan program yang dicanangkan;
- ❖ Keterbukaan informasi publik.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Masyarakat sudah terbiasa dengan budaya lama dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru, sehingga tidak mempersiapkan diri untuk mengikuti sistem baru;
- ❖ Membutuhkan koneksi internet sehingga tidak semua orang yang dapat mengakses internet
- ❖ Koneksi internet juga tidak semuanya yang berjalan dengan cepat karena jaringan yang belum memadai.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Mempersiapkan anggaran untuk pengadaan sistem online;
- ❖ Melakukan MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Mempersiapkan hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Mapping data Sekolah dan kebutuhan siswa;
- ❖ Mempersiapkan petugas yang akan mengisi data awal untuk dilatih;
- ❖ Melakukan sosialisasi kemasyarakatan untuk menggunakan Sistem PPDB Online.

Manfaat :

- ❖ Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah
 - Memberikan akses yang luas kepada masyarakat;
 - Sinergitas data antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru;
 - Tersedianya sebuah basis data terintegrasi bagi Pihak Dinas Pendidikan maupun Pihak Sekolah;
 - Efisiensi pembiayaan;
 - Meningkatkan reputasi sekolah;
 - Mengurangi resiko terjadinya KKN;
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam penguasaan Teknologi Informasi.
- ❖ Bagi Siswa dan Orang Tua Siswa
 - Mempermudah untuk mengikuti pendaftaran siswa baru;
 - Mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru;
 - Mendapat fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan;
 - Meningkatkan ketertiban kemudahan dalam proses penerimaan siswa baru.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ Tersedianya anggaran untuk pengadaan sistem;

- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan);
- ❖ Sosialisasi ke masyarakat tentang penggunaan sistem tersebut;
- ❖ Kesiapan masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-MUSRENBANG) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Web
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Bambang DH (Walikota)
Unit Pelaksana	: Badan Perencanaan Kota Pemkot Surabaya
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Badan Perencanaan Kota PemKot Surabaya

Deskripsi :



E-musrenbang (Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun secara online. Terbentuknya e-musrenbang berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat Surabaya yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah kota Surabaya. E-musrenbang ini tentunya memberikan kontribusi/pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang. E-Musrenbang diusulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan melalui pembahasan yang intens dan mendalam.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya tuntutan masyarakat Kota Surabaya akan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah kota Surabaya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- ❖ Keinginan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang akurat;
- ❖ Tingkat kecepatan waktu yang diperlukan untuk merekapitulasi data rencana program dan kegiatan;
- ❖ Kemudahan akses warga untuk mengetahui kepastian usulan mereka telah dimasuk dan verifikasi oleh Tim Musrenbang.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Mahalnya membangun dan maintenance sistem;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ SDM yang mampu mengoperasikan sistem.
- ❖ Tingginya jumlah warga yang masih belum 'melek' internet

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database musrenbang disesuaikan dengan alur kerja musrenbang;
- ❖ Membuat alur kerja e-musrenbang beserta manajemen nya;
- ❖ Membangun sistem e-musrenbang (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja musrenbang;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem e-musrenbang;
- ❖ Internalisasi e-musrenbang kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem e musrenbang.

Manfaat :

- ❖ Menjamin keakuratan data rencana program dan kegiatan pembangunan daerah;
- ❖ Memastikan ketepatan sasaran kegiatan;
- ❖ Mempermudah pengelompokan jenis usulan pekerjaan;
- ❖ Waktu yang diperlukan untuk rekapitulasi data lebih cepat dan efisien;
- ❖ Lebih mudah memperkirakan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan atas usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen dari Bappeda untuk menginisiasi pembangunan e-musrenbang
- ❖ Mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan usulan melalui e-musrenbang
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja musrenbang;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem dan masyarakat pengguna e-musrenbang.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH (E-BUDGETING) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem pengelolaan keuangan sekolah berbasis elektronik
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Kepala Dinas Pendidikan 2012
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Deskripsi :



E-budgeting sekolah merupakan sistem informasi pengelolaan keuangan sekolah yang dibangun untuk optimalisasi dan efisiensi terkait anggaran. Dalam rangka optimalisasi dan efisiensi terkait penyusunan anggaran sekolah, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah melakukan salah satu terobosan baru dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) secara online atau yang lebih dikenal dengan e-budgeting. Kegiatan penyusunan anggaran sekolah 2013 ini telah secara resmi menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) on-line.

Tujuan e-budgeting ini adalah untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja sekolah, menyusun usulan kebutuhan sekolah kepada dinas pendidikan kota surabaya, melakukan pelaporan elektronik atas pelaksanaan RKAS, melakukan pengendalian pelaksanaan RKAS dengan penanggungjawab Kepala Sekolah. Strateginya adalah dengan menyusun sistem sesuai dengan tekns perencanaan dan mengeluarkan anggaran sekolah yang telah berlaku sebelumnya. Sistem ini di sosialisasikan dan diwajibkan kepada seluruh sekolah yang ada di lingkungan kota Surabaya.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan;
- ❖ Adanya kebijakan yang mendukung

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ SDM yang mampu mengoperasikan sistem terbatas.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database SIPKS disesuaikan dengan alur kerja sistem pengendalian kegiatan;
- ❖ Membuat alur kerja pengelolaan keuangan beserta manajemen;
- ❖ Membangun sistem SIPKS (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja manajemen kinerja;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem SIPKS;
- ❖ Internalisasi SIPKS kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem SIPKS.

Manfaat :

- ❖ Sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
- ❖ Sebagai dasar penyusunan usulan kebutuhan sekolah;
- ❖ Sebagai wadah untuk melakukan pengendalian pelaksanaan RKAS.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja manual;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

TRY OUT UJIAN NASIONAL ONLINE DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem <i>try out</i> ujian nasional berbasis Online
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Kepala Dinas Pendidikan 2012
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Deskripsi :



Sistem *try out online* merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan Siswa SD se Surabaya yang berisi berbagai kumpulan soal soal yang dapat dikerjakan secara *online* maupun secara *offline*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi Ujian Nasional di semua jenjang dari SD hingga SMA/SMK, diperlukan banyak pengayaan soal dan latihan sesuai dengan model-model soal Ujian Nasional. Untuk itu, diperlukan banyak soal untuk siswa yang bisa diakses dengan mudah dan tanpa beban biaya apapun. Sehingga mereka

bisa melaksanakan latihan soal-soal ujian untuk mendapatkan hasil ujian yang maksimal. Hal ini diwujudkan melalui *tryout online*. Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menyelenggarakan *Try Out Online* yang bisa di akses di sekolah maupun di rumah asalkan memiliki jaringan komputer yang terhubung dengan *Internet* dan dengan menyusun berbagai paket soal pada setiap tingkat jenjang pendidikan. Untuk bisa masuk ke situs *try out online* anda bisa membuka situs <http://tryoutonline.dispendidik.surabaya.go.id>. Dalam *try out online* ini terdapat bank soal yang menyimpan beragam paket soal. Ada 62 paket soal untuk jenjang SD dan 52 paket soal buat SMP/SMA.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan;
- ❖ Adanya kebijakan yang mendukung;
- ❖ Keinginan memberikan kemudahan kepada siswa untuk berlatih menyelesaikan soal-soal UAN;
- ❖ Keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan Siswa sekota Surabaya.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Perlu waktu untuk mengubah mindset siswa untuk berlatih penyelesaian latihan soal-soal UAN secara online;
- ❖ Perlunya updating bank soal secara berkelanjutan;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ Tidak semua siswa bisa mengakses try out online karena tidak mempunyai fasilitas pendukung;
- ❖ Adanya keterbatasan SDM untuk mengoperasikan aplikasi untuk menambah bank soal.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database tryout ujian nasional online disesuaikan dengan alur kerja sistem pengendalian kegiatan;
- ❖ Membuat alur kerja pengelolaan tryout ujian nasional beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem tryout ujian nasional online (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja manajemen kinerja;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Mengisi bank soal ujian beserta jawabannya oleh tim pengelola
- ❖ Ujicoba sistem tryout ujian nasional online;
- ❖ Internalisasi tryout ujian nasional online kepada seluruh SKPD dan stakeholders (sekolah, orangtua, siswa);
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem tryout ujian nasional online.

Manfaat :

- ❖ Membantu pelajar agar dapat mengikuti tryout dengan tidak membutuhkan biaya;
- ❖ Meningkatkan jumlah kelulusan siswa di kota Surabaya;
- ❖ Memperkaya siswa untuk mendalami dengan contoh soal UAN terbaru.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, guru, siswa dan wali murid;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem try out online;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem try out online dan penyimpanan bank data soal;
- ❖ Membangun sistem try out sesuai dengan alur proses ujian yang sebenarnya (SOP);
- ❖ Menyusun SOP penambahan bank data soal dan prosedur try out berbasis online;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

JURNAL PENDIDIKAN ONLINE KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Jurnal Pendidikan Kota Surabaya Online
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Unit Pelaksana	: Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Dinas Pendidikan Kota Surabaya , http://202.154.63.139/sb/index.php/jurnal

Deskripsi :



Jurnal Pendidikan *online* merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk mengakomodasi para pendidik dalam menerbitkan karya tulis ilmiah untuk kepentingan pendidikan. Kenaikan pangkat seorang guru sangat ditentukan dengan jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan dalam jumlah tertentu. Guna menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surabaya meluncurkan sebuah inovasi, yaitu jurnal online. Tujuan dibangunnya sistem ini adalah sebagai sarana bagi guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mengumpulkan angka kredit, yaitu dengan membuat artikel atau tulisan tentang suatu hal dan dimuat dalam jurnal *online* ini. Strateginya adalah dengan memprioritaskan para guru untuk dapat menyusun sebuah tulisan yang mendidik baik berupa jurnal ilmiah maupun non-ilmiah.

Sarana ini disediakan sebagai wadah bagi pengelola, penulis dan pembaca karya-karya ilmiah. Jurnal online dinas pendidikan kota surabaya merupakan jurnal yang berisi tentang kumpulan karya tulis ilmiah dari guru-guru kota surabaya yang dipersembahkan untuk memperkaya khazanah pendidikan di Indonesia. Jurnal tersebut akan dijadikan percontohan bagi Dinas Pendidikan seluruh Jawa Timur.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan;
- ❖ Adanya tuntutan mengumpulkan angka kredit bagi kenaikan pangkat.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Membutuhkan koneksi internet. Hal ini menjadi hambatan tersendiri, karena tidak semua orang yang dapat mengakses internet dan koneksi internet juga tidak semuanya yang berjalan dengancepat;
- ❖ SDM guru yang paham IT masih rendah;
- ❖ Tidak semua SDM guru yang ada dapat menulis sebuah karya tulis karena budaya menulis yang rendah.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membentuk kepengurusan jurnal pendidikan kota Surabaya;
- ❖ Mempersiapkan anggaran untuk penerbitan jurnal;
- ❖ Membuat sistem untuk pengiriman dan penerbitan jurnal pendidikan online;
- ❖ Mendaftarkan ISSN ke LIPI pada tanggal 28 Desember 2012, dengan nomor ISSN 2337-3253, dan ISSN Online 9772337 325002;
- ❖ Sosialisasi sistem penerbitan jurnal pendidikan online;
- ❖ Melatih para guru untuk dapat menulis kedalam jurnal online.

Manfaat :

- ❖ Memfasilitas guru-guru dilingkungan dinas pendidikan kota surabaya untuk mendapatkan persyaratan kenaikan jenjang pangkat (angka kredit);
- ❖ Guru dapat memperoleh angka kredit yang akan digunakan oleh guru-guru di lingkungan dinas pendidikan kota Surabaya;
- ❖ Merangsang kreativitas dan inovasi para guru;
- ❖ Menunjang atau memfasilitasi pengembangan SDM.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Inisiasi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ Tersedianya anggaran untuk pengembangan sistem dan kepengurusan penerbitan jurnal;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem online;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja manual;
- ❖ Mendaftarkan jurnal ke LIPI untuk memperoleh ISSN;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi	: Observasi
Sumber	: Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

SISTEM PENGENDALIAN KEGIATAN SECARA ELEKTRONIK (E-CONTROLLING) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Pengendalian Kegiatan Berbasis Web
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Bambang DH (Walikota)
Unit Pelaksana	: Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Kepala Bagian Bina Program Pemkot Surabaya.

Deskripsi :



E-Controlling merupakan sistem pengendalian kegiatan yang didalamnya termasuk program computer berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya. Sistem ini menjembatani antara perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang ada di e-Project Planning dengan hasil pekerjaan yang diinputkan melalui sistem e-Delivery. Setelah dilakukan pembuatan kontrak kerja berbasis web, maka selanjutnya dilakukan pengendalian kegiatan melalui sistem e-controlling dengan lebih mengoptimalkan pengumpulan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- ❖ Seringnya terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan dan proyek;
- ❖ Perlunya dilakukan monitoring secara real time terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- ❖ Mengurangi penggunaan kertas;

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Adanya penolakan terhadap sistem kontrol pekerjaan dengan menggunakan pendekatan berbasis web;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet dalam pembangunan sistem kontrol pekerjaan;
- ❖ Keterbatasan SDM yang mampu mengoperasikan sistem aplikasi e-controlling;
- ❖ Adanya keengganan untuk maintenance sistem secara berkelanjutan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Mengubah mindset para pelaku birokrat untuk dapat bekerja menggunakan aplikasi berbasis web;
- ❖ Membuat mapping sistem dan database e-controlling disesuaikan dengan alur kerja sistem pengendalian kegiatan;
- ❖ Membuat alur kerja e-controlling beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem e-controlling (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja manajemen kinerja;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem e-controlling;
- ❖ Internalisasi e-controlling kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem e-controlling.

Manfaat :

- ❖ Dapat diketahui secara cepat penyebab lambatnya pembangunan proyek ;
- ❖ Dapat diketahui secara cepat tingkat serapan anggaran di masing-masing SKPD;
- ❖ Dapat melakukan evaluasi secara cepat terhadap perkembangan hasil kegiatan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan sistem e-controlling;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk sistem e-controlling;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja (SOP);
- ❖ Menyusun SOP mekanisme penggunaan e-controlling;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi	: Observasi
Sumber	: Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

E-DELIVERY (ELEKTRONIK DUKUNGAN ADMINISTRASI KEGIATAN) KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Sistem Pendukung Adminstrasi Kegiatan Berbasis Web
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Bambang DH (Walikota)
Unit Pelaksana	: Bagian Bina Program Sekretariat Daerah
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Sekretariat Manajemen Proyek Bagian Bina Program

Deskripsi :



E-Delivery merupakan sistem pendukung administrasi kegiatan yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan pencairan keuangan.

Pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan pencairan keuangan secara manual belum terstandar dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, e-delivery memberikan kemudahan yang signifikan dalam penyusunan kontrak/SPK, mengingat “bentuk kontrak/SPK dan/atau KPBJ di lingkungan pemerintah Kota Surabaya terstandar dan dibuat dalam hitungan menit setelah penentuan pemenang lelang/pengadaan. Implementasi e-delivery menjadi kewajiban yang harus segera dilalui setelah penentuan pemenang lelang/pengadaan

dalam rangka menjamin transparansi.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan pelayanan dalam kaitannya dengan pembuatan kontrak kerja;
- ❖ Seringnya terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan kontrak kerja;
- ❖ Perlunya kecepatan dan keakuratan dalam pembuatan/penyusunan kontrak kerja;
- ❖ Mengurangi penggunaan kertas;

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Adanya penolakan pada saat pengenalan sistem;
- ❖ Ketergantungan terhadap jaringan internet;
- ❖ SDM yang mampu mengoperasikan sistem terbatas;

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Membuat mapping sistem dan database e-delivery yang disesuaikan dengan alur kerja pembuatan kontrak pekerjaan;
- ❖ Membuat alur kerja e-delivery beserta manajemennya;
- ❖ Membangun sistem e-delivery (software dan hardware) sesuai dengan alur kerja manajemen kinerja;
- ❖ Melakukan pelatihan bagi SDM pengelola sistem;
- ❖ Ujicoba sistem e-delivery;
- ❖ Internalisasi e-delivery kepada seluruh SKPD dan stakeholders;
- ❖ Menerapkan dan memelihara sistem e-delivery.

Manfaat :

- ❖ Kemudahan yang signifikan dalam penyusunan kontrak/SPK;
- ❖ Membuat kontrak lebih akurat;
- ❖ Memangkas rantai birokrasi;
- ❖ Memperoleh data anggaran real time.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah;
- ❖ MoU dengan stakeholders pengembangan kontrak kerja berbasis web;
- ❖ Memiliki hardware (server) dan jaringan yang memadai untuk pengembangan kontrak kerja berbasis web;
- ❖ Membangun sistem sesuai dengan alur kerja (SOP);
- ❖ Menyusun SOP mekanisme penggunaan e-delivery;
- ❖ Mempersiapkan SDM pengelola sistem (pelatihan).

Teknik Validasi	: Observasi
Sumber	: Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

DIGITAL ARSIP KEPENDUDUKAN KOTA SURAKARTA

Produk inovasi	: Sistem Arsip kependudukan berbasis elektronik
Jenis Inovasi	: Teknologi
Penggagas	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Pelaksana	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun inisiasi	: 2007
Tahun implementasi	: 2008
Kontak Person	: Bidang dokumentasi dan Bidang data statistik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Deskripsi :



Digital Arsip Kependudukan merupakan salah satu inisiasi Disdukcapil untuk mengarsipkan dokumen kependudukan warga Surakarta dalam bentuk softcopy (berkas digital). Data kependudukan di kota Surakarta masih dikelola secara manual sehingga arsip yang ditangani terkait register kelahiran, kematian dan berkas yang lain semakin menumpuk. Hal itu dikarenakan selama ini proses pengarsipan dan pencarian data melalui sistem yang ada terlalu lama dan kurang praktis, sehingga dibutuhkan pembaharuan. Kemudian muncul gagasan bagaimana agar menemukan suatu cara agar mudah untuk mencari dokumen yang diperlukan. Tujuan dimulainya program ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat pencarian data kependudukan serta menjadi dokumen cadangan jika sewaktu waktu dokumen cetak yang disimpan rusak atau hilang. Untuk menjamin

keberhasilan program ini, Dinas Kependudukan Kota Surakarta melakukan kemitraan dengan Kementerian dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan lembaga donor. Mekanisme penggunaan aplikasi digital arsip cukup mudah, yaitu dengan memasukkan data kependudukan kedalam sebuah bank data, kemudian melakukan scanning terhadap dokumen cetak.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya bantuan awal dari lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan digital arsip;
- ❖ Dukungan dari pimpinan daerah dengan dimasukkannya digital arsip dalam program perencanaan pembangunan daerah;
- ❖ Komitmen petugas untuk mendigitalisasi dokumen yang ada;
- ❖ Keinginan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Sistem aplikasinya cukup rumit sehingga jika terjadi masalah (error) akan sulit mengetahui penyebabnya;
- ❖ Maintenance IT berasal dari Jakarta, sehingga ada kendala dalam pemeliharaan karena jarak jauh;
- ❖ Personel masih cukup kurang untuk melakukan digitalisasi secara cepat;
- ❖ Sarana dan prasarana penunjang sistem digital arsip (sistem aplikasi dan 5 unit PC) yang cukup usang, sehingga perlu diservice terlebih dahulu;
- ❖ Dokumen asli/ Hardcopy dokumen dan berkas yang akan diarsipkan membutuhkan perawatan dengan hati-hati karena ketika akan dilakukan scanning ada resiko kerusakan (sobek).

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Keinginan untuk memperbaiki sistem pengarsipan dokumen;
- ❖ Memasukkan program/ kegiatan kedalam perencanaan pembangunan daerah;
- ❖ Mempersiapkan anggaran khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana serta sistem aplikasinya;
- ❖ Pada tahun 2007 dilakukan assesment terhadap sarana dan prasarana yang telah dimiliki serta melakukan ujicoba terhadap sistem;
- ❖ Pada tahun 2008 dilakukan pelatihan kepada petugas digital arsip untuk menjalankan prosedur yang telah ditentukan;
- ❖ Digital arsip dimulai dengan memasukkan data sesuai registry yang ada dan menscaning dokumen pendukung;
- ❖ Melakukan konversi data dari sistem lama ke sistem baru;
- ❖ Ujicoba digital arsip secara trial by doing untuk menemukan kendala dalam operasionalisasi;
- ❖ Implementasi.

Manfaat :

- ❖ Register berkas jauh lebih rapi dan teratur;
- ❖ Adanya kemudahan dalam mendokumentasikan data kependudukan dan catatan sipil;
- ❖ Terciptanya keamanan data agar tidak hilang dan cepat rusak;

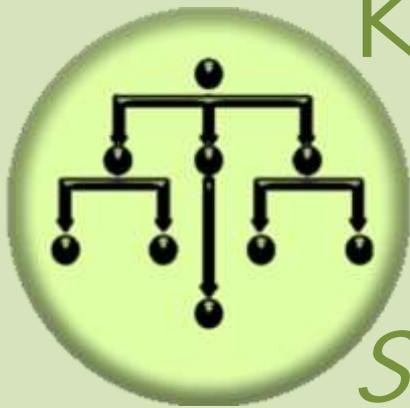
- ❖ Kemudahan dalam menemukan data kependudukan dan catatan sipil.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dan dukungan dari instansi pemerintah daerah;
- ❖ Memasukkan program/ kegiatan pengadaan digital arsip dalam perencanaan pembangunan daerah;
- ❖ Mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan;
- ❖ Mempersiapkan sarana dan prasarana secara baik (sistem aplikasi, perangkat komputer dan sistem jaringan);
- ❖ Membuat dan memasang sistem digital arsip;
- ❖ Mempersiapkan petugas yang dapat mengoperasikan sistem digital arsip;
- ❖ Melakukan perawatan sistem arsip digital secara berkelanjutan.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta



KELOMPOK INOVASI *STRUKTUR* ORGANISASI

Inovasi yang ditujukan untuk pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi. Ruang lingkup dari inovasi struktur organisasi adalah pembaruan struktur yang dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan, penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur.

**PEMBENTUKKAN "UNIT LAYANAN PASPOR " UNTUK MEMPERCEPAT PROSEDUR PELAYANAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA**

Produk inovasi	: Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
Jenis Inovasi	: Struktur Organisasi
Unit Pelaksana	: Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
Penggagas	: Direktorat Jendral Imigrasi
Tahun inisiasi	: 2013
Tahun implementasi	: 2013
Kontak Person	: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, ULP wilayah I Pondok Pinang dan ULP wilayah II Karang Tengah

Deskripsi :



Unit Layanan Paspor merupakan unit yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan yang diterbitkan tanggal 6 Mei 2013. Unit ini dibentuk sebagai respon dari banyaknya keluhan masyarakat terkait lamanya proses penerbitan paspor di tiap kantor imigrasi, terutama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Hal yang menjadi pertimbangannya adalah jumlah permohonan perhari di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan yang rata-rata sebanyak 500/hari. Pemohon yang berasal dari kelas menengah keatas dinilai peka terhadap perlakuan pelayanan dari petugas dan infrastruktur pelayanan dan paham terhadap persyaratan pembuatan paspor sehingga mereka

membutuhkan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit belit.

Tujuan didirikannya Unit Layanan Paspor ini adalah untuk memecah konsentrasi pelayanan di kantor imigrasi kelas I khusus jakarta selatan utama (warung buncit). Selain itu diharapkan dapat menjangkau lebih dekat masyarakat pemohon paspor di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I khusus jakarta selatan (outreaching) sehingga nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik kepada masyarakat (public service accountability). Dalam mencapai tujuan tadi maka dilakukanlah strategi seperti penyusunan peraturan yang dapat memperkuat keberadaan unit tersebut. Selain itu dikembangkan pula standar operasional prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan perubahan bisnis proses yang sebelumnya telah dirancang. Fasilitas berupa sarana prasarana untuk tempat kerja petugas serta kenyamanan pemohon dipersiapkan. Dan sampai saat ini telah dilakukan softlaunching pengoperasian ULP wilayah I pondok pinang pada tanggal 18 des 2013 dan ULP wilayah II karang tengah pada tanggal 23 des 2013. Untuk kantor ULP wilayah I berlokasi di Jl. Ciputat Raya No.27 Rt 005 Rw 006 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan sedangkan ULP wilayah II berlokasi di Jl. Karang Tengah Blok B/I No. 8H Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya dukungan peraturan pendirian Unit Layanan Paspor yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2013 ;
- ❖ Adanya dukungan anggaran dan sarana prasarana kelengkapan kantor untuk pendirian Unit Layanan Paspor termasuk tanah dan bangunan;
- ❖ Adanya Proses Bisnis, SOP dan Standar Pelayanan yang jelas dalam melayani masyarakat;
- ❖ Sambutan hangat dari masyarakat pengguna jasa layanan penerbitan paspor.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Jumlah petugas yang dinilai masih kurang dalam segi jumlah;
- ❖ Masih terbatasnya kuota harian masyarakat yang dilayani (ULP wilayah I sebanyak 120 kuota, ULP wilayah II sebanyak 70 kuota).

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Komitmen untuk menjalankan perubahan paradigma pelayanan paspor (Cepat & Terukur, Bersih & Transparan, Mudah, Aman, serta Nyaman);
- ❖ Melakukan perubahan proses bisnis dalam pelayanan paspor;
- ❖ Menyusun dan menerbitkan peraturan pendukung tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;
- ❖ Merencanakan dan menyediakan anggaran dan lokasi untuk kantor Unit Layanan Paspor;
- ❖ Mendirikan dan mendisain tata ruang sesuai dengan proses bisnis pelayanan paspor (termasuk sistem antrian seperti perbankan)
- ❖ Mempersiapkan SDM (pegawai layanan) sesuai dengan tugasnya seperti petugas loket penerimaan berkas permohonan, verifikasi dan scan dokumen persyaratan , verifikasi dan acc
- ❖ pembayaran, pengeluaran blanko paspor, foto dan wawancara, adjudikator, pencetakan paspor, laminasi, customer service, penyerahan paspor jadi, kepala unit layanan paspor;
- ❖ Bekerja sama dengan pihak perbankan untuk sistem pembayaran administrasi penerbitan paspor;
- ❖ Melakukan pengembangan sistem layanan berbasis elektronik dengan bekerjasama dengan pengembang

sistem;

- ❖ Soft launching pembukaan kantor Unit Layanan Paspor.

Manfaat :

- ❖ Terpecahnya pemohon penerbitan paspor ke beberapa tempat sehingga dapat mewujudkan komitmen yang dibuat;
- ❖ Terealisasinya proses bisnis yang telah di desain untuk mempercepat waktu pelayanan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan pelayanan yang Cepat & Terukur, Bersih & Transparan, Mudah, Aman, serta Nyaman;
- ❖ Melakukan perubahan proses bisnis, standar pelayanan dan SOP;
- ❖ Melakukan penyusunan dan penerbitan peraturan terkait pendirian suatu unit baru;
- ❖ Menyediakan anggaran untuk sarana prasarana kelengkapan unit baru serta lokasi yang strategis;
- ❖ melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti perbankan terkait sistem pembayaran;
- ❖ Melakukan pengembangan sistem layanan berbasis elektronik dengan bekerjasama dengan pengembang sistem/ memodifikasi yang sistem elektronik yang sudah ada;
- ❖ Menyiapkan SDM (Pegawai) yang cukup dengan kompetensi yang sesuai dengan tugasnya.

Teknik Validasi : Publikasi/Presentasi

Sumber : Bahan Presentasi Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan pencarian internet

PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SRAGEN

Produk inovasi	: Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
Jenis Inovasi	: Struktur Organisasi
Penggagas	: Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, SH, MH
Unit Pelaksana	: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan – Kabupaten Sragen
Tahun inisiasi	: 2012
Kontak Person	: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan – Kabupaten Sragen
	Tahun implementasi : 2012

Deskripsi :



Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (UPTPK) merupakan unit pelayanan yang menyatukan layanan kemiskinan secara terintegrasi di satu tempat yang selama ini dilayani secara terpisah diberbagai SKPD. UPTPK adalah sebuah unit kerja dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin dengan pola satu pintu (one STOP service). UPTPK dipimpin oleh seorang Kepala Unit dengan tugas mengendalikan setiap kinerja UPTPK dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda. Kewenangan UPTPK adalah memverifikasi dan merekomendasi warga miskin penerima layanan/bantuan serta mengkoordinasikan SKPD terkait dalam pemberian layanan terhadap warga miskin. UPTPK melayani 3 kebutuhan dasar yaitu pendidikan

(beasiswa pendidikan), kesehatan (jamkesda) dan sosial ekonomi (rumah tidak layak huni atau dana santunan kematian). UPTPK didirikan karena 40% penduduk Sragen adalah warga miskin. Disamping itu pelayanan terhadap warga miskin dilakukan masing masing SKPD secara parsial/tidak terintegrasi.

Tujuan pembentukan unit ini adalah untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat miskin yang membutuhkan, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan harapan. Dalam implementasi program dan pertanggungjawaban keuangan dari kegiatan pelayanan warga miskin ini ditangani oleh SKPD teknis. Pada tahap operasional, UPTPK melibatkan beberapa instansi terkait seperti BPS yang menyediakan database kemiskinan, serta dinas lainnya.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang peraturan penanggulangan kemiskinan;
- ❖ Adanya peraturan bupati (perbup) nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan UPTPK dan Perbup nomor 24 tahun 2012 tentang jaminan kesehatan daerah kabupaten sragen, Perbup nomor 46 tahun 2012 tentang pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi dari keluarga miskin;
- ❖ Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada warga miskin;
- ❖ Adanya keinginan koordinasi dan harmoni antar stakeholder penanggulangan kemiskinan;
- ❖ Adanya dukungan dari dinas teknis dalam implementasi program dan pertanggungjawaban anggaran;
- ❖ Adanya dukungan masyarakat penerima layanan.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ UPTPK masih menginduk pada bagian kesejahteraan rakyat sehingga akan mempengaruhi langkah koordinasi dengan SKPD terkait;
- ❖ Kultur masyarakat yang tidak malu berpura-pura miskin hanya untuk mendapatkan pelayanan gratis;
- ❖ Permasalahan kemiskinan yang semakin kompleks dan urgent, perlu solusi yang cepat pula, baik dari segi teknis maupun pendanaan.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pembentukan unit berdasarkan Peraturan Bupati No.2/2012 tanggal 2 Januari 2012;
- ❖ Pembentukan tim serta perumusan SOTK kelembagaan UPTPK Kab. Sragen;
- ❖ Persiapan sarana (fisik bangunan, tata letak kantor), prasarana, rekrutmen SDM dan penyusunan SOP.

Manfaat :

- ❖ Meningkatnya koordinasi integrasi program kemiskinan diantara SKPD terkait karena basis data yang dipergunakan sama;
- ❖ Pelayanan menjadi efektif dan efisien, dengan waktu pelayanan maksimal 3 hari;
- ❖ Tidak dipungut biaya;
- ❖ Perubahan pola pikir dan budaya kerja staff UPTPK;
- ❖ Meningkatnya kualitas data warga miskin;
- ❖ Berkurangnya angka kemiskinan warga Sragen.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen Kepala Daerah (jajaran eksekutif) dan dukungan legislatif;
- ❖ Adanya dukungan keijakan kepala daerah dalam pembentukan SOTK sesuai dengan kewenangan;
- ❖ Penyediaan sarana dan prasarana (SOP dan perangkat lunak untuk mendukung database);
- ❖ Penyediaan sumberdaya aparatur dengan *mind set* pelayanan publik.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah, KemenPAN-RB, 2013

PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KREDIT MIKRO KOTA KENDARI

Produk inovasi	: Badan Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat
Jenis Inovasi	: Struktur Organisasi
Penggagas	: Dr. H. Asrun, M.Eng, Sc (Walikota Kendari)
Unit Pelaksana	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari
Tahun inisiasi	: 2008 Tahun implementasi : 2008
Kontak Person	: Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari – (0401) 3193995, Pimpinan BLUD Harum Kendari

Deskripsi :



BLUD kredit mikro Kota Kendari merupakan unit kerja dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kendari yang mengelola program bantuan kredit mikro bagi masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh dana bagi penguatan modal usahanya. Pada periode tahun 2007 sampai 2012 diindikasikan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah mendesak untuk ditangani. Salah satu penyumbang angka kemiskinan terbesar adalah keadaan pedagang informal di Kendari yang sangat menyedihkan. Melihat kondisi tersebut, Walikota Kendari meluncurkan bantuan permodalan dalam bentuk kredit mikro kepada para pedagang keliling dan usaha kecil. Pemerintah Kota Kendari melihat perlunya upaya strategis melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya memiliki usaha

jualan, diantaranya melalui Program Bantuan Kredit Mikro yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD Mikro Kota Kendari bertujuan untuk memberikan layanan peminjaman modal usaha. BLUD diarahkan untuk mengatasi kemiskinan struktural dengan memotong mata rantai rentenir serta menyediakan modal usaha sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi masyarakat. Secara makro konsep BLUD mengadopsi Grameen Bank yang dikembangkan Muhammad Yunus. Teknis Pengelolaan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan tersebut, BLUD diberikan keleluasaan untuk mengelola seluruh pendapatannya pada pasal 62 dan dibuatkan rekening khusus. BLUD Harum Kendari sendiri dalam pengelolaan keuangan, termasuk bagi hasil dan pendapatan lainnya memiliki rekening di Bank Pembangunan Daerah Kota Kendari atas nama Kantor Badan Layanan Umum Daerah.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Komitmen yang kuat dari Walikota memperkuat potensi ekonomi;
- ❖ Adanya keinginan dari masyarakat yang tinggi untuk memperoleh peminjaman modal usaha.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Pengetahuan dan kemampuan sebagian pengelola BLUD masih minim;
- ❖ Belum ada data terintegrasi yang dapat menggambarkan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan taraf hidup para kreditor;
- ❖ Terbatasnya jumlah personil BLUD, yang hingga saat ini hanya berjumlah 25 orang untuk mengerjakan data terkait peningkatan dan hasil yang dicapai oleh BLUD;
- ❖ Masih ada beberapa kreditor yang tidak tertib melakukan pelunasan, meskipun jumlahnya seringkali hanya di bawah 10 persen.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pemerintah Kota Kendari meluncurkan bantuan permodalan dalam bentuk kredit mikro kepada para pedagang keliling dan usaha kecil untuk mengatasi kemiskinan;
- ❖ Kerjasama dengan Institute for Social Empowerment and Democracy dan Universitas Haluoleo dengan melakukan penelitian tentang Kajian Mencari Akar Permasalahan Kemiskinan di Kota Kendari dan pemberdayaan masyarakat;
- ❖ Pengadaan program-program pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya memiliki usaha jualan, diantaranya melalui Program Bantuan Kredit Mikro yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- ❖ Penerapan konsep Grameen Bank dengan PP No.58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007 dan Pengkonsepkan BLUD;
- ❖ Penerapan strategi dari dua sisi yaitu dari sisi pemerintah dan masyarakat.

Manfaat :

- ❖ Adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk;
- ❖ Indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Kendari yang tidak mengalami penurunan secara signifikan sejak tahun 2008;
- ❖ Meningkatnya jumlah nasabah terlayani serta dana yang tersalurkan kepada nasabah
- ❖ Adanya peningkatan pemasukan ke kas BLUD;
- ❖ Layanan BLUD merangkul nasabah perempuan jauh lebih banyak dibanding laki-laki;
- ❖ Peningkatan omzet penerima bantuan yang rata-rata bermata pencaharian pedagang skala kecil dan dari

kelompok warga miskin serta hampir miskin sebagai target dari program BLUD itu sendiri;

- ❖ Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran biaya untuk pengentasan kemiskinan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen serius pemerintah daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan, komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk program serta dukungan anggaran yang jumlahnya tidak harus besar;
- ❖ Perlunya data kemiskinan yang terpilah, sehingga akan jelas sasaran dari dana bergulir tersebut.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku APEKSI Jilid 8

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG

Produk inovasi	: Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) kota semarang
Jenis Inovasi	: Struktur Organisasi
Penggagas	: Walikota Semarang
Unit Pelaksana	: Pemerintah Kota Semarang
Tahun inisiasi	: 2005
Tahun implementasi	: 2005
Kontak Person	: Kasubid Pengembangan Sistem Perencanaan Bappeda Kota Semarang Telp. (024) 354 1095, (024) 707 88707 Faximili. (024) 8502 853

Deskripsi :



<http://ylki.or.id>

Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) kota Semarang merupakan unit organisasi yang bertugas untuk menerima dan melanjutkan pengaduan masyarakat kepada Dinas-dinas terkait dalam lingkungan Pemkot setelah pengaduan di tindaklanjuti P5 kembali menginformasikan kepada anggota masyarakat tersebut. Pembentukan P5 didasari adanya sorotan kinerja pelayanan publik yang belum memuaskan dan memenuhi harapan masyarakat, mengingat masih banyaknya pengaduan yang tidak di tindaklanjuti oleh unit satuan kerja pemerintah kota Semarang. Kondisi tersebut mengakibatkan kurangnya respon masyarakat untuk mengadukan permasalahan pelayanan publik dan cenderung lebih senang melakukan pengaduan melalui surat pembaca di surat kabar lokal.

Pembentukan pusat penanganan pengaduan pelayanan publik (P5) Kota Semarang adalah untuk menciptakan optimalisasi pelayanan publik melalui mekanisme kontrol

dan pengawasan yang baik. (P5) berfungsi sebagai mediator (penghubung) antara masyarakat dengan pemerintah kota / satuan kerja pelayanan publik.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pimpinan daerah;
- ❖ Adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis pengaduan masyarakat;
- ❖ Perlunya check and balance penyelenggaraan pelayanan;
- ❖ Pentingnya kolaborasi dan koordinasi dalam penanganan pengaduan.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ P5 kesulitan menjawab pengaduan yang diluar kewenangan Pemkot;
- ❖ Kurangnya SDM pengelola pengaduan;
- ❖ Kurangnya sarana dan prasaranan;
- ❖ Belum maksimalnya distribusi pengaduan kepada pelapor/pengadu;
- ❖ Belum adanya koordinasi dengan instansi vertikal provinsi dan pemerintah pusat mengakibatkan kesulitan dalam menjawab pengaduan dari produk layanan mereka;
- ❖ Lemahnya koordinasi dari beberapa dinas mengakibatkan tindak lanjut pengaduan menjadi panjang;
- ❖ Pengaduan melalui SMS masih menimbulkan kesulitan bagi P5 dalam menelusuri dan menindaklanjuti aduan;
- ❖ Masyarakat/pengadu masih merasa takut apabila identitasnya diketahui sebagai pelapor.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiatif dari pimpinan daerah;
- ❖ Membuat Peraturan berupa, Peraturan Walikota Semarang Nomor : 11 Tahun 2005 tentang pembentukan pusat penanganan pengaduan pelayanan publik (P5), surat keputusan Walikota Semarang Nomor 065/192 tahun 2005 tentang tatalaksana pusat penanganan pengaduan pelayanan publik (P5);
- ❖ Pembuatan unit kerja;
- ❖ Merevisi SPM yang ada bersama pemangku kepentingan pembangunan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha);
- ❖ Menyediakan kantor (P5) pada Gedung Balaikota Lantai 1 Semarang ;
- ❖ Meletakkan kantor P5 berdampingan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Semarang untuk memudahkan masyarakat melakukan pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- ❖ Menyusun struktur organisasi P5 yaitu, Sekda sebagai Penanggung Jawab Pelayanan Publik, Asisten Administrasi sebagai Penanggung Jawab P5, kabag Organisasi sebagai koordinator P5, Kasubag pada organisasi sebagai sekretaris P5, kelompok kerja dibagi dalam 5 POKJA yang masing-masing menandai 8/9 satuan kerja;
- ❖ Menyediakan bahan pendukung seperti; standard pelayanan minimum seluruh unit kerja, kode satuan kerja, buku agenda pengaduan, form pengaduan dan jawaban, brosur/leaflet perijinan tiap unit kerja, saluran internet, hand phone (SMS), buku telepon seluruh unit kerja, nomor telepon pengaduan unit kerja terkait, nomor telepon penting di Semarang;
- ❖ Menyusun prosedur tetap (protap)/tatalaksana operasionalisasi P5;
- ❖ Merekrut pegawai di lingkungan Pemkot untuk operasionalisasi P5;
- ❖ Menyelenggarakan bimbingan teknis customer sevice dan penanganan pengaduan;

- ❖ Mensosialisasikan P5 ke lingkungan internal Pemkot dan masyarakat, antara lain dengan membuka stand di Lawang Sewu Expo;
- ❖ Menyusun pola kerja P5 dalam menangani pengaduan;

Manfaat :

- ❖ Memberikan kemudahan penyampaian keluhan terkait dengan masalah pelayanan publik;
- ❖ Meningkatnya kinerja pelayanan public dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- ❖ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme kontrol dan pengawasan;
- ❖ Tersalurkannya permasalahan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik;
- ❖ Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk berkinerja dengan lebih baik.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen pimpinan daerah beserta jajarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- ❖ Koordinasi yang baik antar instansi di Kota Semarang dan Instansi-instansi di luar Pemkot Semarang;
- ❖ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas;
- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana;
- ❖ Tersedianya SDM yang memadai.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi dan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) kota Surabaya
Jenis Inovasi	: Struktur Organisasi
Penggagas	: Bambang DH (Walikota)
Unit Pelaksana	: Unit Layanan Pengadaan
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Unit Layanan Pengadaan Kota Surabaya

Deskripsi :



Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ ULP (Unit Layanan Pengadaan) kota Surabaya merupakan sebuah unit khusus yang dibangun untuk melakukan pengelolaan barang dan jasa di kota Surabaya. Unit ini didirikan sebagai bagian dari implementasi e-procurement (LPSE) yang disusun oleh pemerintah pusat. E-Procurement merupakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses pelelangan. Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres 80 tahun 2003, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan korupsi di setiap tahapannya. Kelemahan tersebut terbukti dengan begitu besarnya kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditangani oleh KPK.

Pelaksanaan e-Procurement melalui Unit layanan Pengadaan ini dinilai mempunyai dampak makro yang antara lain:

- ❖ Terjadinya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - ❖ Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan cara e-Procurement dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding dengan cara yang dilakukan dengan cara konvensional;
 - ❖ Persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional.
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, fair dan partisipatif mendukung persaingan usaha yang semakin sehat di setiap wilayah dimana pengadaan barang dan jasa dilakukan. Tidak ada pengaturan pemenang lelang serta menghilangkan sistem arisan antara pelaku usaha, pelaku usaha yang besar tidak dapat menekan pelaku usaha kecil untuk tidak berpartisipasi dalam tender, serta pelaku usaha di semua tingkatan tidak dapat menekan lembaga pemerintah untuk memenangkannya dalam tender. Pelaksanaan lelang diatur dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan meniadakan kontak langsung antara panitia dengan penyedia barang dan jasa. Pelaku usaha yang unggul dalam melakukan efisiensi terhadap seluruh aktifitas operasional usahanya akan mendapatkan keunggulan kompetitif.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi;
- ❖ Komitmen pimpinan daerah untuk membenahi proses pengadaan barang jasa yang lebih baik;
- ❖ Komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif;
- ❖ Dukungan Sumberdaya Manusia yang berkualitas;
- ❖ Dasar hukum yang kuat;
- ❖ Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami aplikasi e-Procurement;
- ❖ Panitia Pengadaan sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi e-Procurement;
- ❖ Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan password dan kunci kerahasiaan lainnya oleh user, baik Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pelaksanaan Kegiatan maupun Panitia Pengadaan;
- ❖ Range jadwal state lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh Panitia Pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan;
- ❖ Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti scanner, installer adobe, dll) masih sangat terbatas untuk Panitia Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- ❖ Terbatasnya bandwidth menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi e-Procurement;
- ❖ Kekhawatiran beberapa kalangan di internal Pemerintah Kota Surabaya bahwa penghasilan tambahan mereka saat menjalankan aktifitas pengelolaan pengadaan (mulai dari pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan) akan terpotong habis.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiatif dari Walikota Surabaya untuk mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- ❖ Melakukan telaah kelebihan dan kekurangan proses pengadaan barang/jasa secara konvensional dan

elektronik;

- ❖ Koordinasi dengan masing-masing SKPD;
- ❖ Pembentukan kebijakan tentang ULP yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2006, Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2007;
- ❖ Secara kelembagaan pembentukan ULP dan memasukkan ke dalam struktur organisasi pemda;
- ❖ Pembuatan SOP untuk Unit Layanan Pengadaan;
- ❖ Penerapan sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE);
- ❖ Pembentukan fasilitas seperti ruang administrasi, penyedia barang/jasa, fasilitas E-government;
- ❖ Mengadakan pelatihan bagi operator ULP dan peserta lelang pengadaan barang/jasa.

Manfaat :

- ❖ Meminimalisasi faktor kesalahpahaman yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa;
- ❖ Meminimalisasi kecurigaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa;
- ❖ Membantu proses pengendalian administrasi proyek terutama pada proses pengadaan barang/jasa;
- ❖ Memudahkan bagi peserta lelang untuk mengikuti semua tahapan lelang sesuai regulasi yang ada dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet);
- ❖ Memberi keadilan bagi seluruh peserta lelang baik dari penyedia barang/jasa dengan kualifikasi kecil atau non kecil.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk mengimplementasikan sistem LPSE;
- ❖ Pembuatan kebijakan untuk membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- ❖ Membangun komitmen seluruh SKPD untuk pembentukan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa satu pintu;
- ❖ Mempersiapkan fasilitas yang diperlukan untuk implementasi sistem LPSE;
- ❖ Membuat SOP pelayanan pengadaan barang/jasa satu pintu;
- ❖ Mempersiapkan SDM untuk mengoperasikan sistem LPSE dan menjadi trainer bagi peserta lelang;
- ❖ Mengimplementasi dan mengevaluasi sistem LPSE secara berkelanjutan.

Teknik Validasi : Observasi

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surabaya

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA YOGYAKARTA

Produk inovasi	: Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) kota Yogyakarta	
Jenis Inovasi	: Struktur Organisasi	
Penggagas	: Walikota Yogyakarta 2008	
Unit Pelaksana	: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	
Tahun inisiasi	: 2008	Tahun implementasi : 2009
Kontak Person	: Kabag Pengendalian Pembangunan Setda dan Kasubag Pengendalian Administrasi Setda (0274) 520332	

Deskripsi :



Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Yogyakarta merupakan sebuah unit khusus yang dibangun untuk melakukan pengelolaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta. Unit ini didirikan sebagai bagian dari implementasi e-procurement (LPSE). LPSE merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. LPSE dibentuk karena lemahnya kontrol yang dilakukan SKPD masing-masing dan sumber daya pada personel yang menangani proses pengadaan barang/jasa tidak bersertifikat. Tujuan dibentuknya LPSE adalah untuk meningkatkan efisiensi,

efektifitas, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Strategi penerapan untuk meningkatkan kemampuan pengguna fasilitas LPSE di kota Yogyakarta dengan mengadakan pelatihan selama 1 hari dengan jumlah peserta 16 orang untuk 1 angkatan pelatihan.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen dari Setda Kota Yogyakarta;
- ❖ Adanya keinginan untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa;
- ❖ Keinginan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat;
- ❖ Keinginan untuk mempermudah proses administrasi.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Kemampuan IT penyedia barang/jasa berbeda-beda, ada sebagian kurang paham sehingga dapat menghambat pengoperasian aplikasi e-procurement;
- ❖ Kompetensi personel penyedia barang/jasa dalam pemahaman IT serta kesiapan dalam penggunaan sistem LPSE masih kurang (perubahan paradigma dari sistem yang manual ke elektronik);
- ❖ Kurangnya kedisiplinan dari para pelaku e-procurement dalam pelaksanaannya;
- ❖ Banyak sanggahan yang langsung diutarakan kepada sekda atau walikota.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Adanya inisiatif dari Setda kota Yogyakarta untuk mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- ❖ Melakukan studi banding dan kajian ke kota Surabaya dan kota Sragen;
- ❖ Melakukan telaah kelebihan dan kekurangan kepada pimpinan daerah kota Yogyakarta;
- ❖ Koordinasi dengan masing-masing SKPD;
- ❖ Secara kelembagaan pembentukan ULP dan memasukkan ke dalam struktur organisasi pemda;
- ❖ Pembuatan SOP ULP berdasarkan Perwal Yogyakarta No.81 tahun 2009 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Walikota Yogyakarta No.82
- ❖ Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta;
- ❖ Penerapan sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE);
- ❖ Pembentukan fasilitas seperti ruang administrasi, penyedia barang/jasa, fasilitas E-government;
- ❖ Mengadakan pelatihan bagi operator ULP dan peserta lelang pengadaan barang/jasa.

Manfaat :

- ❖ Meminimalkan sanggahan/keberatan dari klien mengenai pengadaan barang/jasa;
- ❖ Adanya transparansi dan peningkatan efisiensi serta efektifitas pemda, biaya operasional yang digunakan berasal dari dana APBD dengan rincian Rp 300 juta untuk operasional ULP dalam hal ini mampu menghemat hingga 40% dari anggaran;
- ❖ Kemudahan kontrol karena dilakukan satu pintu;
- ❖ Pengawasan lebih baik karena adanya peran masyarakat;
- ❖ Menjamin kesempatan akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat;
- ❖ Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah karena dilakukan oleh aparatur yang profesional;

- ❖ Menciptakan suasana yang kondusif dan bebas praktik KKN dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;

- ❖ Meningkatkan kinerja SKPD dalam menjalankan tupoksi karena tidak ada lagi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungannya.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk mengimplementasikan sistem LPSE;
- ❖ Pembuatan kebijakan untuk membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- ❖ Membangun komitmen bersama seluruh SKPD untuk pembentukan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa satu pintu;
- ❖ Mempersiapkan fasilitas yang diperlukan untuk implementasi sistem LPSE;
- ❖ Membuat SOP pelayanan pengadaan barang/jasa satu pintu;
- ❖ Mempersiapkan SDM untuk mengoperasikan sistem LPSE dan menjadi trainer bagi peserta lelang;
- ❖ Mengimplementasi dan mengevaluasi sistem LPSE secara berkelanjutan.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi Jilid 6

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

Produk inovasi	: Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur
Jenis Inovasi	: Struktur Organisasi
Penggagas	: Dr. H. Soekarwo yang saat itu menjabat Sekda Provinsi Jawa Timur
Unit Pelaksana	: Sekretariat Provinsi Jawa Timur
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2010
Kontak Person	: Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, SMS : 081857333, Email: info@p2tjatimprov.go.id, Telp : (031)3577692, Faks : (031)3577693

Deskripsi :



Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. UPT didasarkan adanya 1) masalah pelayanan perizinan yang rumit, waktu yang lama, biaya tidak pasti, dan tidak transparan 2) Belum terbukanya akses informasi yang cepat dan akurat 3) belum adanya sarana dan prasarana 4) belum adanya dukungan regulasi 5) sumber daya manusia yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian dan tugas fungsi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembentukan pelayanan terpadu. Untuk itu Pemprov Jawa Timur menyelenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) – Pelayanan Perizinan

Terpadu (P2T). Unit ini menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan, mempercepat waktu pelayanan, mengurangi tahapan pelayanan yang kurang penting, mengurangi biaya dan prosedur yang transparan. Keberlangsungan UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat didukung oleh adanya pelimpahan wewenang dari pimpinan daerah dan kepala SKPD terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, mekanisme kerja UPT terstruktur, alur, waktu, biaya serta tahapan penyelesaian pelayanan jelas dan terintegrasi dalam satu tempat.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya Komitmen dan kebijakan kepala daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi;
- ❖ Terciptanya Koordinasi yang baik sehingga tercapainya sinergi antar SKPD dalam pelimpahan kewenangan perizinan;
- ❖ Tersedianya SDM yang memiliki integritas dan komitmen kuat dalam menjalankan prosedur pelayanan;
- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang operasional kegiatan seperti jaringan database, server, CCTV, website;
- ❖ Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan setian 3 bulan sekali;
- ❖ Adanya media pengaduan;
- ❖ Adanya kemudahan dalam pengawasan/monitor terhadap kondisi pelayanan dengan menggunakan teknologi.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Ketidakjelasan SKPD dan instansi menyerahkan kewenangannya pada saat pembentukan UPT-P2T;
- ❖ Kurangnya tenaga spesialis dengan keahlian khusus untuk menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu;
- ❖ Kurang sinkronnya kebijakan pusat dengan daerah terkait dengan pelayanan publik;

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pembentukan kelembagaan UPT – P2T;
- ❖ Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari instansi dan SKPD terkait;
- ❖ Menyusun mekanisme, alur, waktu, biaya serta tahapan penyelesaian pelayanan jelas dan terintegrasi dalam satu tempat;
- ❖ Menyediakan sarana dan prasarana memadai, sistem jaringan elektronik dan keamanan terjamin;
- ❖ Membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) yang berfungsi untuk mengakomodir proses perizinan yang memerlukan koordinasi dengan kabupaten/kota atau dari pemerintah pusat yang memerlukan kajian teknis atau tinjauan lapangan.

Manfaat :

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat;
- ❖ Memberikan pelayanan yang lengkap, informatif dan nyaman bagi masyarakat yang mengurus perizinan dan non perizinan;
- ❖ Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan investor.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya dukungan komitmen dan kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi;
- ❖ Terciptanya koordinasi yang baik dan sinergi antar SKPD dalam pelimpahan kewenangan perizinan;
- ❖ Tersedianya SDM yang mempunyai integritas, komitmen dan profesional
- ❖ Adanya dukungan sarana dan prasarana seperti jaringan database, server, CCTV, website.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah, KemenPAN-RB, 2013



KELOMPOK INOVASI *HUBUNGAN*

inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking.

KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN KABUPATEN TAKALAR KABUPATEN TAKALAR

Produk inovasi	: Kerjasama Bidan dan Dukun dalam pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Takalar
Jenis Inovasi	: Hubungan
Penggagas	: Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dan Bidan Desa
Tahun inisiasi	: 2009
Tahun implementasi	: 2009
Kontak Person	: Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar

Deskripsi :



Kemitraan Bidan dan Dukun merupakan suatu pendekatan praktis menangani persalinan ibu melahirkan. Program ini lebih menekankan pada pemanfaatan kekurangan dan kelebihan dari dua pelaku utama persalinan yaitu bidan dan dukun. Program ini dilatar belakangi oleh masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Takalar pada tahun 2006 yaitu sebanyak 6 orang. Disamping itu rasio antara dukun dan bidan desa cukup tinggi, dengan jumlah dukun sebanyak 190 orang sedangkan bidan desa sebanyak 52 orang. Tujuan program kemitraan ini dilakukan adalah untuk menekan angka kematian ibu saat melahirkan dan kesadaran serta peningkatan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya persalinan difasilitas kesehatan

oleh tenaga medis. Strategi dalam implementasi program ini dimulai tahun 2007 dengan menggandeng UNICEF untuk mengupayakan kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan budaya dengan menjadikan dukun dan bidan sebagai mitra kerja. Kemitraan tersebut melalui perspektif budaya sipakatau sipakainge (saling menghargai, mengetahui, dan mengingatkan) yang sangatdijunjung tinggi oleh masyarakat Takalar. Program ini juga diperkuat dengan Keputusan Bupati nomor 01 tahun 2008 tentang KBD Kabupaten Takalar dan Perda nomor 02 tahun 2010 tentang KBD Kabupaten Takalar yang mengatur peran, hak, kewajiban masing-masing profesi dengan menjunjung adat sipakatau sipakainge.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Takalar;
- ❖ Adanya komitmen dari pemerintah kabupaten Takalar dalam mendukung program kemitraan melalui kebijakan;
- ❖ Adanya koordinasi antaran bidan dan dukun dalam menangani proses kelahiran;
- ❖ Adanya bantuan pendampingan dari UNICEF;
- ❖ Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan mendukung program ini dengan pendekatan budaya sipakatau sipakainge (saling menghargai, mengetahui, dan mengingatkan).

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Kontur dan luas wilayah serta jumlah sebaran penduduk yang cukup banyak;
- ❖ Keterbatasan jumlah bidan desa yang ada;
- ❖ Banyaknya jumlah desa (93 desa) dan puskesmas (14 puskesmas) yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis;
- ❖ Budaya masyarakat yang lebih percaya kepada dukun bayi.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Inisiatif Pemda untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Takalar;
- ❖ Komitmen dari pemerintah kabupaten Takalar dalam mendukung program kemitraan melalui kebijakan;
- ❖ Mengeluarkan kebijakan daerah untuk mengatur dan memperkuat program kemitraan;
- ❖ Melakukan kerjasama antara pemangku kebijakan (UNICEF);
- ❖ Penguatan jaringan kerja melalui optimalisasi peran puskesmas, ketua penggerak PKK, dan kepala desa dalam memobilisasi dukun bayi diwilayah setempat;
- ❖ Sosialisasi program kemitraan kepada pihak terkait dan masyarakat;
- ❖ evaluasi dan monitori pelaksanaan program kemitraan bidan dan dukun.

Manfaat :

- ❖ Menurunnya jumlah kematian ibu saat melahirkan hingga tahun 2012 sebanyak 0%;
- ❖ Terjadinya penguatan kelembagaan puskesmas, bidan desa dan dukun;
- ❖ Meningkatnya kesadaran mengenai prinsip kemitraan yaitu kesetaraan (saling menghargai kekuasaan dan keahlian mitranya), keterbukaan dan saling menguntungkan;
- ❖ Meningkatnya kesadaran ibu melahirkan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya inisiatif Pemda untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan;
- ❖ Komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung program kemitraan melalui kebijakan daerah untuk mengatur dan memperkuat program kemitraan;
- ❖ Melakukan penguatan jaringan kerja melalui optimalisasi peran puskesmas, ketua penggerak PKK, dan kepala

desa dalam memobilisasi dukun bayi di wilayah setempat;

- ❖ Melakukan sosialisasi program kemitraan kepada pihak terkait dan masyarakat;
- ❖ Melakukan evaluasi dan monitори pelaksanaan program kemitraan bidan dan dukun.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku BASICS Responsive Initiative (BRI)

SEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTUL (YOGYAKARTA, SLEMAN DAN BANTUL) KOTA YOGYAKARTA

Produk inovasi	: Kerjasama antar daerah dalam bidang Persampahan, transportasi, Drainase, Air Limbah, Jalan, Air Bersih
Jenis Inovasi	: Hubungan
Penggagas	: Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul
Unit Pelaksana	: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun inisiasi	: 1990 Tahun implementasi : 2001
Kontak Person	: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Deskripsi :



Sekretariat bersama KARTAMANTUL merupakan sebuah pelembagaan kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman serta Kabupaten Bantul dalam penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur. Adanya kerjasama tersebut mempermudah dalam pengelolaan daerah karena mampu menghilangkan batas-batas administratif yang sering menjadi masalah. Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang persampahan, transportasi, drainase, air limbah, jalan, air bersih. Hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan; tentang lahan, kebutuhan air bersih, minimnya ruang publik untuk menampung aktivitas anak-anak, layanan transportasi yang belum optimal, dan belum optimalnya infrastruktur perkotaan. Untuk pengelolaannya maka mekanisme manajemen sumberdaya manusia yang

sesuai untuk mengelola sekretaris bersama ini diperlukan. Selain itu setiap daerah juga mempersiapkan anggaran yang saling terintegrasi agar setiap bidang kerjasama dapat dikerjakan dan dikelola bersama.

Tujuan pembentukan sekretaris bersama adalah untuk menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana di 3 pemerintah daerah, meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana, meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada pada 3 daerah.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan yang melewati lintas daerah ;
- ❖ Adanya kebutuhan air bersih yang bersumber dari daerah lain;
- ❖ Adanya kebutuhan layanan transportasi lintas daerah yang optimal;
- ❖ Adanya kebutuhan untuk mengoptimalkan infrastruktur perkotaan lintas daerah;
- ❖ Dorongan penyediaan dan penempatan lokasi sarana umum yang terpusat seperti TPA dan IPAL;
- ❖ Adanya keinginan untuk membangun sebuah wadah kerjasama untuk pengintegrasian infrastruktur perkotaan.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Terkait dengan pengelolaan sampah melalui TPA bersama, bisa dipastikan akan ada resistensi dari masyarakat sekitar TPA;
- ❖ Kebutuhan masyarakat yang melebihi kemampuan pemerintah daerahnya;
- ❖ Keberlangsungan kerjasama terganggu antar daerah tersebut jika terjadi pergantian pemimpin daerah;
- ❖ Masih adanya ego sektoral setiap daerah untuk lebih memprioritaskan kepentingan daerahnya masing-masing.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Melakukan kesepakatan bersama untuk menyediakan pelayanan bersama kepada masyarakat oleh pemerintah daerah;
- ❖ Menentukan pengelompokan terhadap bidang kerja yang akan dikerjakan bersama;
- ❖ Penyediaan anggaran terintegrasi oleh masing masing kabupaten/kota;
- ❖ Penyediaan Gedung Sekretaris bersama;
- ❖ Penyediaan SDM pengelola Sekretaris bersama;
- ❖ Sosialisasi kemasyarakat terkait terbentuknya sekretariat bersama.

Manfaat :

- ❖ Pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasana akan berjalan dengan baik karena tidak ada sekat administrasi antar daerah dengan adanya kerjasama ini;
- ❖ Sistem perencanaan, pembangunan dan pengelolaan wilayah akan semakin terintegrasi antar kabupaten/kota;
- ❖ Adanya peningkatan efisiensi biaya, daya saing dan mutu pelayanan publik;
- ❖ Menghilangkan ego sektoral pada setiap kota yang melakukan kerjasama.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kerjasama;
- ❖ Mempersiapkan anggaran yang terintegrasi agar mekanisme kerjasama berjalan;
- ❖ Penciptaan mekanisme MSDM yang sesuai untuk mengelola Sekretaris Bersama;
- ❖ Menyediakan gedung sekretariat bersama.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Pencarian dari literatur dan internet



KELOMPOK

INOVASI

SDM

Inovasi yang ditujukan untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM). Ruang lingkup dari inovasi sumber daya manusia adalah pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM, mulai tata nilai (budaya, mindset, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, dan pemberdayaan.

DESA MANDARA MANDIDOHA (DESA SIAGA AKTIF) KABUPATEN KONAWE SELATAN

Produk inovasi	: Peningkatan Peran Masyarakat di Desa Melalui Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Poskesdes
Jenis Inovasi	: Sumber Daya Manusia
Unit Pelaksana	: Dinas Kesehatan Konawe Selatan dan Tim Basics
Penggagas	: Dinas Kesehatan Konawe Selatan
Tahun inisiasi	: 2012
Tahun implementasi	: 2012
Kontak Person	: Kabupaten Konawe Selatan

Deskripsi :



Desa Mandara Mandidoha adalah Program Desa Siaga Aktif yang diterapkan di desa pada wilayah kabupaten Konawe Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan peran masyarakat desa. Desa Mandara Mandidoha merupakan pengembangan konsep desa siaga aktif yang telah dirintis oleh Kementerian Kesehatan. Pengembangan Desa Mandara Mandidoha dilakukan melalui *learning by doing*. *Learning by doing* adalah penerapan konsep dan hasil yang berhasil diraih kemudian dilembagakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Program desa Mandara Mandidoha diterapkan mengingat keberadaan tenaga kesehatan dan pendidikan sering tidak berada di tempat ketika mereka dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping itu, menurut survei

kepuasan masyarakat menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Konawe Selatan masih belum puas dengan pelayanan kesehatan yang terdapat di daerah tersebut.

Tujuan dari adanya desa Mandara Mandidoha adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dan institusi masyarakat dalam menghadapi masalah yang terletak di desa tersebut.

Desa Mandara Mandidoha mengusung konsep dengan melakukan kolaborasi organisasi kemasyarakatan dan unsur pemerintah daerah diantaranya melalui : pemetaan jumlah ibu hamil, penguatan institusi desa, fasilitasi pembentukan SOP dan advokasi peraturan daerah.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan beserta jajarannya;
- ❖ Adanya keinginan untuk meningkatkan peran masyarakat desa.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Sulitnya akses menuju pusat pelayanan karena kondisi geografis dan topografis;
- ❖ Adanya data yang menunjukkan Kabupaten Konawe Selatan merupakan kategori bermasalah di bidang kesehatan;
- ❖ Ketidakpuasan masyarakat masih tinggi terhadap pelayanan kesehatan di kabupaten tersebut.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Mengelola data kesehatan dan pendidikan;
- ❖ Membangun komitmen para pihak di tingkat kabupaten;
- ❖ Membentuk kebijakan program untuk mendukung program;
- ❖ Implementasi program Desa Mandara Mandidoha.

Manfaat :

- ❖ Mendorong meningkatnya pemeriksaan ibu hami, persalinan;
- ❖ Kohesivitas masyarakat desa dalam penanggulangan kegawatdaruratan dalam mencegah kematian ibu bersalin yang harus dirujuk;
- ❖ Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dalam mencegah adanya anak tidak bersekolah;
- ❖ Meningkatkan gairah penguatan ekonomi di desa melalui koperasi dan BUMDes.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Adanya komitmen dari kepala daerah dan para stakeholder untuk menerapkan konsep Mandara Mandidoha;
- ❖ Adanya kebijakan yang mendukung pelaksanaan konsep Mandara Mandidoha;
- ❖ Adanya dukungan dana yang memadai dari APBD.

Teknik Validasi	: Data Sekunder
Sumber	: BASICS Praktik Cerdas

PROGRAM PEREMPUAN PAHLAWAN EKONOMI KOTA SURABAYA

Produk inovasi	: Partisipasi perempuan melalui pemberdayaan UMKM
Jenis Inovasi	: Sumber Daya Manusia
Penggagas	: Ir. Tri Rismaharini, M.T (sekarang Walikota Surabaya)
Unit Pelaksana	: Bapemas dan KB Kota Surabaya
Tahun inisiasi	: 2004
Tahun implementasi	: 2010
Kontak Person	: Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya Telp. (031) 5929102, 5929103

Deskripsi :



Program Perempuan Pahlawan Ekonomi adalah program pengembangan potensi komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan yang tersebar di kota Surabaya secara berkelanjutan setiap tahun sehingga kaum perempuan dapat berperan aktif tanpa meninggalkan rumah. Program ini muncul karena masalah sosial yang melanda kaum perempuan yaitu akses dan peran perempuan hanya dinilai sebatas pelengkap saja.

Program Perempuan Pahlawan Ekonomi bertujuan 1) untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota Surabaya melalui pemberdayaan ekonomi; 2) untuk mendukung pengembangan potensi UMKM. Sistem yang diterapkan oleh Program Perempuan Pahlawan Ekonomi antara lain 1) kerjasama dalam kegiatan usaha; 2) membangun kekuatan pemasaran bersama; 3) Membentuk permodalan bersama; 4)

memperkuat akses pasar bersama; 5) membangun pola jaringan dan kemampuan manajemen bersama.

Faktor Pendorong inovasi :

- ❖ Keinginan Pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas hidup dan meningkatkan peran perempuan di masyarakat;
- ❖ Keinginan Pemerintah daerah untuk mendorong perempuan lebih kreatif dengan menghasilkan karya-karya yang layak jual;
- ❖ Keinginan Pemerintah daerah untuk mendorong perempuan ikut berperan aktif tanpa harus meninggalkan rumah.

Faktor Penghambat Inovasi :

- ❖ Perempuan di kota masih kesulitan dalam memperoleh akses sumber dana, menjadi korban perdagangan manusia, dan kekerasan dalam rumah tangga;
- ❖ Masih adanya anggapan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama;
- ❖ Akses dan peran perempuan di sektor ekonomi hanya dipandang dan dinilai sebatas pelengkap;
- ❖ Sulitnya mencari swasta yang mau menggandeng program ini.

Tahapan Proses Inovasi :

- ❖ Proses rekrutmen, proses perekrutan dimulai sejak dari tingkat RW. Rekrutmen dilakukan kelompok usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi untuk berkembang.
- ❖ Proses Seleksi, proses seleksi dilakukan di tingkat kelurahan. Pada proses pemilihan Pahlawan Ekonomi ini, tim seleksi dari Bapemas dan KB Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan tim dari unsur perguruan tinggi dan pihak swasta melakukan seleksi dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.
- ❖ Proses Pengembangan, Pada tahap ini dilakukan pelatihan kepada para perempuan yang membutuhkan tambahan keterampilan, dimana kegiatan ini dilakukan di pusat perbelanjaan, kantor sponsor ataupun di Bapemas dan KB.
- ❖ Program Peluncuran, Agar kegiatan ini diketahui oleh masyarakat secara luas maka diadakan peluncuran Program Pahlawan Ekonomi dan pengumuman pemenang Pahlawan Ekonomi yang telah lolos proses seleksi. Pihak swasta memberikan bantuan dengan menanggung biaya acara peluncuran program, pengumuman pemenang Pahlawan Ekonomi dan memberikan hadiah kepada pemenang. Pemenang dari kegiatan Pahlawan Ekonomi mendapat kontrak kerja untuk menyediakan barang atau jasa tertentu.
- ❖ Roadshow, Roadshow dilakukan untuk memperkenalkan produk usaha mikro dan kecil yang berkembang di masyarakat, sambil mensosialisasikan secara terus menerus program pahlawan ekonomi. Roadshow dilakukan di setiap kecamatan yang ada di Kota Surabaya.
- ❖ Pasar Rakyat, Kegiatan pasar rakyat mempunyai skala lebih besar dari kegiatan roadshow, dilakukan dengan bekerja sama dengan pengelola pusat perbelanjaan dengan tujuan untuk mengembangkan pasar dari para pelaku UMKM. Peserta Pasar Rakyat merupakan para pemenang Pahlawan Ekonomi dan kandidat-kandidat terbaik kecamatan dan kelurahan di seluruh Surabaya Proses perekrutan dimulai sejak dari tingkat RW. Rekrutmen dilakukan kelompok usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi untuk berkembang.

Manfaat :

- ❖ Mampu meningkatkan kepedulian masyarakat akan permasalahan gender di Kota Surabaya di berbagai bidang;
- ❖ Peningkatan efisiensi dan efektifitas terhadap pemerintah daerah dan terhadap tingkat pengeluaran biaya;
- ❖ Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitarnya;
- ❖ Keterlibatan secara aktif satuan kerja perangkat daerah sesuai tupoksi masing-masing;
- ❖ Peningkatan ekonomi keluarga miskin melalui pelatihan oleh Pemkot Surabaya;
- ❖ Pembinaan secara langsung oleh Pemkot Surabaya untuk mengembangkan usaha;
- ❖ Menekan angka pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Prasyarat Replikasi :

- ❖ Komitmen Kepala daerah dan dukungan politik dari DPRD;
- ❖ Adanya kerjasama antara pemerintah kota dengan institusi pendidikan dan sektor swasta;
- ❖ Ketersediaan anggaran untuk menjalankan program;
- ❖ Adanya partisipasi masyarakat yang aktif untuk ikut serta dalam program-program pemerintah daerah.

Teknik Validasi : Data Sekunder

Sumber : Buku Apeksi 8

Epilog

Keberhasilan suatu inovasi berasal dari komitmen dari pimpinannya, Komitmen tersebut juga disalurkan kepada penerus dari kepemimpinan sebelumnya, sehingga inovasi yang telah dicanangkan dapat berjalan. Inovasi bergerak secara dinamis dan harus dilakukan secara pro aktif untuk mewujudkan sebuah perubahan signifikan yang efektif. Sebagai penutup dari Epitome Direktori Inovasi Administrasi Negara akan disajikan beberapa kutipan-kutipan pembangun semangat inovasi. Salam Inovasi... Eureka...

- Inovasi itu mudah, namun karena belum terbiasa maka dipahami sebagai sesuatu yang sulit.
- Inovasi itu alternatif, artinya tidak selalu yang rumit tetapi mulailah dengan yang paling mudah dan sederhana.
- Inovasi itu hakekatnya sebuah transformasi dan revolusi yang bergerak secara dinamis serta harus dilakukan secara proaktif. (Dr. Noorsyamsa Djumara, MSi)
- Menjalankan program kegiatan inovatif Pimpinan-pimpinan harus punya komitmen, menerapkan konsistensi dalam mewujudkan program, harus bisa memberikan ketauladanan /contoh (turun ke lapangan, mendampingi, menanyakan, memberikan support, tidak mudah menyalahkan anak buah), mengarahkan tapi tidak menuntut. (memotivasi tetapi tidak meminta imbalan komisi. (Kepala Dinas Pengelola Pasar kota Surakarta)
- Hal pokok suatu inovasi adalah komitmen dari pemegang kebijakan (pimpinan), kalau tidak ada komitmen tidak akan bisa. Komitmen itu bisa dijabarkan kepada SKPD yang ada. Tidak ada satupun SKPD yang bisa jika tidak ada kerjasama dan komitmen (Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Surakarta)
- Melakukan perubahan dari “business as usual” sangat tidak mudah karena membutuhkan fokus, dukungan dana dan dukungan dari pimpinan agar program perubahan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien (Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Selatan)
- Inovasi butuh komitmen bersama, oleh karena itu pemahaman pentingnya inovasi bagi setiap anggota organisasi akan mempercepat terwujudnya inovasi.
- Direktori inovasi disusun dengan sangat sederhana, komprehensif, mudah dipahami dan dapat mempermudah replikasi inovasi.

Inovasi merupakan “segala sesuatu yang berkenaan dengan gagasan dan pengetahuan baru dan transformasinya kedalam hasil (outcome) yang dapat menciptakan nilai tambah pada praktik dan proses, barang dan jasa, adopsi teknik dan pendekatan baru dalam pengelolaan satu organisasi.”

(Kepala Lembaga Administrasi Negara)

“Inovasi itu mudah, namun karena belum terbiasa maka dipahami sebagai sesuatu yang sulit “

(Deputi Inovasi Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara)

"Inovasi itu hakekatnya sebuah transformasi dan revolusi yang bergerak secara dinamis serta harus dilakukan secara proaktif."

(Dr. Noorsyamsa Djumara, Msi – Sesepeh LAN)

"Hal pokok suatu inovasi adalah komitmen dari pemegang kebijakan (pimpinan), Kalau tidak ada komitmen tidak akan bisa."

(Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Surakarta)

"Melakukan perubahan dari “business as usual” sangat tidak mudah karena membutuhkan fokus, dukungan dana dan dukungan dari pimpinan agar program perubahan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien "

(Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Selatan)

" Menjalankan program kegiatan inovatif Pimpinan-pimpinan harus punya komitmen, menerapkan konsistensi dalam mewujudkan program, harus bisa memberikan ketauladanan/ contoh (turun ke lapangan, mendampingi, menanyakan, memberikan support, tidak mudah menyalahkan anak buah), mengarahkan tapi tidak menuntut. (memotivasi tetapi tidak meminta imbalan komisi. "

(Kepala Dinas Pengelola Pasar kota Surakarta)